

**PERAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
DALAM MENGELOLA WEBSITE SEBAGAI SARANA PUBLIC
RELATIONS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE**



SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh

**MULKHAERI IKRAM
4516021034**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2020


HALAMAN PENGESAHAN

PERAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN DALAM
MENGELOLA WEBSITE SEBAGAI SARANA PUBLIC RELATION PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE

MULKHAERI IKRAM

4516021034

Pembimbing I,



Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd

NIDN :0904046601-100100

Pembimbing II,



Marini, S.Sos, M.I.Kom

NIDN :0919047901

Diketahui Oleh :

Dekan,

FISIP Universitas Bosowa



Prof. Wicaksono, S.IP, M.A

NIDN : 0927117002

Ketua

Jurusan Ilmu Administrasi Negara



Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si

NIDN : 0915087603

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, sang khalik pencipta langit dan bumi beserta segala isinya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayangNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Peran Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Dalam Mengelola Website Sebagai Sarana Public Relations Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, Tak lupa pula shalawat dan salam dipanjatkan kepada Rasulullah SAW yang telah diutus ke bumi sebagai lentera hati manusia, Nabi yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan luar biasa seperti saat ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyelesaiannya, Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu selanjutnya peneliti mengharapkan saran, gagasan serta ide kritis demi perbaikan skripsi ini menjadi karya tulis yang lebih baik, sebab dengan segala keterbatasan peneliti berupaya dengan segenap kemampuan menjadi perwujudan bahwa peneliti hanya manusia biasa dengan berbagai kekurangan.

Terselesaikannya karya tulis ini, peneliti sangat menyadari bahwa selama dalam proses penyelesaian skripsi ini peneliti tidak luput dari berbagai kesulitan dan hambatan-hambatan, namun berkat bantuan serta dorongan semua pihak baik itu secara moril, materil, maupun tenaga, sehingga kesulitan dan hambatan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, dengan sikap penuh tawaddu' dan keikhlasan penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Saleh Pallu, M. Eng selaku Rektor Universitas Bosowa
2. Arief Wicaksono S.IP, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa
3. Kepada Nining Haslinda Zainal, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang dengan kerjasama dan bantuan beliau serta dukungan yang tiada hentinya dalam memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti hingga peneliti dapat berada hingga fase ini.

4. Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd selaku pembimbing I, dan Marini S.Sos, M.I.Kom selaku pembimbing II yang telah begitu banyak memberikan waktu dan ide dalam memberikan masukan-masukan mengenai perbaikan karya tulis ini.
5. Kepada Ade Ferry Afrisal S.H, M.Sc yang telah menyumbangkan ide, pikiran serta waktunya untuk membantu peneliti dalam pembuatan Skripsi yang tak kenal lelah, dan dapat dihubungi kapanpun.
6. Segenap bapak dan ibu dosen yang telah membantu peneliti selama penyusunan karya tulis ilmiah ini.
7. Secara khusus peneliti sampaikan banyak terima kasih kepada orang tua, Ayahanda Muh. Iqbal, S.P, MM dan Ibunda Muliani karena berkat doa dan cintanya yang selalu setia mendampingi peneliti hingga berada dititik ini. Tanpa bantuan serta dukungan beliau peneliti tidak akan mampu berada hingga fase ini, dengan kasih sayangnya yang terus mengalir, ribuan terima kasih pun tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan besarnya perjuangan Ayahanda dan Ibunda untuk terus mendoakan dan mendukung penulis hingga dititik akhir penulisan ini.
8. Kepada sahabat-sahabat yang telah bersedia menemani peneliti dalam melewati malam untuk menemukan inspirasi serta ide untuk dituangkan dalam karya tulis ini. Khususnya, Ismiyanti Sofyan dan Sartika Elfiana yang bersedia membantu banyaknya urusan yang tumpang tindih di saat bersamaan untuk diselesaikan,
9. Kepada sahabat sahabat seperjuangan SMA hingga menjadi mahasiswa baru di universitas berbeda, yang dukungan serta doanya tidak pernah putus untuk saling menyemangati satu sama lain, bertekad untuk menyelesaikan studi di tahun yang sama dan tetap menyempatkan waktu untuk berkumpul dan bercerita tentang hari hari berat yang dilalui, masa indah mengenal seseorang hingga bersama menyelesaikan patah hati, teruntuk kepada Andi Megadara, Ainun Akfindarwan, Ilma Ahdelia, Rezki Mutmainnah, Rusydah Khaerati, Miftahul Jannah dan Kepada yang terjauh di Surabaya Adhe Nuryunita yang tidak mampu digapai oleh pertemuan.

Tidak lupa juga kepada para lelaki yang terus membantu dan mendampingi dalam hambatan dan tantangan, Yudha Hernawan, Waliansyah Maulana, Andi Mahdi Sahdani, Andi Juanda dan Andi Ichsan yang menjadi support system terbaik ditengah menghadapi segala macam masalah berkepanjangan dengan memfasilitasi Camping serta jalan-jalan.

10. Kepada Sahabat sahabat “Ukhtifillah” yang tak dapat disebutkan satu persatu.
11. Serta Kepada sahabat-sahabat semasa sekolah “EXCO” yang tiada hentinya memberikan dorongan serta motivasi untuk menyelesaikan karya tulis ini tepat waktu.
12. Kepada yang telah singgah sebagai support system namun tak menetap menjadi motivasi dan pengalaman berharga bagi peneliti untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, serta cerita yang diukir akan menjadi lentera dalam perjalanan penulis menempuh program studi S1.
13. Keluarga Besar Lembaga FISIP Universitas Bosowa: BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) yang telah banyak memberikan bantuan, semangat, doa serta menjadi wadah bagi peneliti dalam berproses dan belajar.
14. Kepada rekan-rekan relawan di Bosowa Peduli dimana kita memiliki visi yang sama dalam membantu kemanusiaan, yang harus selalu fleksibel disetiap pekerjaan, sangat membantu peneliti dalam menimbah ilmu akhirat dan menjadi keluarga terbaik dalam perantauan menimbah ilmu.
15. Saudara – Saudara beda rahim yang telah menjadi sahabat senasib dan seperjuangan peneliti yaitu mahasiswa (i) Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2016.
16. Teristimewa kepada Bunda Suryati Husain S.H, M.H yang bersedia menyumbangkan waktu dan ide nya dalam penelitian ini serta menjadi panutan bagi peneliti dalam menjalankan hakikat sebagai perempuan haruslah diiringi dengan hati yang lembut, bijaksana dan berjiwa sosial.
17. Kepada seluruh jajaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone yang telah bersedia memberikan akses data dan opininya dalam mendukung peneliti menyelesaikan skripsi.

18. Kepada tim peneliti yang membantu di lapangan, Aprilia Astiwi dan rekannya yang tanpa kenal lelah menemani dan mendokumentasikan selama proses interview/wawancara.
19. Semua pihak yang telah memberikan kontribusinya terhadap peneliti yang mohon maaf tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga dengan segala kebaikan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam proses panjang mengenyam pendidikan selama 3 (tiga) tahun ini hingga saat ini memasuki babak baru dari proses belajar peneliti menuju ke tingkat akhir dapat bernilai ibadah dan berkat bagi hidupnya serta mendapat kebahagiaan yang berlimbah dibawah perlindungan Allah SWT. Akhir Kalam, Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Makassar, 30 Januari 2020

Peneliti

Mul Khaeri Ikram

ABSTRAK

Mul Khaeri Ikram, 4516021034, Peran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam mengelola Website sebagai Sarana Public Relations pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, Pembimbing I Syamsuddin Maldun dan Marini selaku Pembimbing II.

Keberadaan Website Pemerintah daerah menjadi wadah baru dalam menerapkan prinsip Public Relations dalam bentuk sarana Online. Olehnya itu, Website Pemerintah Daerah menjadi bentuk implementasi e-government pada pemerintah daerah Kab. Bone. Metode Penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, melalui observasi dan wawancara sehingga informasi dan data dapat dibandingkan serta dibuktikan kebenarannya dengan pengabsahan data (triangulasi data). Dalam penentuan informan menggunakan snowball dan purposive sampling (dikondisikan dengan keadaan tempat penelitian).

Hasil Penelitian disimpulkan bahwa Website Pemerintah Daerah merupakan sarana baru yang disajikan secara online demi membangun komunikasi pemerintah dan masyarakat. Dalam strategi yang diterapkan dinas komunikasi informatika dan persandian bahwa penetapan tujuan dan program yang banyak dihabiskan membangun sarana dan prasarana kantor sehingga dalam pengenalan dan sosialisasi cenderung kurang dimaksimalkan. Dalam efektivitasnya, pencapaian target dan sasaran sesuai program yang direncanakan hampir memenuhi realisasi anggaran yang ditargetkan, namun pada kapabilitas sumber daya manusia baik itu internal maupun masyarakat itu sendiri kurang memahami manfaat akses informasi melalui website pemerintah daerah, sehingga pada satuan kerja perangkat daerah itu sendiri perlu ditingkatkan kemampuannya, serta masyarakat membutuhkan sosialisasi akan manfaat akses informasi.

Kata Kunci : Website Pemerintah Daerah, E-Government, Public Relations.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK ISI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. <i>E-Government</i> dan <i>Good Governance</i>	14
B. Hubungan Masyarakat (<i>Public Relations</i>)	19
C. Peran Pemerintah Daerah dalam menjalin <i>Public Relations</i>	27
D. Strategi	34
E. Efektivitas	36
F. Penelitian Terdahulu	37
G. Kerangka Konsep.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	42
B. Tipe Penelitian	43
C. Penentuan Target Informan.....	43
D. Jenis dan Sumber data.....	44
E. Deskripsi Fokus dan Indikator	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	47
G. Teknik Pengabsahan Data.....	49
H. Teknik Analisis data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	52
B. Identitas Informan	66
C. Hasil Penelitian	73
1) Strategi.....	79
2) Efektivitas.....	104
D. Pembahasan Hasil Penelitian	117
1) Strategi.....	118
2) Efektivitas.....	128
BAB V PENUTUP	138
A. KESIMPULAN	138
B. SARAN	141
DAFTAR PUSTAKA	145
LAMPIRAN 1, INSTRUMEN PENELITIAN	148
LAMPIRAN II, DOKUMENTASI PENELITIAN.....	157

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	42
Gambar 4.1	61
Gambar 4.2	67
Gambar 4.3	69
Gambar 4.4	69
Gambar 4.5	70
Gambar 4.6	73
Gambar 4.7	81
Gambar 4.8	83
Gambar 4.9	85
Gambar 4.10	88
Gambar 4.11	90
Gambar 4.12	91
Gambar 4.13	92
Gambar 4.14	101
Gambar 4.15	101
Gambar 4.16	104
Gambar 4.17	109

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	40
Tabel 4.1.....	107

DAFTAR SINGKATAN

Bimtek	: Bimbingan Teknis
Bimkhus	: Bimbingan khusus
Diskominfo	:Dinas Komunikasi Informatika
Kabag	: Kepala Bagian
Kabid	: Kepala Bidang
KIM	: Kelompok Informasi Masyarakat
Lakip	: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
OPD	: Organisasi Pemerintah Daerah
Pemda	:Pemerintah Daerah
PR	: Public Relations
PAN-RB	: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Renja	: Rencana Kerja
Renstra	: Rencana Strategis
SDM	: Sumber Daya Manusia
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi Daerah

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Instrumen Penelitian.....	148
LAMPIRAN II Dokumentasi Penelitian.....	157

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman telah berubah, melewati ribuan lorong kehidupan yang mengarah pada peradaban yang kian menyerempet belahan kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, rasa ingin tahu manusia memuncak pada hal-hal yang ada di sekitarnya. Berawal dari rasa ingin tahu, manusia selalu mengeksplorasi yang ada di sekitarnya, baik atau buruk, kemudian ingin menyampaikan hasilnya kepada orang lain. Bertahap dari komunikasi yang semula bersifat personal, kemudian dapat berkembang menjadi proses penyampaian pesan yang bersifat massal, sehingga informasi menjadi lebih luas jangkauannya serta dapat merubah suatu pola kehidupan masyarakat yang lebih luas.

Zaman terus mengubah sendi-sendi kehidupan manusia, kehidupan demokrasi di Indonesia menjadi tonggak lahirnya peradaban manusia di era sekarang. Demokrasi lahir dari keinginan dan kebutuhan rakyat yang semakin jauh dari peredarannya dimana semakin menuntut keadilan dan kesamarataan. Indonesia adalah Negara yang kaya akan budaya, ras, suku, dan agama, bahkan demokrasi menggambarkan jauh lebih dalam mengenai perbedaan yang tidak hanya soal perbedaan jenis kulit semata, namun, perbedaan pemikiran dan anggapan justru merupakan hal yang lumrah di tengah banyaknya perbedaan. Hingga akhirnya, demokrasi mengarah pada Era Revolusi Industri 4.0 yang menuntut rakyatnya untuk beropini, berekspresi dan berpendapat dalam berbagai

tingkatan kehidupan, baik itu kehidupan maya (Sosial Media) ataupun kehidupan nyata.

Perkembangan teknologi informasi yang kian menjadi kebutuhan manusia, hadir kebutuhan lain yang tak terbantahkan dalam seni kehidupan berdemokrasi. Demokrasi memilih Pemerintah sebagai perwujudan keinginan rakyat dalam pembangunan, baik itu fisik maupun non fisik. Oleh karena itu, Pada era globalisasi perkembangan teknologi informasi melalui internet sangat pesat dan dalam beberapa dekade terakhir membawa dampak diberbagai sektor pemerintahan. Akibatnya menimbulkan revolusi baru dalam pemerintahan yaitu peralihan dari sistem kerja yang konvensional ke era digital seperti penggunaan teknologi komputer dan internet. Menurut Hage dan Powers (dalam Anwar 2003: 111) menyebutkan salah satu ciri yang menonjol di era kemajuan teknologi komunikasi dan informasi ini adalah digunakannya teknologi komputer.

Awal mula keterbukaan Pemerintah terkait penyebaran informasi kepada masyarakat sebagai bentuk demokrasi tersebut tercantum dalam UU No.44 Tahun 1999 yang mengungkapkan bahwa “Kemerdekaan Pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsure yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-undang 1945 harus dijamin.” Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pers sebagai bentuk perwujudan Negara yang demokratis.

Singkatnya, banyak hal yang dapat dilakukan Pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan dengan melibatkan partisipasi publik khususnya di daerah yang telah memegang hak otonomi atas daerah tersebut. Tercantum dengan jelas pada Undang-undang No 23 tahun 2014 bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah sebagai badan publik, memiliki peran yang semakin kuat sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, yang diharapkan dapat memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat setempat. Terkait dengan harapan tersebut, Pemerintah daerah diberi wadah dalam mewujudkan peranannya, tumbuh media lokal yang berupaya untuk memberitakan peristiwa daerah maupun kinerja pemerintah di wilayahnya. Pemberitaan media lokal terkait kegiatan pemerintahan, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlunya partisipasi di daerah. Sebab, pemerintahan merupakan lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan melalui aturan-aturan yang harus dijalankan (Syafiie, 2003:3). Namun, tak dapat dilupakan bahwa Pemerintah pun berhak untuk membuka layanan informasi khusus mengatasmakan pemda agar komunikasi antara masyarakat dan pemerintah terjalin, yang merupakan usaha bersama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan daerah yang hanya dapat terwujud dengan sosialisasi program pemerintah diberbagai media.

Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan publik yang efektif, hal ini seiring dengan makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Marshall McLuhan (1964) mengatakan bahwa media itu “*The Extension of Man*” (media itu perluasan manusia). Dapat dikatakan, media menjadi ‘kepanjangan’ tangan manusia. Apa yang menjadi keinginan, cita-cita, dan tujuan seorang manusia bisa diperluas oleh media. Media dengan jangkauan yang dimilikinya akan meluaskan banyak hal pada diri manusia, menerobos ruang dan waktu. Banyak media yang bisa dijadikan alat oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Salah satu cara untuk memberikan layanan *e-government* kepada masyarakat yaitu berupa website Pemerintah Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan layanan Elektronik (*E-Service*), dimana memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, layanan, dan lain-lain. Mengakses informasi, layanan, dan lain-lain [1]. Tujuan pokok good governance adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua komponen pelaku (negara, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak swasta). Menyatakan bahwa salah satu wujud tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah terdapatnya citra pemerintahan yang demokratis.

Ditelaah lebih lanjut, Perpindahan dari prinsip kerja yang konvensional ke era digital mengalir kearah *E-Government* dimana hal tersebut merupakan suatu sistem pemerintah yang menggunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet dalam memberikan pelayanan dan juga informasi

kepada publik, tetapi juga merupakan sebuah sistem yang akan mengintegrasikan instansi-instansi pemerintah yang ada serta mempermudah jalur bagi masyarakat luas dalam mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan. *E-government* akan menjauhkan kesan pemerintah yang tidak melek teknologi atau apatis terhadap berbagai perubahan yang terjadi.

Penerapan sistem ini diatur didalam Inpres RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Didalam Inpres tersebut diatur bahwa setiap lembaga pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah wajib untuk membuat, mengembangkan serta menerapkan konsep tersebut pada masing-masing lembaga, terutama berkaitan dengan penyediaan informasi kepada publik. Hal lain yang melatar belakangi penerbitan Inpres yaitu untuk memberikan gambaran yang jelas tentang mekanisme atau konsep *e-government* yang harus diterapkan pada masing-masing lembaga baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah serta memberikan persepsi atau pemahaman yang serupa bagi semua instansi pemerintah tentang hal ini sehingga terjadi keseragaman dalam menerapkan sistem atau konsep tersebut pada masing-masing instansi pemerintah. Diterbitkannya Inpres No. 3 Tahun 2003 mewajibkan instansi pemerintah ditingkat pusat dan daerah memiliki website sebagai sistem yang menaungi *E-Government* itu sendiri. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu diingat bahwa ruang lingkup pemerintah dalam skala pemerintahan daerah di Sulawesi selatan, yakni Kabupaten Bone tak lepas dari usaha dalam memperbaiki dan pembaharuan pembangunan kearah yang lebih baik. Tak berbeda dengan daerah lain, yang mengacu pada aturan perundang undangan

pemerintah daerah dan dalam rangka mewujudkan *E-Government*, Pemda Kabupaten Bone tengah berada pada posisi melaksanakan prinsip-prinsip *e-government* dengan menghadirkan layanan informasi publik yang dikelola oleh pemerintah daerah. Badan pusat statistik mencatat bahwa Kabupaten Bone telah mencapai 863.654 jiwa dan sekitar 259 ribu jiwa atau 30 % dari jumlah penduduk telah mengakses internet, baik itu untuk mengakses informasi atau social media, yang pada dasarnya social media pun menyediakan layanan tersebut untuk informasi publik, baik itu berita lokal maupun nasional.

Berbicara mengenai pemerintah berbasis *E-Government*, maka lekat dengan Hubungan Masyarakat (Humas) yang berfungsi sebagai manajemen membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat untuk kedua belah pihak, hubungan atau interaksi ini mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Fungsi manajemen dari sikap budi yang direncanakan dan dijalankan secara berkesinambungan oleh organisasi atau lembaga umum dan swasta untuk memperoleh atau membina saling pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang mempunyai hubungan atau kaitan, dengan cara mengevaluasi opini publik mengenai organisasi atau lembaga tersebut, dalam rangka mencapai kerjasama yang lebih produktif, dan untuk memenuhi kepentingan bersama yang lebih efisien, dengan kegiatan penerangan yang terencana dan tersebar luas. Olehnya itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalin hubungan dengan masyarakatnya melalui pemanfaatan website sebagai jalur komunikasi lain antara pemerintah dan masyarakat dengan menjalankan prinsip-prinsip humas.

Humas Pemerintah mempunyai peran penting dalam membuka ruang bagi publik untuk mendapatkan akses informasi publik. Adanya UU Keterbukaan Informasi Publik, merupakan momentum bagi Humas Pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan informasi, penerangan, dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, aktivitas, dan langkah-langkah pemerintah secara terbuka, transparan, jujur dan objektif. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat, termasuk media, bila tidak akurat, cepat, dan mudah, dapat menyebabkan kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak informatif, dan tidak membumi. Disinilah tantangan Humas Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi dalam memperoleh keterbukaan informasi, khususnya menyangkut pelayanan terhadap publik. Tentu saja hal ini tidak mudah untuk merubah perilaku pemberi informasi (dalam hal ini adalah pejabat publik), yang semula mereka “lebih senang” dilayani, kini dengan adanya UU KIP mereka harus melayani informasi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dan pengambil kebijakan membutuhkan corong penyampaian informasi. Begitu juga masyarakat sebagai objek yang menikmati pembangunan dan pelaksana kebijakan juga harus mengetahui sumber informasi yang tepat. Sesuai dengan program yang dijalankan.

Penelusuran website milik Pemerintah daerah Kabupaten Bone dapat diakses melalui *Bone.go.id*, dimana portal akan mengarah kepada ikon Kabupaten Bone secara keseluruhan, yang memuat profil Pemda dan sosialisasi program pembangunan pemerintah yang terbaru dapat di akses melalui website tersebut.

Dalam banyaknya persaingan media media lokal yang berada di daerah, dapat dipastikan bahwa website milik pemerintah telah dituntut untuk bersaing dalam berinovasi menyajikan layanan informasi publik yang akurat dan terpercaya dibanding media-media lokal lainnya sehingga dalam membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan system manajemen Humasdemi mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam sosialisasi program pembangunan daerah masih menjadi tantangan untuk mencetak eksistensinya.

Diluncurkannya website resmi tersebut bertujuan untuk semakin membuka keran informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus menjembatani komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Bone dengan masyarakat luas. Apabila penerapan *e-government* tersebut berjalan dengan lancar dan baik, maka sangat menunjang terwujudnya prinsip-prinsip humas. Dalam ilmu administrasi public, public relation (Hubungan Masyarakat) sangat penting untuk membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi atau instansi itu. Public relation (Hubungan masyarakat) sangatmempengaruhikesuksesan atau kegagalan instansi atau organisasai itu.Jikadapat membangun interaksiyang baik,saling mengerti dan mempunyai rencana yang matang untuk di jalankansecara berkesinambungan maka kerjasama itu dapat sukses dan saling menguntungkankedua belah pihak.Humas di Lembaga Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk dapat menjadi penghubung antar lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan lembaga-lembaga non pemerintah, lembaga pemerintah dengan media dan antara lembaga pemerintah dengan aparaturnya

serta masyarakat luas. Dalam perannya sebagai jembatan penghubung ini, Humas Pemerintah mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan program/kebijakan, aktivitas dan capaian yang diraih oleh lembaga hingga tanggapan lembaga atas respon, aspirasi dan opini yang berkembang di masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Secara politis, pemanfaatan website seharusnya sebagai sarana berinteraksi dan sosialisasi aktivitas pemerintah agar mampu memberikandua manfaat, yaitu meningkatkan efektifitas dan mendorong keterlibatan masyarakat untuk terlibat (Downey, 2010: 189-192). Efektivitas dapat tercipta ketika interaksi antara masyarakat dan pemerintah semakin dipersingkat dengan tidak perlunya lagi mengunjungi badan publik. Terjadi penghematan biaya, waktu, dan energi untuk distribusi informasi. Di samping efektivitas, menurut Downey (189-192), keberadaan website resmi pemerintahan pun mampu meningkatkan kualitas masyarakat dengan membuka ruang keterlibatan dalam pemerintahan dalam garis besar partisipasi publik.

Secara operasional, manfaat website resmi Pemerintah Kabupaten Bone telah memberikan peningkatan yang signifikan dengan diberikannya penghargaan nominasi kategori website terbaik pada Sul-Sel EXPO 2019, namun belum menyandang juara sebagai peraih website terbaik yang dianugerahkan kepada Luwu Timur. Hal tersebut tentu membanggakan, tapi esensi penting yang seharusnya didapatkan adalah tingkat kepuasan masyarakat dalam mengakses informasi. Dalam penelusuran, 6 dari 10 mahasiswa Bone yang bermukim di Makassar diwawancara singkat mengenai keberadaan website pemda ternyata

belum mengetahui adanya website tersebut. Beranjak dari hal tersebut, dibutuhkan penelitian mendalam atas keabsahan informasi yang didapatkan sehingga memperkuat Pra Penelitian tersebut. Hal ini juga dibuktikan dengan pengunjung website resmi Pemerintah Kabupaten Bone (terlihat jumlah pembaca dalam informasi yang diakses) rata-rata hanya berjumlah 200-300 pembaca per bulannya pada beberapa informasi tertentu yang disajikan. Faktor operasional lain yang perlu dilihat adalah website resmi Pemerintah Kabupaten Bone belum menghadirkan konten yang menarik bersifat inovatif sebagai umpan diakses oleh publik, baik itu penataan informasi yang ada didalamnya maupun dari segi penataan fisik dari portal tersebut. Padahal jika ditelaah lebih lanjut, website pemda Kabupaten Bone telah menyajikan berbagai informasi mengenai perencanaan pembangunan dan berbagai sosialisasi program pembangunan yang mengharapkan umpan balik dari masyarakat itu sendiri untuk diketahui dan dijadikan bahan untuk membentuk opini publik terhadap tercapainya transparansi informasi pemerintah kepada masyarakat.

Keprihatinan saat ini adalah seberapa mampu website yang dikelola pemerintah daerah untuk tetap menjadi media informasi layanan publik terpercaya dimasyarakat sehingga membangun citra pemerintah dalam hal pembangunan, dan seberapa besar peran website milik pemerintah daerah dalam menjalin hubungan dengan masyarakat atas program program pembangunan yang dicanangkan.

Berdasarkan penjelasan dan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana strategi pengelolaan website milik pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informasi dalam penyelenggaraan pembangunan

daerahpasca penganugerahan nominasi kategori website terbaik pada Sul-Sel Expo 2019 yang belum menyanggah gelar juara, khususnya penyediaan layanan informasi publik guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sesungguhnya yakni menjalankan prinsip-prinsip *E-Government* dalam peranannya menjalin hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Karena jika suatu media telah berhasil menjalin hubungan dengan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa upaya terwujudnya partisipasi masyarakat yang lebih luas atas pembangunan yang akan dan telah terjadi, baik itu kritik ataupun masukan atas dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat akan menemui babak baru dalam prosesnya, dan disinilah letak penilaian tingkat efisiensi digunakannya media tersebut, baik buruknya, dampaknya kepada masyarakat, atau justru mempersulit mekanisme pemerintahan dan hanya menjadi faktor pelengkap pemerintah berbasis teknologi semata, namun implemementasi dan tujuan tidak tepat sasaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang, penulis mencoba mengerucutkan persoalan agar lebih memudahkan obyek penelitian dan menghindari luasnya pembahasan yang dilakukan. Berkenaan dengan itu, penulis berupaya membatasi masalah yang diteliti, maka pokok yang dibahas sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Strategi Pemerintah Kab. Bone dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam Pengembangan Website Pemda?

2. Bagaimana Efektivitas pengelolaan Website Pemerintah Daerah dalam menjalin hubungan masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini, tujuan yang bersifat ilmiah maupun tujuan yang sifatnya praktis dimana meliputi:

1. Tujuan Penelitian

- 1). Untuk Mengetahui Strategi Pemerintah Kab. Bone dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam Pengembangan Website Pemda

- 2). Untuk mengetahui Efektivitas pengelolaan Website Pemerintah Daerah dalam menjalin hubungan masyarakat serta dalam pemenuhan tujuan dan target

2. Kegunaan akademis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat berfungsi sebagai sumbangan bagi perkembangan ilmu social pada umumnya dan ilmu administrasi pada khususnya dan menjadi bahan pengkajian konsep-konsep tentang berbagai aspek dalam upaya mewujudkan *E-Government* ditengah gencarnya era teknologi 4.0

3. Kegunaan praktis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi ajang komunikasi untuk masyarakat dan pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Bone dalam menjalankan dan mensosialisasikan program-program pembangunan daerah melalui penyediaan layanan informasi public yang lebih bermutu dan berkualitas, serta berdaya saing dalam mewujudkan era *E-Government* sehingga timbal balik

antara pemerintah dan masyarakat terjalin. Dan diharapkan, hasil penelitian ini, dapat menjadi rujukan penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *E-Government dan Good Governance*

Good Governance merupakan Pemerintahan yang baik antara lain, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Juga termasuk didalamnya objektif, adil, serta promosi terhadap aturan hukum. Pemerintahan yang baik menjamin bahwa prioritas politik, sosial dan ekonomi yang didasarkan dengan konsensus bisa didengar didalam pengambilan keputusan terhadap pengalokasian sumber daya pembangunan (didalam Srijanti 2007:230) yaitu mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dapat ditempuh dengan penerapan konsep *E-Government*. Hal ini merujuk pada salah satu fungsi *E-Government* yaitu *Government to Citizens* yang mana *E-Government* akan membuat interaksi antara masyarakat dengan pemerintah menjadi lebih mudah melalui kanal-kanal akses yang disediakan di dalam sistem tersebut. Sehingga hal tersebut dapat membuat masyarakat dapat secara langsung mengikuti atau bahkan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan ataupun kegiatan lain yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, pemerintah dapat menyediakan informasi pemerintahan, khususnya berkaitan dengan pengelolaan anggaran.

UNDP (*United Nation Development Program*) (dalam Indrajit 2002:2) mendefinisikan e-government secara sederhana, yaitu "*E-Government is the application of information and communication technology (ICT) by government agencies*". (*E-Government* merupakan aplikasi informasi dan juga komunikasi

(ICT) dari pemerintah).Selanjutnya, *Organization Economic of Community Development (OECD)* (dalam Budianti 2003:11) memberikan pengertian bahwa sistem ini merupakan penghantar jasa internet dan kegiatan dengan penggunaan internet lainnya seperti *econsulting*.*E-Government* merupakan kesamaan kegunaan dari teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan dengan fokus pada penghantaran layanan dan juga pemrosesan seluruh kegiatan pemerintah, dan yang terakhir *E-Government* merupakan kapasitas untuk mentransformasikan administrasi publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.Dari dua definisi yang dikemukakan oleh dua lembaga internasional diatas dapat kita lihat bahwa *e-government* memiliki kalimat kunci, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah.Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disini lebih ditekankan pada penggunaan internet dalam membangun sebuah sistem yang dapat membuka akses informasi kepada masyarakat luas serta memberikan kemudahan pemberian layanan publik kepada masyarakat.Sistem inilah yang kemudian dibangun oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai keperluan, khususnya yang berkaitan dengan layanan pemerintahan tanpa harus melalui mata rantai birokrasi yang lama dan berbelit-belit.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.101 tahun 2000 yang dimaksud dengan pemerintahan yang baik adalah “pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi,

pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektivitas, dan supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

E-Government sendiri didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi, informasi dan teknologi komunikasi, serta teknologi komunikasi yang berbasis web lain untuk meningkatkan dan/atau mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan Peran Website Pemerintah Kabupaten Bone dalam mendukung terwujudnya *E-Government*. Menurut Nirmaljeet Singh Kalsi, *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang baru untuk memfasilitasi proses-proses administrasi publik (Kalsi and Kiran 2012). Terdapat empat tingkatan pengembangan e-Government sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategis Nasional Pengembangan *E-Government* yaitu 1) Tahap persiapan yang meliputi pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah, serta sosialisasi situs informasi baik internal maupun untuk publik. 2) Tahap Pematangan yang meliputi pembuatan situs informasi publik yang interaktif dan antarmuka keterhubungan dengan lembaga lain. 3) Tahap Pemanfaatan yang meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan publik, dan pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain. 4) Tahap Pemanfaatan yang meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.

Di dalam konsep *E-Government*, dikenal pula 3 jenis klasifikasi, plus satu tambahan klasifikasi berdasarkan realitas kehidupan modern (Suaedi: 2010), di antaranya adalah: 1) *Government to Citizens (G-to-C)*. Tipe G-to-C merupakan

aplikasi *e-government* yang paling umum, di mana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama memperbaiki interaksi dengan masyarakat; 2) *Government to Business (G-to-B)*. Tipe G-to-B merupakan aplikasi *E-Government* yang digunakan untuk memperlancar perusahaan swasta dalam menjalankan roda perusahaannya serta menciptakan relasi dengan pemerintah secara baik dan efektif; 3) *Government to Governments (G-to-G)*. Merupakan aplikasi *e-government* yang digunakan antar pemerintah untuk memperlancar kerjasama dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, maupun mekanisme hubungan sosial dan budaya; 4) *Government to Employees (G-to-E)*. Merupakan aplikasi *e-government* yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri yang bekerja di sejumlah institusi pemerintahan sebagai pelayan masyarakat.

Dari sisi lain, menurut Arifin Asydhah, hal-hal penting dalam website pemerintah antara lain: 1) Lengkap, Akurat, dan Cepat. Informasi yang disajikan lebih lengkap, lebih akurat, dan cepat. Kelengkapan dan keakuratan informasi di website pemerintah lebih penting dibanding kecepatan update. Ini yang membuat berbeda dari media massa swasta. Dengan tiga hal ini, maka website pemerintah lebih dibutuhkan masyarakat, termasuk wartawan dari media massa yang mempublikasikan kembali informasi di medianya masing-masing. 2) Menu dan Navigasi. Menu konten yang disajikan harus didefinisikan dari awal pembuatan website. Apa saja menu yang strategis perlu dijadikan sub kanal di homepage. Penentuan menu sangat tergantung dari tujuan website tersebut dibuat. Apakah

lebih mengedepankan pelayanan masyarakat atau mengedepankan penyampaian informasi sebuah kebijakan, misalnya. Website yang baik adalah yang memiliki navigasi yang mudah dimengerti oleh pembacanya. Begitu pembaca masuk ke website tersebut, akan dengan mudah mengetahui ke bagian mana dia akan berselancar.

3) Konten dan Penyajian. Konten atau isu yang disajikan. Ini harus diperhitungkan, karena menyangkut target pembaca yang dituju dan terkait dengan kebutuhan SDM. Penyajian konten juga diperhatikan, apakah menyajikan konten itu dengan tulisan layaknya berita atau menyajikannya secara utuh, dan sebagainya.

4) Konvergensi. Di era saat ini, informasi tidak hanya disajikan lewat teks. Tapi juga melalui foto dan video. Apabila website pemerintah bisa menyajikan ketiga bentuk konten ini, maka itu lebih baik, harapan pembaca agar mengetahui permasalahan secara detil terwujud.

5) Pelayanan dan Interaksi. Di mana pun, lembaga pemerintah adalah lembaga pelayanan. Karena itu, di website pemerintah harus ada fasilitas pelayanan untuk masyarakat. Begitu juga dengan interaksi dengan pembaca/masyarakat. Website memungkinkan komunikasi yang terjalin dua arah. Bahkan, website pemerintah akan lebih strategis kalau bisa menjadikan interaksi dengan masyarakat lebih banyak.

6) Search. Tidak setiap orang akan terus datang ke website pemerintah tiap hari. Masyarakat akan datang ke website pemerintah bila perlu. Karena itu, fasilitas 'search' sangat penting. Pembaca akan dengan mudah mencari informasi dengan mengetikkan kata kunci di fasilitas pencarian.

7) Kecepatan Akses. Dukungan kecepatan akses untuk website pemerintah sangat penting. Arsitektur IT dalam pembangunan website pemerintah harus dibangun dari awal, termasuk dalam perencanaan penyediaan

server dan storage, hosting, dan lain-lain. 8) Mobile Platform. Website pemerintah akan lebih baik bila bisa diakses kapan pun dan di mana pun, dan menggunakan alat apa pun. Karena itu, website pemerintah harus pula dibuatkan platform mobile-nya, sehingga pembaca bisa mencari informasi melalui gadget berlayar kecil di mana pun. 9) Share Social Media. Karakter pembaca media online saat ini tidak hanya membaca, tapi juga melakukan aktivitas lain: berdiskusi maupun ikut menyebarkan informasi. Karena social media menjadi kekuatan yang luar biasa, terutama Indonesia, penyebaran informasi melalui media sosial akan lebih efektif (Asydhah 2013).

B. Hubungan Masyarakat (*Public Relations*)

Majelis *Public Relations* Dunia (*The First World Assembly of PR Association 1978*), menyebutkan bahwa PR sebagai seni dan ilmu sosial yang menganalisis tren, memprediksi dampaknya, mendampingi dan memberi nasihat pimpinan organisasi serta mengimplementasikan program-program guna melayani kepentingan organisasi dan publiknya. Dari definisi tersebut, terbentuk pemahaman bahwa PR merupakan perpaduan antara ilmu dan seni untuk mengelola dan memberikan pelayanan terbaik bagi publiknya (Syarifiddin, Suryanto, 2016 : 67).

Public Relations sebagai sebuah fungsi manajemen yang menjadi jembatan komunikasi antara organisasi dengan publiknya tentu mempunyai peranan dalam mengatasi hal-hal tersebut. Adanya pemberitaan negatif di media yang disebar luaskan kepada masyarakat luas, tentu menjadi sebuah perhatian besar yang harus

ditanggulani, mengingat citra organisasi sebagai taruhannya. Oleh karenanya, strategi untuk menjalin kedekatan dengan media menjadi sebuah langkah yang bisa dilakukan, untuk menciptakan publisitas yang bagus mengenai Pemerintah sendiri. Dengan adanya hubungan baik dengan media, maka isu-isu negatif yang sedang berkembang tentu dapat diminimalisir. Tidak hanya dengan media, namun juga dengan pihak-pihak eksternal lainnya hubungan baik (*good relationship*) tersebut dapat dikembangkan, baik itu pemerintah selaku memegang kebijakan tertinggi, organisasi/ perguruan tinggi lainnya, rekanan/mitra, maupun masyarakat. Dengan adanya hubungan baik tersebut, memungkinkan terciptanya kerjasama yang baik pula untuk mencapai tujuan dari organisasi pada khususnya, dan kepentingan dari publik eksternal terhadap organisasi sendiri pada umumnya. Peran profesi public relations semakin bias tanpa adanya spesialisasi profesi sehingga diharapkan seorang praktisi PR memahami perannya dengan baik, bukan hanya sekedar pelengkap kerja dan pekerjaan yang merangkap seorang sekretaris direksi. Konsep peranan petugas PR yang dikembangkan oleh Broom, kemudian dikembangkan oleh Broom dan Smith (Dozier, 1992), di mana peran PR merupakan salah satu kunci penting untuk pemahaman fungsi PR dan komunikasi organisasi. Ada beberapa fungsi dominan yang harus dilaksanakan seorang PR sejati antara lain berperan sebagai:

a. *Technician communication*. Kebanyakan praktisi masuk ke bidang ini sebagai teknisi komunikasi. Deskripsi kerja dalam lowongan pekerjaan biasanya menyebutkan keahlian komunikasi dan jurnalistik, sebagai syarat. Teknisi komunikasi disewa untuk menulis dan mengedit newsletter karyawan, menulis

news release dan feature, mengembangkan isi web, dan menangani kontak media. Praktisi yang melakukan peran ini biasanya tidak hadir disaat manajemen mendefinisikan problem dan memilih solusi. Mereka baru bergabung untuk melakukan komunikasi dan mengimplementasikan program, terkadang tanpa mengetahui secara menyeluruh motivasi atau tujuan yang diharapkan. Meskipun mereka tidak hadir saat diskusi tentang kebijakan baru atau keputusan manajemen baru, merekalah yang diberi tugas untuk menjelaskannya kepada karyawan dan pers.

b. *Expert Prescriber communication*. Ketika para praktisi mengambil peran sebagai pakar/ahli, orang lain akan menganggap mereka sebagai otoritas dalam persoalan PR dan solusinya. Manajemen puncak menyerahkan PR di tangan para ahli dan manajemen biasanya mengambil peran pasif saja. Praktisi yang beroperasi sebagai praktisi pakar bertugas mendefinisikan problem, mengembangkan program, dan bertanggung jawab penuh atas implemetasinya.

c. *Communication facilitator*. Peran fasilitator komunikasi bagi seorang praktisi adalah sebagai pendengar yang peka dan broker (perantara) komunikasi. Fasilitator komunikasi bertindak sebagai perantara (liason), interpreter, dan mediator antara organisasi dan publiknya. Mereka menjaga komunikasi dua arah dan memfasilitasi percakapan dengan menyingkirkan rintangan dalam hubungan dan menjaga agar saluran komunikasi tetap terbuka. Tujuannya adalah memberi informasi yang dibutuhkan baik itu manajemen maupun publik untuk membuat keputusan demi kepentingan bersama. Praktisi yang berperan sebagai fasilitator komunikasi ini bertindak sebagai sumber informasi dan agen kontak resmi antara

organisasi dan publik. Mereka menengahi interaksi, menyusun agenda mendiagnosis dan memperbaiki kondisi-kondisi yang mengganggu hubungan komunikasi di antara kedua belah pihak. Fasilitator komunikasi menempati peran di tengah-tengah dan berfungsi sebagai penghubung antara organisasi dan publik.

d. Fasilitator Pemecah Masalah Ketika praktisi melakukan peran ini, mereka berkolaborasi dengan manajer lain untuk mendefinisikan dan memecahkan masalah. Mereka menjadi bagian dari tim perencanaan strategies. Kolaborasi dan musyawarah dimulai dengan persoalan pertama dan kemudian sampai ke evaluasi program final. Praktisi pemecah masalah membantu manajer lain untuk dan organisasi untuk mengaplikasikan PR dalam proses manajemen bertahap yang juga dipakai untuk memecahkan problem organisasional lainnya. Komunikasi dengan Stakeholders Stakeholders eksternal juga merupakan pihak yang mempunyai keterkaitan langsung dengan organisasi. Oleh karenanya menjalin komunikasi yang baik dengan mereka adalah sebuah keharusan. Setiap organisasi hendaknya mempunyai strategi khusus, guna menjalin komunikasi dengan para *stakeholders* eksternal tersebut. Dalam penelitian ini, *stakeholders* eksternal tersebut adalah pemerintah dan komunitas.

e. Hubungan dengan pemerintah. Di dalam suatu negara, pemerintah mempunyai peranan penting terutama dalam kaitannya dengan masalah regulasi. Oleh karenanya organisasi mulai menyadari bahwa daripada memerangi regulasi, sebuah pendekatan yang lebih efektif adalah membela posisi-posisi mereka kepada para pembuat keputusan. Organisasi mulai melindungi kepentingan mereka dengan taktik-taktik lobi dan negosiasi yang dikemas dengan baik,

terutama ketika menghadapi oposisi yang substansial dari kelompok konsumen maupun komunitas (Argenti, 2010: 271). Strategi Humas dalam Menjalin Good Relationship Dari hal di atas, menyiratkan betapa pentingnya organisasi untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah. Setiap organisasi hendaknya menggunakan berbagai taktik untuk melakukan pendekatan dengan pemerintah. Tidak hanya dengan kemampuan lobi dan negosiasi semata, namun juga agar program, yang dibuat oleh organisasi mampu mendapatkan dukungan dari pemerintah. Adapun bentuk-bentuk yang dapat dilakukan dalam kaitannya dengan membina hubungan baik dengan pemerintah, misalnya saja: mengirimkan surat ucapan selamat bila instansi yang bersangkutan berulang tahun, mengirimkan kalender atau agenda, mengadakan olah raga bersama, dan lainnya (Effendy, 2011:137). Menurut Argenti (2010: 275-279), ada beberapa aktivitas spesifik yang digunakan organisasi untuk meningkatkan posisi mereka dengan para legislatif, berikut diantaranya: 1. Pembangunan koalisi Dengan membangun koalisi dengan organisasi-organisasi lainnya ataupun dengan membentuk asosiasi organisasi sejenis, maka kekuatan organisasi untuk memberikan tekanan kepada pemerintah dapat lebih kuat. Selain itu juga akan ada kesempatan yang baik untuk mempengaruhi hasil-hasil legislatif dibanding bertindak sendirian. 2. Keterlibatan pemimpin. di dalam hubungan pemerintah Pemimpin merupakan pucuk tertinggi dalam sebuah organisasi, pelibatan pemimpin dalam menjalin hubungan dengan pemerintah adalah sebuah keharusan. Dengan demikian, pemimpin akan mengenal orang-orang yang ada di dalam legislatif sehingga mempunyai kedekatan emosional guna meminta dukungan mereka terkait

pengembangan organisasi. 3. Melobi pada basis individu. Lobi merupakan sebuah aktivitas yang ditujukan sebagai promosi melalui sistem komunikasi yang terkoordinir dengan para pembuat kebijakan utama. Melakukan lobi dengan menggunakan individu merupakan sebuah metode paling tepat untuk dapat terlibat di dalam politik. 4. Komite aksi politik Metode lain yang dapat digunakan untuk menjalin kedekatan dengan pemerintah adalah dengan melalui komite aksi politik. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk komite-komite organisasi untuk melakukan aksi-aksi politik guna mempengaruhi kebijakan pemerintah.

f. Hubungan dengan komunitas. Hubungan komunitas atau yang biasa disebut dengan *Community Relations* merupakan strategi yang harus dijalankan oleh organisasi, yakni berkaitan dengan bagaimana membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar (komunitas). Hal ini merupakan sebuah timbal balik bagi organisasi untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat terkait keberadaannya di tengah-tengah lingkungan. Menurut Jerold dalam Iriantara (2004:20), *Community Relations* merupakan peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya untuk kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. Mutual understanding adalah kunci adanya keberhasilan dari organisasi dalam menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar. Di mana di dalamnya ada rasa saling memiliki, menghargai, serta berkesinambungan untuk memberikan kemanfaatan bersama. Menurut Cutlip dan Center, dalam melaksanakan hubungan yang baik dengan komunitas, diperlukan adanya suatu kesadaran bagi organisasi untuk dapat mengetahui apa yang menjadi dambaan komunitas bagi kesejahteraannya. Dalam hal ini, apa yang diharapkan

suatu organisasi sebagai salah satu sumbangan untuk kesejahteraannya itu, dan bagaimana menilai kontribusi tersebut. Berbagai hal yang menjadi kepentingan dari masyarakat komuniti tersebut, hendaknya dapat diperhatikan oleh organisasi, dimana kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan idealnya selalu mengacu pada kepentingan komunitas sekitarnya. Upaya organisasi untuk membantu komunitas dalam mengupayakan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhannya akan menumbuhkan suatu persepsi positif anggota komunitas terhadap organisasi (Effendy, 1999: 201).

Keberadaan PR di dalam organisasi sangat penting. Urusan kerja yang ditangani PR juga sangat fundamental, terkait nama baik dan perkembangan organisasi. oleh sebab itu, PR sudah selayaknya memahami fungsi dan tujuan kerja secara ideal. Ada beragam pandangan ahli mengenai fungsi PR dalam organisasi. Berdasarkan karakteristik kegiatan kehumasan tersebut, menurut pakar humas internasional, Cutlip & Centre, and Canfield (dalam Prayudi, 1982 : 35), fungsi humas dapat dirumuskan yaitu Pertama, Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama (fungsi melekat pada manajemen lembaga/organisasi). Kedua, Membina hubungan yang harmonis antara badan/organisasi dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran. Ketiga, Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap badan/organisasi yang diwakilinya atau sebaliknya. Keempat, Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama. Kelima adalah Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus

informasi, publikasi, serta pesan dari badan/organisasi ke publiknya atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak.

Dalam organisasi pemerintahan, Public Relations membantu kinerja pemerintah secara kompleks dan pluralistik dalam menjalankan fungsinya secara lebih baik dan efektif, dengan cara memahami sikap dan nilai yang berada di sekelilingnya. Sebagai fungsi manajemen yang berpengaruh dalam suatu organisasi, praktisi PR haruslah memiliki perencanaan yang mampu memikirkan, menganalisis, menafsirkan segala keadaan mengenai opini masyarakat dan isu-isu yang berkembang ditengah-tengah masyarakat mengenai kegiatan kerja pemerintah yang dilakukan. Senada dengan apa yang diutarakan oleh Tom Watson bahwa fungsi manajemen yang berarti itu adalah disengaja, tindakan yang direncanakan yang memiliki hasil dalam pikiran. Hal ini diperkuat dengan mengidentifikasi, membangun dan mempertahankan, yang menunjukkan penelitian dan rangkaian kegiatan (Watson, 2005 : 5).

Berbicara mengenai PR, juga harus membicarakan keterlibatan publik yang disasar, apakah publik internal maupun publik eksternal. Publik internal dan publik eksternal yang menjadi sasaran humas itu amatlah kompleks, dan manajemen suatu organisasi yang harus didukungnya sangat rumit sehingga, untuk menanganinya secara efektif dan efisien, humas harus melakukan kegiatan yang sistematis. Efektif berarti menimbulkan hasil yang sesuai dengan harapan, dan efisien mengandung makna tujuan dicapai secara optimal dengan biaya, waktu, dan personel yang minimal, sedangkan sistematis berarti penyusunan yang runtut secara seksama (Onong, 2006: 97).

C. Peran Pemerintah Daerah dalam menjalin Public Relations

Partisipasi dan Transparansi/Keterbukaan Informasi Publik

Diungkapkan oleh Thomas (dalam Hadiyanto, 2008: 81) bahwa komunikasi partisipatif berkaitan dengan akses terhadap pembangunan dan pendekatan hak asasi manusia dalam pembangunan yang berakar dari teori Paulo Freire (pendidik dari Brazil) di samping beberapa eksperimen tentang komunikasi alternatif yang muncul di akhir 60-an dan 70-an. Freire telah menolak dan mendekonstruksi paradigma komunikasi pembangunan yang bersifat vertikal, top-down, linier dan searah. Freire menegaskan bahwa secara individual atau pun bersama-sama menyuarakan kata-katanya adalah hak semua orang, bukan hanya untuk beberapa orang saja (Freire dalam Hadiyanto, 2008: 81). Partisipasi masyarakat dalam komunikasi sangat vital demi keberhasilan setiap proyek yang ada. Ia didasari usaha secara sadar (melalui proses penyadaran) untuk melibatkan masyarakat dalam membangun diri sendiri dan manajemen diri (Thomas & Survaes dalam Hadiyanto, 2008: 81).

Komunikasi partisipatif merupakan suatu proses komunikasi dimana terjadi komunikasi dua arah atau dialogis, sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang sama terhadap pesan yang disampaikan (Muljono dan Lumintang, 2011: 19). Rahim dalam (Muljono & Lumintang, 2011: 19) menjelaskan empat konsep yang berhubungan dengan komunikasi partisipatif, antara lain: Pertama Heteroglasia merupakan sebuah konsep yang menunjukkan fakta bahwa sistem pembangunan dilandasi oleh berbagai kelompok dan komunitas yang berbeda-beda dengan berbagai variasi ekonomi, sosial, dan faktor

budaya yang saling mengisi satu samalain. Kedua Dialog adalah komunikasi transaksional dengan pengirim (sender) dan penerima (receiver) pesan saling berinteraksi dalam suatu periode waktu tertentu hingga sampai pada makna-makna yang saling berbagi. Ketiga Poliponi adalah bentuk tertinggi dari suatu dialog dimana suara-suara yang tidak menyatu atau terpisah dan meningkat menjadi terbuka, memperjelas satu samalain dan tidak menutupi satu samalain. Keempat Karnaval, konsep ini bagi pembangunan membawa semua varian dan semua ritual seperti legenda, komik, festival, permainan, parodi dan hiburan secara bersama-sama.

Nilai penting dari komunikasi partisipatif dalam proses pembangunan tidak dapat diukur dari keterlibatan anggota secara fisik saja dalam pembangunan suatu proyek. Unsur komunikatif yang paling penting adalah lebih kepada proses dialog yang dilakukan mulai dari perencanaan sampai pada tahap evaluasi. Karena kegiatan komunikasi itu sendiri sebenarnya bukan kegiatan memberi dan menerima, melainkan “berbagi dan berdialog”. Dengan demikian daya kreatif dari anggota masyarakat melalui uraian ide dan gagasan membuat mereka menjadi pribadi yang aktif dalam proses pembangunan. Tujuan pokok dari komunikasi partisipatif adalah untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat pada semua tingkat pembangunan, dan juga untuk membantu mengidentifikasi dan menerapkan kebijakan (Anyaegbunam dalam Suryanintyas, 2012).

Partisipasi seluruh masyarakat dalam pembangunan tentu saja bertujuan supaya bisa mengatasi terjadinya konflik. Melalui proses komunikasi yang jelas dan efektif, maka program yang diagendakan pun semakin mudah untuk

direalisasikan. Schramm dalam Gumgum Gumilar merumuskan tugas pokok komunikasi dalam pembangunan antara lain: Pertama, menyampaikan kepada masyarakat informasi tentang pembangunan, agar mereka memusatkan perhatian pada kebutuhan akan perubahan, kesempatan dan cara mengadakan perubahan, sarana-sarana perubahan dan membangkitkan aspirasi. Kedua, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog agar melibatkan semua pihak yang membuat keputusan mengenai perubahan, memberi kesempatan kepada para pemimpin dan mendengarkan pendapat rakyat kecil, dan menciptakan arus informasi yang berjalan lancar dari bawah ke atas. Ketiga, mendidik tenaga kerja yang diperlukan dalam pembangunan.

Jika indikator partisipasi telah sangat jelas menggambarkan hasil dari sosialisasi, maka akan bergeser pada indicator transparansi dimana keduanya secara kodrat harus berjalan beriringan dalam kehidupan pemerintah. Menurut Piotrowsky dan Van Rizin (2007) (dalam Dwiyanto 2011:241) menjelaskan bahwa transparansi dalam pemerintahan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan apa yang terjadi didalam organisasi di sektor publik melalui pertemuan terbuka, pemberian akses terhadap dokumen, publikasi informasi melalui website secara aktif. Pada prinsipnya transparansi adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus melibatkan masyarakat dalam menjalankan fungsi controlling terhadap segala upaya atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip transparansi senantiasa akan dibarengi oleh prinsip keterbukaan informasi. Di Indonesia, keterbukaan informasi publik sejak tahun 2008 telah diatur ke dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008. Dalam pasal 1 undang-undang ini disebutkan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik. Sedang informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara negara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat atau bantuan luar negeri.

Sebagai mana yang telah tertuang didalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipasi yang telah disusun oleh *Departemen for Internasional (DFID)* ialah:

1. **Cakupan**, Wakil-wakil atau juga semua orang dari pihak kelompok yang terkena dampak dari hasil proses atau keputusan proyek pembangunan.
2. **Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership)**, Pada dasarnya seseorang memiliki kemampuan, keterampilan serta memiliki hak

untuk memakai kemampuannya tersebut yang terlibat dalam setiap proses untuk membangun dialog tanpa harus memperhitungkan struktur dan jangjang masing-masing pihak.

3. **Transparansi**, Semua pihak harus bisa menumbuhkan dan mengembangkan sebuah komunikasi dan cara berkomunikasi terbuka dan kondusif, sehingga dapat menimbulkan suatu dialog
4. **Kesetaraan kewenangan (Sharing Power/Equal Powership)**, Dalam pihak-pihak yang terlibat harus bisa menyeimbangkan kekuasaan dan distribusi kewenangan untuk dapat menghindari terjadinya dominasi.
5. **Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility)**, Berbagai pihak memiliki tanggung jawab yang jelas dalam sebuah proses sebab adanya kesetaraan keterlibatan dan kewenangan dalam proses mengambil sebuah keputusan dan langkah selanjutnya.
6. **Pemberdayaan (Empowerment)**, Keterlibatan semua pihak tidak dapat terlepas dari berbagai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki semua pihak, maka dalam melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi sebuah proses saling belajar dan saling berdayakan satu sama lainnya.
7. **Kerjasama**, Diperlukan kerjasama dengan semua pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan untuk dapat mengurangi

berbagai kelemahan yang ada, pada khususnya yang terkait dengan kemampuan sumber daya manusia.

Bolton dalam Retnowati (2012:55) mengatakan bahwa tujuan utama keterbukaan informasi publik di setiap Negara adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik. Dengan demikian, konsep keterbukaan informasi pada tiap lingkup Negara mulai diterapkan.

Keterbukaan Informasi merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai langkah mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka segala proses pengelolaan sumberdaya publik mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi (dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan maupun kebijakan-kebijakan, dan juga Peraturan Daerah), serta instrumen yang lainnya, yakni instrumen materiil (sarana prasarana), dan instrument kepegawaian (sumberdaya manusia) harus dilaksanakan secara transparan.

Krina (2003:13) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai.

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat dan kejelasan tentang peraturan, undang-undang dan keputusan pemerintah. Yang indikatornya menurut *Asian Development Bank* (dalam Krina, 2003: 19) adalah:

1. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu (*accurate and timely*) tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku swasta.
2. Aturan dan prosedur yang simple, *straight forward and easy to apply* untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi.

Sedangkan menurut Krina (2003: 17) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
2. Kemudahan akses informasi
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.
5. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu

Indikator transparansi lainnya dikemukakan oleh Mardiasmo dalam Wadu (2012:9) adalah:

1. Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
2. Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan asset daerah yang dapat diakses.
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
4. Tersedianya sarana untuk suara dan usulan rakyat.
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Secara garis besar indikator tersebut dapat dikategorikan menjadi: (1). *Accessibility or ease of use* adalah kemudahan dalam mengakses dan mengumpulkan informasi dari sebuah situs web. (2). *Feed Back Mechanism*. Sebuah situs web harus menyediakan kesempatan bagi penggunanya untuk memberikan respon (feed back). (3). *Update Information*. Informasi-informasi yang ditampilkan pada suatu situs web harus selalu update dengan kondisi yang sedang terjadi. (4). *Simplicity* yang dibahas adalah mengenai tata bahasa yang digunakan untuk menampilkan informasi pada situs web. (5). *Readibility*. Kemudahan informasi-informasi yang ditampilkan pada situs web untuk dibaca dan dipahami.

D. Strategi

Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien, perusahaan harus bisa menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Strategi dalam suatu dunia bisnis atau usaha sangatlah di butuhkan untuk pencapaian visi dan misi yang sudah di terapkan oleh perusahaan, maupun untuk pencapaian sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.

Menurut David (2011:18-19) Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi

geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Tjiptono (2006:3) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah – daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Menurut Pearce II dan Robinson (2008:2), strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan.

Dari definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengertian strategi adalah hal hal yang perusahaan ingin lakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam buku *Analisis SWOT Teknis Membedah Kasus Bisnis*, Rangkuti (2013:3-4) mengutip pendapat dari beberapa ahli mengenai strategi, di antaranya

1. Chandler: Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.

2. Learned, Christensen, Andrews, dan Guth: Strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak.
3. Argyris, Mintzberg, Steiner dan Miner: Strategi merupakan respons secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat memengaruhi organisasi.
4. Porter: Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing.

E. Efektivitas

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, waktu) telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai maka makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan tingkat keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan. Winarno Surachmad (1986) mengatakan bahwa efektivitas adalah keadaan yang menunjukkan sejauh mana apa yang direncanakan atau diinginkan dapat tercapai.

Menurut Soekamto (1987) efektivitas berasal dari kata *effectlessness* yang berarti turut sampai atau sejauh mana kelompok mencapai tujuan. Dalam komunikasi efektivitas dapat dipahami dengan tingkat kesamaan pemaknaan pesan antara komunikator (pihak yang memberi informasi) dan komunikan (pihak

yang menerima informasi). Semakin besar tingkat kesamaan pemaknaan pesan tersebut, maka semakin tinggi tingkat efektivitas dalam proses komunikasi.

Siagian (1997) mengemukakan bahwa efek adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar diterapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, waktu) yang telah dicapai oleh manajemen yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Untuk mengetahui tingkat dan efek sesuatu kegiatan biasanya dilakukan dengan membandingkan antara prestasi saat ini dengan prestasi yang diperoleh. Apabila semua sumber daya yang dimilikinya dikelola secara optimal dan objektif. Secara teknis pengertian efek merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Meilyna Diah Anggrahini / Christina Rochayanti / Edwi Arief Sosiawan	Peran Humas Pemerintah Kabupaten Sragen Dalam Pengelolaan Isi Informasi Website Pemda Sebagai Media Communications Relations Dengan Masyarakat	Untuk lebih menyadarkan masyarakat akan kemudahan penggunaan media online dibutuhkan partisipasi dari pemerintah untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga hubungan komunikasi yang di harapkan dapat tercipta yaitu hubungan komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat.
Hasymi Rinaldi Ade M. Yuardani	Analisis Peluang Transformasi " <i>E- Government</i> " menjadi	Dalam konteks transformasi <i>e- government</i> menjadi <i>e-</i>

	<p>"E-Democracy" melalui Website Resmi Pemerintah Daerah</p>	<p><i>democracy</i>, keberadaan website masih mengabaikan keberadaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Ruang dan wacana yang tersedia masih didominasi pemerintah daerah. Disamping kategori informasi dan data, dan komunikasi yang memiliki banyak kekurangan, sehingga dapat memperkecil keinginan berpartisipasi, pada website pun tidak terdapat ruang partisipasi.</p>
--	--	---

<p>Lilieki Budiastuti Wiratmo, Noor Irfan, dan Kuwatono</p>	<p>Website Pemerintah Daerah Sebagai Sarana Online Public Relations</p>	<p>Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan website menjadi masalah yang dihadapi beberapa pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena ada sebagian pemerintah daerah (Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Klaten) menempatkan pengelolaan website di bagian Humas Sekda sehingga kesulitan untuk mendapatkan tenaga yang berlatarbelakang pendidikan IT.</p>
---	---	---

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

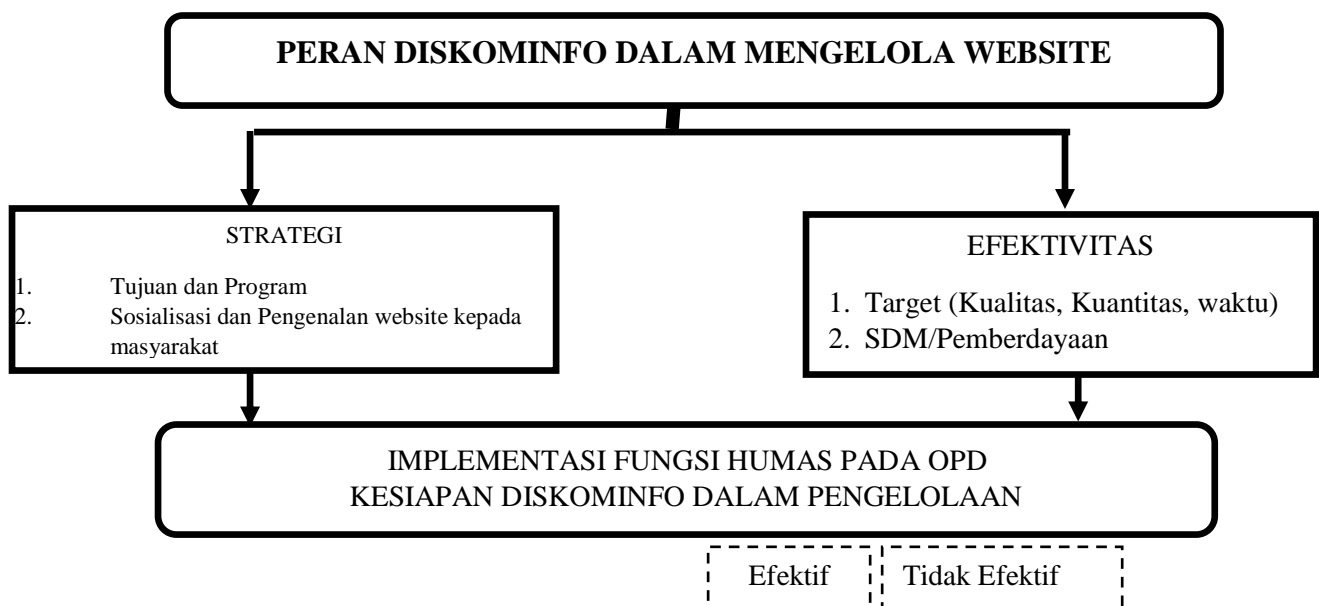
G. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana, kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika

untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran/ kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti, sehingga elemen pengeukurnya dapat dirinci secara kongkrit.

Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research*, 1992 dalam (Sugiyono, 2010 : 50) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berfikir (Sugiyono, 2010:60).

Adapun kerangka konseptual yang akan menjadi pondasi dari penelitian ini adalah Peran Pemerintah Daerah dalam Mengelolaa Website Pemda sebagai Sarana Publik Relations



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

- 1). Lokasi penelitian yaitu Kabupaten Bone, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang mengelola website milik pemerintah daerah. Alasan penulis memilih Kabupaten Bone sebagai lokasi penelitian karena dijamin sekarang pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan prinsip *E-Government*, dan salah satu prinsip *E-Government* adalah dengan menjalankan dan mengoperasikan website milik pemda sebagai bentuk komunikasi dan membangun hubungan sehingga partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dapat tercapai dalam proses pembangunan. Kabupaten Bone adalah daerah Sulawesi Selatan yang paling dipertimbangkan keberadaannya karena memiliki wilayah terluas dengan total 28 kecamatan dan penduduk terpadat setelah Makassar (menurut data Statistik 2018), olehnya itu dalam menjalin komunikasi dan partisipasi masyarakat dengan wilayah yang sangat luas membutuhkan peranan media lain (website pemda) dalam mesinergikan program pembangunan yang tidak hanya bisa dilakukan face to face (tatap muka) melalui musrenbang tetapi juga melalui prinsip *E-Government*.
- 2). Waktu Penelitian telah dilakukan pada bulan Desember 2019 hingga Januari 2020 selama 1 Bulan. Dimulai tanggal 15 Desember 2019 hingga 30 Januari 2020.

B. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah tipe kualitatif, yakni menggambarkan strategi pemerintah kabupaten/instansi terkait untuk membangun hubungan antara masyarakat dan pemerintah terhadap informasi yang disajikan serta mendeskripsikan mengenai tingkat efisiensi adanya website milik pemerintah daerah dalam mewujudkan prinsip *e-government*, dalam penelitian ini akan menggambarkan apakah dengan website pemerintah Kabupaten Bone telah tepat sasaran dan mampu menjadi jembatan dalam menjalin hubungan pemerintah dan masyarakat dengan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya atas sosialisasi program pembangunan, terlepas dari baik dan buruknya hasilnya, yang jelas bahwa media (website pemda) telah dapat menciptakan citra pembangunan daerah dan menghasilkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya sehingga transparansi/keterbukaan informasi publik sebagai salah satu indikator *good governance* telah tercapai.

C. Penentuan Target Informan

Informan Penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Burhan Bugin : 2007).

Maka untuk menggali Informasi yang akurat dan mendalam terkait dengan peran Website Pemerintah Daerah Kab. Bone, Maka Informan dalam Penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria yaitu merupakan pengambil kebijakan (*Policy maker*) dan pihak yang terkait (*stakeholder*). Dipilih berdasarkan *Purposive Sampling* dan *Snowball* yang akan disesuaikan dengan kondisi di Lapangan.

1. Representasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, dalam hal ini Dinas Informasi dan Komunikasi Kab. Bone dan Bagian Humas Kantor Bupati Bone.
2. Representasi dari Tokoh Masyarakat di Kab. Bone
3. Representasi dari kaum intelek/generasi millennial yang paham akan era digital dan pentingnya teknologi informasi.

D. Jenis dan Sumber data

Dalam Penelitian ini penulis akan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh secara langsung melalui narasumber atau informan melalui wawancara baik dari pemerintah Kab. Bone yang terkait sebagai objek yang menangani langsung website milik pemerintah dan berkontribusi dalam sosialisasi program pembangunan pemerintah melalui website milik pemda, maupun dari masyarakat Kab. Bone sebagai sasaran dalam menanggapi keberadaan website milik pemda yang akan mensosialisasi program pembangunan yang diharapkan ada umpan balik dari sosialisasi program tersebut.

Adapun Sumber data yang akan mendukung penelitian adalah:

1. Data Primer.

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variable minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koisioner di sebarakan memalui internet. Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk

file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya informan, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya (Uma sekaran, 2011). Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data (Sugiono: 2008: 402). Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku dan literatur.

E. Deskripsi Fokus dan Indikator

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran tentang penjabaran dan perwujudan E-Government dalam hal penggunaan website atas nama Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya belum mampu mendorong upaya partisipasi publik seluas-luasnya. Hal ini membuktikan bahwa website Pemerintah Daerah dalam pengelolaannya masih membutuhkan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan eksistensinya di tengah maraknya persaingan media online terkait pemberitaan, karena dibandingkan dengan media media lokal yang juga memberitakan program pembangunan, tetap akan lebih terpercaya dari segi

informasi, data dan keabsahan informasi itu sendiri jika diakses melalui website milik Pemerintah Daerah. Tujuan adanya website milik Pemda adalah dapat menjalin hubungan dengan masyarakat, menciptakan citra pemerintah dalam usaha pembangunan Daerah, dan mencapai partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam memberikan masukan serta kritik mengenai pembangunan melalui website milik Pemda, dengan ini upaya dalam transparansi dan keterbukaan informasi publik telah tepat sasaran.

Deskripsi di atas merangkum 2 (dua) yang menjadi fokus dalam Penelitian ini, yaitu

1. Strategi

Menurut Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan Olehnya itu, dari pengertian diatas, maka dirangkum indikator penentu dalam pelaksanaan strategi, yaitu:

- 1). Tujuan dan Program
- 2). Sosialisasi dan Pengenalan website kepada masyarakat

3. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target

yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri (Sedarmayanti, 2006:61).

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (2008:14) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan" . Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan dengan mempertimbangkan kualitas, kuantitas, dan waktu. Adapun indikator untuk dapat melihat keefektivan suatu program dijalankan yaitu:

- 1). Target (Kualitas, Kuantitas, Waktu)
- 2). SDM/Pemberdayaan

F. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2012:63) menyatakan bahwa secara umum terdapat 4 macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data

yaitu dengan menggabungkan 3 teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi).

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian, yang dalam hal ini pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bone dan masyarakat (Stakeholder), dengan tujuan untuk melakukan pengamatan. Pengamatan atau observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis permasalahan yang diselidiki (sugiyono:2017:226).

2. Wawancara

Wawancara atau yang biasa yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden untuk memastikan kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Sehingga didapatkan penjelasan secara langsung dan lebih akurat mengenai penelitian ini. Teknik wawancara yang dilakukan peneliti adalah dengan mengajukan Tanya jawab secara langsung kepada informan yang berdasarkan pada tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan mencatat berdasarkan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Teknik ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Menurut sugioyono (2012: 82-83) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau

karya-karya monumental dari seseorang. Dengan demikian, dokumentasi yang dimaksudkan penulis dalam hal ini adalah peninggalan tertulis dan mengambil gambar atau foto-foto dan hukum-hukum yang termasuk dalam masalah penelitian.

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti peneliti sesuai (relevan) dengan data yang sesungguhnya ada dan memang benar-benar terjadi hal ini dilakukan peneliti untuk memelihara dan menjamin bahwa data tersebut benar, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian.

Untuk memperoleh tingkat keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi yaitu mengadakan perbandingan antara sumber data yang satu dengan yang lain. Sebagaimana yang dikemukakan Moleong, bahwa “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut”.

Teknik triangulasi menurut Moleong, teknik yang digunakan dalam penelitian ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Ia juga mengatakan bahwa triangulasi dengan sumber berarti membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda. Menurut Patton yang dikutip Moleong tentang hal di atas dapat dicapai dengan jalan :

4. Membandingkan apa yang dikatakan dengan kenyataan yang dilakukan. Dengan cara melihat langsung dan memastikannya dengan sumber data yang lain.
5. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya.
6. Membandingkan isi hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang berkaitan. Dengan cara mengumpulkan kedua hasil data tersebut lalu mengecek kembali kebenarannya dan disesuaikan seperti kenyataannya.

H. Teknik Analisis data

Menurut sugiyono (2012: 89) analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles dan Huberman (Sugiyono,2012: 246) mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisis data, yaitu reduksi data, displaydata, dan verifikasi data.

1. Reduksi data

Menurut sugiyono (2012:92) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal penting, dicari

tema dan polanya. Sehingga data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila di perlukan.

2. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya dalam analisis data ini adalah display data atau penyajian data. Miles dan Huberman (Sugiyono 2012:95) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.

3. Verifikasi data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Apabila kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan berjarak sekitar 174 km dari kota Makassar. Luas wilayahnya sekitar 4.559 km² atau 9,78 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone mempunyai garis pantai sepanjang 138 km. Wilayah yang besar ini terbagi menjadi 27 kecamatan dan 372 desa/kelurahan. Ibukota Kabupaten Bone adalah Watampone.

Sejarah mencatat bahwa Bone dahulu merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara pada masa lalu. Kerajaan Bone dalam catatan sejarah didirikan oleh Raja Bone ke-1 yaitu Manurunge ri Matajang pada tahun 1330 Masehi, mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan La Tenritatta Arung Palakka pertengahan abad ke-17. Kebesaran kerajaan Bone tersebut dapat memberi pelajaran dan hikmah yang bagi masyarakat Bone saat ini dalam rangka menjawab dinamika pembangunan dan perubahan-perubahan sosial, perubahan ekonomi, pergeseran budaya serta dalam menghadapi kecenderungan yang bersifat global.

Belajar dan mengambil hikmah dari sejarah kerajaan Bone pada masa lalu minimal terdapat tiga hal yang bersifat mendasar untuk diaktualisasikan dan dihidupkan kembali karena memiliki persesuaian dengan kebutuhan masyarakat Bone dalam upaya menata kehidupan ke arah yang lebih baik. Ketiga hal yang dimaksud adalah :

Pertama, pelajaran dan hikmah dalam bidang politik dan tata pemerintahan. Dalam hubungannya dengan bidang ini, sistem kerajaan Bone pada masa lalu sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat atau dalam terminologi politik modern dikenal dengan istilah demokrasi. Ini dibuktikan dengan penerapan representasi kepentingan rakyat melalui lembaga perwakilan mereka di dalam dewan adat yang disebut “**Ade Pitue**”, yaitu tujuh orang pejabat adat yang bertindak sebagai penasihat raja. Segala sesuatu yang terjadi dalam kerajaan dimusyawarahkan oleh Ade’ Pitue dan hasil keputusan musyawarah disampaikan kepada raja untuk dilaksanakan.

Ade Pitu merupakan lembaga pembantu utama pemerintahan Kerajaan Bone yang bertugas mengawasi dan membantu pemerintahan kerajaan Bone yang terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu :

1. **Arung ujung**, bertugas Mengepalai Urusan Penerangan Kerajaan Bone
2. **Arung ponceng**, bertugas Mengepalai Urusan Kepolisian/Kejaksaan dan Pemerintahan
3. **Arung ta**, Bertugas Bertugas Mengepalai Urusan Pendidikan dan Urusan Perkara Sipil
4. **Arung tibojong**, Bertugas Mengepalai Urusan Perkara / Pengadilan Landschap/ Hadat Besar dan Mengawasi Urusan Perkara Pengadilan Distrik.
5. **Arung tanete riattang**, Bertugas Mengepalai Memegang Kas Kerajaan, Mengatur Pajak dan Mengawasi Keuangan

6. **Arung tanete riawang**, Bertugas Mengepalai Pekerjaan Negeri (Landschap Werken – LW) Pajak Jalan Pengawas Opzichter.
7. **Arung macege**, Bertugas Mengepalai Pemerintahan Umum Dan Perekonomian.

Selain itu di dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat mengedepankan asas kemanusiaan dan musyawarah. Prinsip ini berasal dari pesan Kajaolaliddong seorang cerdik cendikia Bone yang hidup pada tahun 1507-1586 pada masa pemerintahan Raja Bone ke-7 Latenri Rawe Bongkangnge. Kajao laliddong berpesan kepada Raja bahwa terdapat empat faktor yang membesarkan kerajaan yaitu:

1. Seuwani, Temmatinroi matanna Arung Mangkau'E mitai munrinna gau'e (Mata Raja tak terpejam memikirkan akibat segala perbuatan).
2. Maduanna, Maccapi Arung Mangkau'E duppai ada' (Raja harus pintar menjawab kata-kata).
3. Matellunna, Maccapi Arung MangkauE mpinru ada' (Raja harus pintar membuat kata-kata atau jawaban).
4. Maeppa'na, Tettakalupai surona mpawa ada tongeng (Duta tidak lupa menyampaikan kata-kata yang benar).

Pesan Kajaolaliddong ini antara lain dapat diinterpretasikan ke dalam pemaknaan yang mendalam bagi seorang raja betapa pentingnya perasaan, pikiran dan kehendak rakyat dipahami dan disikapi.

Kedua, yang menjadi pelajaran dan hikmah dari sejarah Bone terletak pada pandangan yang meletakkan kerjasama dengan daerah lain, dan pendekatan diplomasi sebagai bagian penting dari usaha membangun negeri agar menjadi lebih baik. Urgensi terhadap pandangan seperti itu tampak jelas ketika kita menelusuri puncak-puncak kejayaan Bone dimasa lalu. Dan sebagai bentuk monumental dari pandangan ini di kenal dalam sejarah akan perjanjian dan ikrar bersama kerajaan Bone, Wajo, dan Soppeng yang melahirkan TELLUMPOCCOE atau dengan sebutan lain “LAMUMPATUE RI TIMURUNG” yang dimaksudkan sebagai upaya mempererat tali persaudaraan ketiga kerajaan untuk memperkuat posisi kerajaan dalam menghadapi tantangan dari luar.

Ketiga, warisan budaya kaya dengan pesan. Pesan kemanusiaan yang mencerminkan kecerdasan manusia Bone pada masa lalu. Banyak hikmah yang bisa dipetik dalam menghadapi kehidupan, dalam menjawab tantangan pembangunan dan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang semakin cepat. Namun yang terpenting adalah bahwa semangat religiusitas orang Bone dapat menjawab perkembangan zaman dengan segala bentuk perubahan dan dinamikanya.

Dalam perkembangan selanjutnya, Bone kemudian berkembang terus dan pada akhirnya menjadi suatu daerah yang memiliki wilayah yang luas, dan dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, berkedudukan sebagai Daerah yang merupakan bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Bone memiliki potensi besar, yang dapat dimanfaatkan bagi

pembangunan demi kemakmuran rakyat. Potensi itu cukup beragam seperti dalam bidang pertanian, perkebunan, kelautan, pariwisata, dan potensi lainnya.

Demikian masyarakatnya dengan berbagai latar belakang pengalaman dan pendidikan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendorong pelaksanaan pembangunan Bone itu sendiri. Walaupun Bone memiliki warisan sejarah dan budaya yang cukup memadai, potensi sumber daya alam serta dukungan SDM, namun patut digaris bawahi jika saat ini dan untuk perkembangan ke depan Bone akan berhadapan dengan berbagai perubahan dan tantangan pembangunan yang cukup berat. Oleh karena itu diperlukan pemikiran, gagasan, dan perencanaan yang tepat dalam mengorganisir warisan sejarah, kekayaan budaya, dan potensi yang dimiliki ke dalam suatu pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Dengan berpegang motto SUMANGE' TEALLARA', yakni Teguh dalam Keyakinan Kukuh dalam Kebersamaan, dengan Lagu Daerah ONGKONA BONE. Pemerintah dan masyarakat Bone akan mampu menghadapi segala tantangan menuju Bone yang lebih baik. (Sumber : www.bone.go.id)

VISI MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA

Adapun penjelasan Visi tersebut, yaitu:

MANDIRI: kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.

BERDAYA SAING: mengandung makna terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan

kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

SEJAHTERA: mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktrur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
4. Mengotimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

PROGRAM UNGGULAN

MANDIRI

1. Program peningkatan pemerataan dan kualitas derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan
2. Program peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga medis dan paramedis
3. Penerapan inovasi dibidang kesehatan berbasis kearifan lokal
4. Program peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik
5. Penerapan inovasi dibidang pendidikan berbasis kearifan lokal
6. Program pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan anak serta masyarakat penyandang disabilitas
7. Program pengentasan kemiskinan by name by address

BERDAYA SAING

1. Program penerapan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan Pembangunan dan Pemanfaatan Pusat Layanan Keselamatan Terpadu (Savety Center)
2. Program pewilayahan komoditas unggulan sumber daya alam berbasis desa/kelurahan
3. Program Menjadikan Bone sebagai Pusat Kebudayaan Bugis di Indonesia

4. Program pengembangan infrastruktur wilayah kecamatan luar kota (membangun desa menata kota)
5. Program layanan data terpusat untuk pengembangan potensi dan kemudahan peluang investasi (Potential Region Dashboard)
6. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam

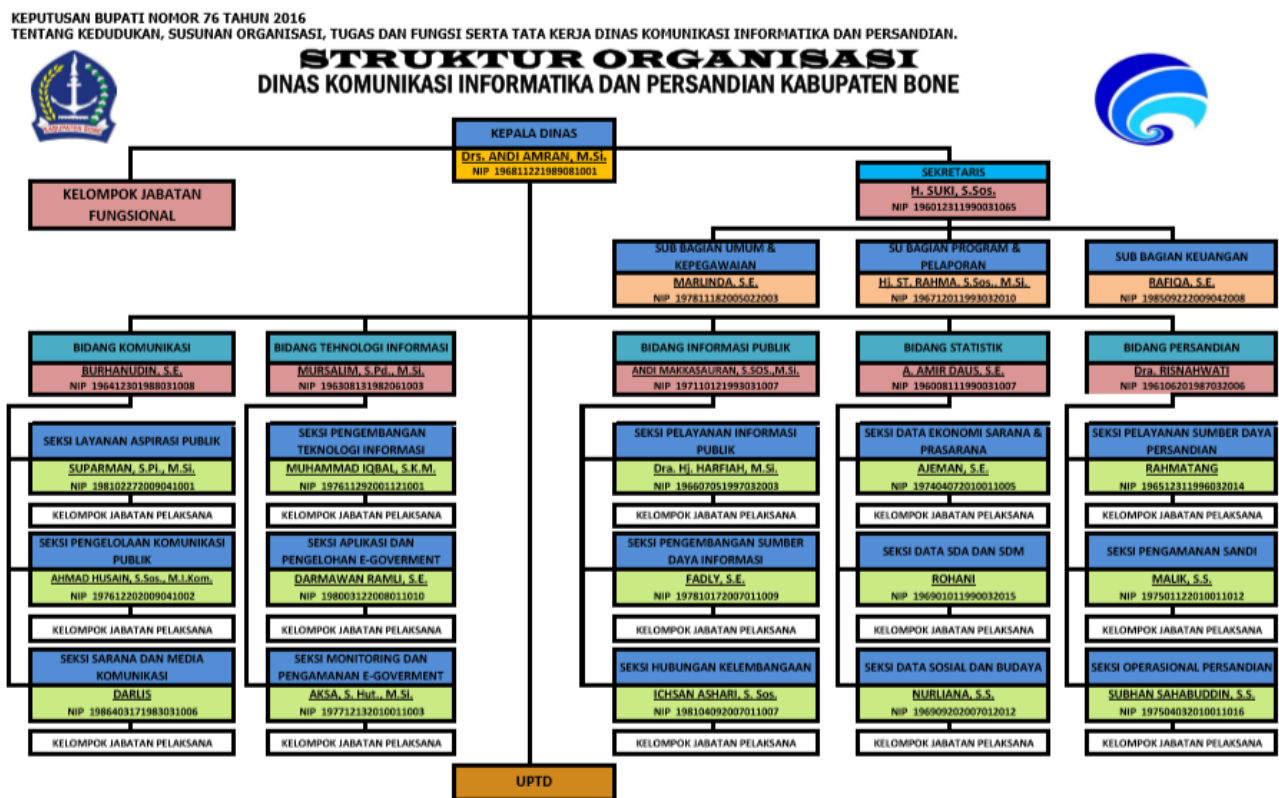
SEJAHTERA

1. Penguatan jaringan ekonomi desa dengan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa
2. Pembangunan pusat ekonomi kawasan kecamatan dan peningkatan bantuan modal usaha bagi industri dan UKMK.
3. Program pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
4. Program pengembangan kehidupan beragama dan pemberian insentif Imam Mesjid dan Guru Mengaji.
5. Ekstensifikasi dan intensifikasi pemanfaatan lahan pertanian serta pemanfaatan teknologi dalam peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
6. Program pelatihan calon tenaga kerja berbasis desa/kelurahan serta fasilitasi penempatan dan pembinaan tenaga kerja
7. Program bantuan hukum untuk masyarakat miskin

(Sumber: www.bone.go.id)

Bone yang kini menuju Kabupaten yang berdaya saing dengan masyarakat yang “Mabessa” kini mulai ditunjukkan melalui penerapan *E-Government* serta mengaktifkan website atas nama Pemda yang dapat diakses melalui *bone.go.id*. Hal ini ditunjukkan dengan sambutan Bupati Bone yang di umumkan pada 28 Agustus 2018 lalu kepada public dan pengguna internet khususnya di Kab. Bone bahwa telah berjalan Website Pemda dalam memudahkan Masyarakat untuk mengakses informasi seputar pembangunan Kabupaten Bone.

Berangkat dari hal tersebut, Kabupaten Bone dalam pengembangan Organisasi Pemerintah Daerah pada tahun 2016 mengeluarkan Surat Keputusan nomor 76 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Bone. Hal ini menandakan bahwa pembentukan lembaga dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Bone baru dimulai sejak 2016 hingga sekarang.



Gambar 4.1(sumber : www.kominfo.bone.go.id)

Dalam Struktur Organisasi, terdapat Bidang Teknologi Informasi yang menangani dan mengelola langsung Website Pemda serta merancang pengembangannya dimana tugas dan fungsinya diatur dalam Keputusan Bupati

Bone Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kominfo Dan Persandian sebagai berikut ;

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian terdiri dari:

- a. kepala dinas
- b. sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang komunikasi terdiri dari:
 1. Seksi Layanan Aspirasi Publik;
 2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik; dan
 3. Seksi Sarana dan Media Komunikasi
- d. Bidang Teknologi Informasi terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Teknologi Informasi;
 2. Seksi Aplikasi dan Pengolahan E-Government ; dan
 3. Seksi Monitoring dan Pengamanan E- Government.
- e. Bidang Informasi terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Informasi Publik;
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Informasi ; dan
 3. Seksi Hubungan Kelembagaan.
- f. Bidang Statistik terdiri dari:
 1. Seksi Data Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia;
 2. Seksi Data Ekonomi Sarana dan Prasarana; dan
 3. Seksi Data Sosial dan Budaya.
- g. Bidang Persandian terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Persandian;
 2. Seksi Pengamanan Persandian; dan
 3. Seksi Operasional Persandian.
- h. UPTD
- i. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu, Dinas

Pasal 4

(1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

(2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat Dinas

Pasal 5

(1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh sekretaris dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.

(2) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- b. pelaksanaan program dan anggaran;
- c. pengoordinasian tugas-tugas pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- d. penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundangundangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada kepala dinas;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

- h. pelaksanaan pembinaan ASN di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman suratmenyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
- c. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;

Bagian Ketiga Bidang Komunikasi

Pasal 9

(1) Bidang Komunikasi mempunyai tugas, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,

(2) Bidang Komunikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan strategi perencanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi;
- d. pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi;
- e. pelaksanaan penertiban dokumen pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi;
- f. pendokumentasian hasil pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi;
- g. pengendalian dan gevaluasi pengelolaan opini dan aspirasi publik serta pengelolaan dan pelayanan informasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 10 Seksi Layanan Aspirasi Publik

Dipimpin oleh kepala Seksi Layanan Aspirasi Publik yang mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media;

- b. menyelenggarakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat) ; bidang pengelolaan opini dan aspirasi melaksanakan pengolahan aduan masyarakat;
- d. mengelola media saluran aspirasi publik melalui media sosial dan program konten aduan pada radio pemerintah Suara Bone Beradat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang komunikasi terkait bidang tugasnya.

Pasal 11 Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik

Dipimpin oleh kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik yang mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- b. melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas lingkup nasional dan daerah;
- c. mengelola penyiaran radio Pemerintah Daerah Suara Bone Beradat;
- d. menyelenggarakan Layanan Pengaduan Masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang komunikasi terkait bidang tugasnya.

Pasal 12 Seksi Sarana dan Media Komunikasi

Dipimpin oleh kepala Seksi Sarana dan Media Komunikasi yang mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah,
- b. melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal,
- c. melaksanakan pembuatan konten lokal

Bagian Keempat Bidang Teknologi Informasi

Pasal 13

(1) Bidang Teknologi Informasi dipimpin oleh kepala Bidang Teknologi Informasi yang mempunyai tugas membantu kepala dinas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi informasi dan pengolahan data elektronik.

(2) Bidang Tehnologi Informasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan strategi perencanaan dibidang teknologi informasi dan pengolahan data elektronik;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang kemitraan media (media Relation) dan pengembangan sumber daya komunikasi publik, teknologi informasi dan akses informasi;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dibidang teknologi informasi dan pengolahan data elektronik;

- d. pelaksanaan pengelolaan dibidang teknologi informasi dan pengolahan data elektronik;
- e. pelaksanaan penertiban dokumen dibidang teknologi informasi dan pengolahan data elektronik;
- f. pelaksanaan pendokumentasian hasil dibidang teknologi informasi dan pengolahan data elektronik;
- g. pengendalian dan evaluasi dibidang teknologi informasi dan pengolahan data elektronik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Pengembangan Teknologi Informasi dipimpin oleh kepala Seksi Pengembangan Teknologi Informasi yang mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC);
- b. menyelenggarakan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government;
- c. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing;
- d. melaksanakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan public;
- e. menyelenggarakan layanan filtering konten negatif;
- f. menyelenggarakan Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
- g. menyelenggarakan pengelolaan website pemerintah Kabupaten Bone www.bone.go.id dan website Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian;
- h. melaksanakan monitoring dan pendataan stasiun menara telekomunikasi serta membangun hubungan komunikasi dan koordinasi dengan pihak yang terkait dengan penyedia layanan telekomunikasi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang teknologi informasi terkait bidang tugasnya.



Gambar 4.2 Tampak depan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Bone terbentuk pada 2013 yang secara resmi mengambil alih peranan dalam mengelola website Pemda yang kala itu belum merujuk pada *www.bone.go.id*. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati No. 76 tahun 2016 berkewajiban dan merupakan kebutuhan bagi Diskominfo untuk menyusun perencanaan kinerjanya setiap tahun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dimana Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bone merupakan unsur pelaksana Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta bertanggung jawab dalam mengelola data, pengembangan komunikasi, informasi, statistic dan persandian yang kemudian direalisasikan dalam pembagian tupoksi sub bagian pada struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Bone.

B. Identitas Informan

Dalam proses pengumpulan data, terdapat beberapa informan yang peneliti yakini sebagai pihak yang bisa memberikan data menyangkut fokus dari penelitian tersebut yang diperoleh melalui teknik *purposive* dan teknik *snowball sampling*. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa terdapat beberapa representasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pihak pemerintah oleh dinas kominfo, Tokoh Masyarakat, dan juga masyarakat yang direpresentasikan oleh beberapa mahasiswa lokal. Maka untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh khususnya dari pihak informan, maka berikut adalah informasi mengenai informan :

1). Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone

Informan yang bersedia melakukan wawancara pada kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone berjumlah 5 orang di antaranya adalah Kepala Bidang Teknologi Informasi, Kepala Seksi Pelayanan informasi public, Penanggung jawab KIM (Kelompok Informasi Masyarakat), Kepala Bidang Keuangan, dan Kepala Seksi Data dan SDM. Namun, saat peneliti meminta biodata lengkap informan, yang bersangkutan menolak dan keberatan memberikan informasi terkait informan yang dianggap pribadi dan personal. Maka dari itu, untuk menghargai *privasi* informan, peneliti berusaha merangkum biodata informan dengan mendeskripsikan pekerjaan informasi yang berkaitan dengan keperluan penelitian sebagai berikut.

- a. Mursalim S.Sos (50 tahun) diangkat Kepala Bidang pada tahun 2016-2020 dan bertanggung jawab pada divisi teknologi informasi yang

menangani seputar pengembangan teknologi dan penyajian informasi pada website. Selain itu, beliau sempat bercerita dengan mengisi waktu luangnya mengelola akun youtube bernama “teluk bone” yang beliau akui perkembangan teknologi saat ini dapat memberikan pundi pundi penghasilan tambahan bagi kesehariannya.

b. Dra. Hj. Arfiah (43 tahun), merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Seksi yang di angkat pada 2015 silam telah 4 tahun menggeluti dunia pelayanan informasi public yang juga merangkap sebagai penanggung jawab PPID (pejabat pengelola informasi public) yang terbentuk di berbagai kecamatan di Kabupaten Bone. Oleh karena itu, dalam pembentukan PPID di berbagai Kecamatan tak lepas dari andil dan wewenangnya.

c. Fadli, S.E (40 tahun) merupakan penanggung jawab KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) yang dalam memenuhi beban kerja, beliau harus aktif dalam mengawasi Kelompok ini, karena dalam penyampaian laporan informasi dari berbagai kelompok di masyarakat harus melalui bidang kerja ini dan dalam pembentukan KIM ini tak lepas dari tugas dan tanggung jawab beliau yang harus senantiasa ada dalam segala keadaan yang dibutuhkan masyarakat.

d. Rafiqa, S.E (30 tahun) merupakan Kepala Seksi bidang Keuangan yang merangkum segala kebutuhan dan alokasi dana pengeluaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.

e. Hj. St. Rahma, S.H, M.H, merupakan kepala seksi data dan SDM yang pada saat di wawancara menyatakan baru terangkat sebagai kepala seksi data dan SDM pada mutasi terakhir 2020, oleh karena itu, beliau masih terbilang baru dalam mengolah data dengan bidang keilmuannya yang berbeda. Sehingga pada saat di wawancara untuk teknis pekerjaan data diserahkan kepada stafnya untuk memberikan informasi kepada peneliti terkait data yang diperlukan. Namun ketika peneliti menawarkan agar informan yang dimasukkan namanya adalah staf yang diwawancarai, yang bersangkutan menolak.

2). Sekretariat Daerah bagian Hubungan Masyarakat (Humas dan Protokoleran Kabupaten Bone)

a. Barham, S.T (40 tahun) adalah Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Bone yang sebelum menduduki jabatan sebagai kabag humas, beliau menjabat sebagai ketua DKB (dewan kesenian bone) yang menangani hari hari besar, acara adat dan pesta rakyat lainnya di Kabupaten Bone. Setelah sebelumnya berkiprah di Mamuju yang juga aktif mendampingi Bupati Mamuju kala itu dalam melaksanakan hari hari besar Kabupaten Mamuju. Dengan pengalaman tersebut, menjadi pertimbangan besar bagi peneliti untuk menguatkan hasil penelitian dengan pendapat beliau dalam perspektif hubungan masyarakat yang beliau kenal jauh sebelum menduduki jabatan sebagai Kabag Humas.

3). Tokoh Masyarakat

Tokoh Masyarakat yang dipilih oleh peneliti adalah Kepala Desa yang telah menjabat lebih 2 periode sehingga dianggap telah dapat mewakili suara dan pendapat masyarakat dimana lokasi desa tersebut tidak terlalu jauh dari kabupaten/kota Bone.

- a. Yasri (45 tahun), merupakan Kepala Desa Pattimpa Kecamatan Ponre yang telah menjabat kurang lebih 2 periode yang menggantikan sepupunya dalam menjalankan sisa jabatan Kepala Desa. Sebelum menjadi Kepala Desa, beliau terangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada tahun 2010 yang pada saat itu kebijakan berlaku bahwa sekretaris desa akan diangkat menjadi PNS yang wilayah kerjanya di tempatkan di kantor Kecamatan Ponre. Sehingga jika ditinjau dari segi pengalaman dalam mengatur dan mengkoordinasikan fungsi serta tugas tugas yang berada di Desa, pendapatnya dapat dijadikan acuan.
- b. A. Muliana S.Pd (50 tahun), adalah Kepala Desa Bolli Kecamatan Ponre yang juga dalam menjalankan segala aktivitas di desa harus dibarengi dengan aktivitasnya sebagai guru Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan pengalaman beliau selama menjabat sebagai kepala desa 2 periode (10 tahun), telah dianggap mapan dan memumpuni segala roda pemerintahan di Desa sehingga peneliti menganggap pendapatnya dapat dipertanggungjawabkan yang berdasar pada fakta dan keinginan masyarakat.

c. Suryati Husain, S. H, M.H (52 tahun) merupakan akademisi dan anggota organisasi perempuan yang hingga kini masih aktif menjalankan dan mendampingi ketua Tim Penggerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Kabupaten Bone untuk turun ke Desa-Desa mensosialisasikan program PKK Kabupaten Bone. Selain aktif dalam organisasi perempuan, beliau adalah dosen aktif Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kabupaten Bone dan Institut Agama Islam Negeri Watampone. Walaupun beliau tidak menduduki jabatan yang lahir dari suara rakyat namun patut dikatakan sebagai salah satu perempuan paling berpengaruh di Kabupaten Bone yang kiprahnya dikenal dalam berbagai organisasi, seperti DKB (dewan kesenian bone), PKK, Dekopinda, dan sebagai muslimat NU. Sehingga dengan banyaknya aktivitas untuk dekat dengan masyarakat, maka peneliti yakin untuk menambahkan pendapatnya terkait website pemerintah daerah ini dalam perspektif sebagai anggota PKK (yang juga merupakan sub domain dari website PKK di bawah [www. bone.go.id](http://www.bone.go.id)) dan juga dalam perspektif akademisi.

4). Representasi Masyarakat

Dalam menggunakan Purposive Sampling maka peneliti menginginkan pendapat dari masyarakat dalam artian yang memiliki kekuatan dan ide kritis terhadap perubahan dan perkembangan teknologi saat ini, oleh Karena itu peneliti memutuskan mewawancarai Mahasiswa berdarah asli Bone dengan latar belakang perguruan tinggi berbeda sehingga pendapat yang diperoleh diharapkan datang

dari sudut pandang yang berbeda dengan tetap berpacu pada keberadaan website Pemerintah Daerah.

- a. Andi Mahdi Sahdani (22 tahun) merupakan Mahasiswa Psikologi Universitas Negeri Makassar (UNM). Ia adalah CEO “Hypnpreneur Indonesia” yang kiprah organisasinya berpusat pada Bone dan Makassar sehingga aktif memberikan konseling dan sosialisasi tentang kesehatan mental di dua kota tersebut, berdasarkan hal ini ia akui bahwa dengan keberadaan website ini merupakan jalur umum yang perlu dilakukan dalam melakukan mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan kepada Pemerintah terkait kegiatan yang akan dilakukan khususnya di Kabupaten Bone dengan mengharap dukungan dan penyediaan sarana serta prasarana dari Pemerintah Kabupaten Bone. Sebelum mendirikan “Hypnpreneur Indonesia”, pada Sekolah Menengah Atas ia aktif sebagai ketua Pramuka Putera pada SMAN. 4 Watampone.
- b. Andi Ichsan Yusril Asdar (22 tahun) merupakan Mahasiswa PIP (Politeknik Ilmu Pelayaran) Makassar yang berdarah bone asli, dan mengakui ketertarikannya perihal pembangunan di Indonesia khususnya di Kabupaten Bone. Walaupun berada di perantauan, ia akui memantau perkembangan pembangunan Kabupaten Bone dari jauh melalui banyak sosial media namun belum mengetahui adanya website ini. Sejak SMA ia memang sangat tertarik dengan dunia pembangunan di Indonesia khususnya seputar pembangunan Daerah Kabupaten Bone yang ia anggap

segalanya harus di pandang secara kritis demi kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.

- c. Irfan (22 tahun) merupakan mahasiswa prodi ekonomi syariah Institut Agama Islam Negeri Watampone sebagai anggota aktif KMN (Kesatuan Mahasiswa Nusantara) yang saat ini dikenal sebagai organisasi dengan tindakan nyata yang aktif memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada mahasiswa (i) Kabupaten Bone terkait pentingnya penghayatan Pancasila dalam kehidupan berdialektika. Penanaman jiwa nasionalisme pada Mahasiswa (i) Kabupaten Bone tak lepas dari pengaruh dan peranan organisasi KMN sebagai organisasi kemahasiswaan yang berasaskan pancasila, menggiatkan pengkajian pada tema-tema kebangsaan, keberagaman dan keberagaman.
- d. Andi Muh. Juanda (22 tahun) merupakan mahasiswa prodi Manajemen Universitas Negeri Makassar (UNM) yang saat ini melakukan penelitian di kantor pajak Kabupaten Bone, dan dalam prosesnya ia akui bahwa pada saat membuka website Kabupaten Bone untuk mencari data terkait penelitiannya namun tidak ia temukan, sehingga dengan pengalaman tersebut, ia bersedia menjadi informan peneliti.
- e. Waliansyah Maulana (22 tahun) merupakan alumni Politeknik Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone dan melanjutkan pendidikan DIV nya di Universitas Muslim Indonesia yang sebelumnya aktif berada di Kabupaten Bone serta tak luput dari berita yang ada disekitarnya dalam memberitakan seputar perkembangan pembangunan Kabupaten Bone.

C. Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan pada tiga ranah, yaitu pembuat kebijakan atau pengelola website (back office), tampilan website (front office), dan pengguna (users). Sutopo (2002:50-54) mengelompokkan sumber data menjadi: narasumber (informan); peristiwa atau aktivitas; tempat dan lokasi; benda, beragam gambar dan rekaman serta dokumen dan arsip. Manusia sebagai sumber data perlu dipahami bahwa mereka terdiri dari beragam individu yang memiliki beragam posisi, sehingga dalam memilih siapa yang akan menjadi informan, peneliti wajib memahami posisi dengan beragam peran dan keterlibatannya dengan kemungkinan akses informasi yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan penelitian (Sutopo, 2002). Untuk mengkaji tampilan website dilakukan melalui pengamatan terhadap website pemda yang diteliti. Pengumpulan data pada pembuat kebijakan atau pengelola website dan pengguna dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap narasumber yang meliputi: 1) Pemangku kebijakan dan pengelola website serta 2) users yang meliputi akademisi, pengusaha, dan praktisi media serta stakeholder. Kelompok ini dipilih dengan pertimbangan mereka memiliki kepentingan dengan layanan public relations yang disampaikan melalui website pemda untuk berbagai keperluan. Sedangkan dokumen antara lain tampilan website pemda yang dikaji maupun dokumen lain yang mendukung informasi yang dibutuhkan.

Tampilan website :



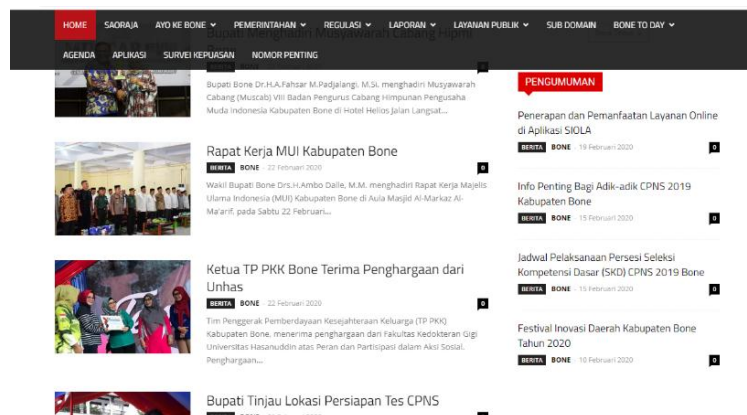
Gambar 4.3 Tampilan depan Website

Pada tampilan website pemerintah daerah yang dikelola diskominfo masih menampilkan website dengan menu lama, sedangkan saat ini sudah banyak kabupaten/kota dengan menampilkan profil website yang lebih modern. Selain itu, foto yang digunakan merupakan foto lama, begitupula dalam penyajian informasi disertakan dengan foto kualitas rendah.



Gambar 4.4 contoh tampilan website modern

Contoh di atas merupakan website milik pemerintah daerah Luwu Timur yang telah menggunakan website berbasis modern yang dapat menarik minat pengguna dalam mengakses informasi dan data yang disajikan didalamnya. Menu yang memiliki tata letak menarik serta profil utama dengan menampilkan ciri khas daerah luwu timur.



Gambar 4.5 tampilan website Pemerintah Kab. Bone dalam penyajian informasi

Berbeda dengan tampilan menu website pemda milik luwu timur, tata letak menu pemda Kab. Bone berada di atas dengan sederet sub menu tempat data terhimpun. Walaupun cenderung mudah untuk diakses, namun dalam kacamata pengguna kurang menarik dan website masih bersifat sangat biasa untuk dapat disandingkan dengan website pemda lainnya.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Seluruh Domain dan Subdomain di bawah ini berada dalam pengawasan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone :

1. <https://dispeka.bone.go.id>
subdomain ini dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone.
2. <https://library.bone.go.id>
subdomain ini juga dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bone.
3. <https://disnak.bone.go.id>
Subdomain ini dikelola oleh Dinas Peternakan Kabupaten Bone
4. <https://disnaker.bone.go.id>
Subdomain ini dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone
5. <https://bpbd.bone.go.id>
Subdomain ini dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone
6. <https://disbud.bone.go.id>
Subdomain ini dikelola oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone
7. <https://bkpsdm.bone.go.id>
Subdomain ini dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone
8. <https://bpkad.bone.go.id>
Subdomain ini dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone
9. <https://balitbang.bone.go.id>
Subdomain ini dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone
10. <https://pu.bone.go.id>
Subdomain ini dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone
11. <https://disperin.bone.go.id>
Subdomain ini dikelola oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bone
12. <https://ketapang.bone.go.id>
Subdomain ini dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bone
13. <https://dislutkan.bone.go.id> (dalam perencanaan)
Subdomain ini dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
14. <http://dpmptsp.bone.go.id>

Subdomain ini dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone

15. <https://setda.bone.go.id>

Subdomain ini dikelola oleh Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bone

16. <http://bappeda.bone.go.id>

Subdomain ini dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone

17. <https://dishub.bone.go.id>

Subdomain ini dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bone

18. <https://dispar.bone.go.id>

Subdomain ini dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone

19. <https://ppid.bone.go.id>

Subdomain ini dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone

20. <https://kominfo.bone.go.id>

Subdomain ini dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone

21. <https://bone.go.id>

Domain induk Pemerintah Kabupaten Bone dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone

22. <https://portal.bone.go.id>

Subdomain ini dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone

23. <https://pkk.bone.go.id>

Dikelola oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Bone

24. <https://inspektorat.bone.go.id>

Dikelola oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone

25. <https://disperkimtan.bone.go.id/>

Dikelola oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

26. <https://satpolpp.bone.go.id>

Dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone

27. <https://capil.bone.go.id>

Dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

28. <https://dlh.bone.go.id>

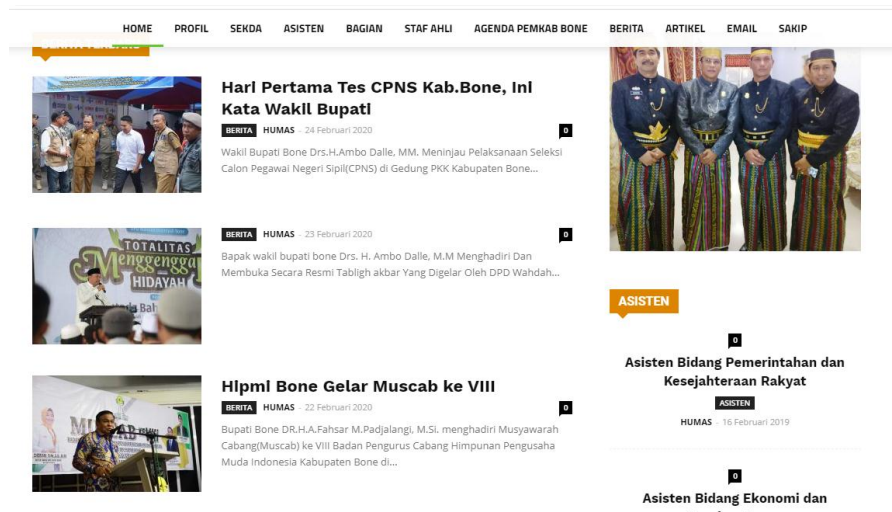
Dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone

29. <https://dinkes.bone.go.id>

Dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone

30. <https://disdik.bone.go.id>

Dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bone



Gambar 4.6, Website Sekretariat Daerah yang dikelola Bagian Humas dan Protokol Kab. Bone

Menu dan Berita serta informasi yang disajikan oleh Bone.go.id kurang lebih sama serta foto yang digunakan dengan kualitas yang sama, yang terjadi adalah website bone.go.id dikelola oleh dinas komunikasi informatika dan persandian Kab. Bone sebagai tugas dan fungsinya dalam menyebarkan informasi, penyediaan layanan pengaduan berupa kritik dan saran melalui Laporan dan Halo Bone (dikelola diskominfo) namun dalam proses pelaksanaan tidak terlepas dari penerapan prinsip dan fungsi Humas, yaitu menghasilkan komunikasi dua arah antara public dan pemerintah, membuka ruang partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya. Selain itu, dalam website yang dikelola Humas dan Protokol Kab. Bone hanya menyediakan satu wadah layanan aduan, kritik serta saran, dan dari segi keaktifan website, tetap jauh lebih aktif website bone.go.id dalam penyajian informasi dan data.

1) Strategi Pemerintah Kab. Bone dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam Pengembangan Website Pemda

1. Tujuan dan Program

Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Bone Tahun 2016-2019, yaitu:

- Meningkatkan Akses dan Kualitas Informasi dan komunikasi Layanan public. Sasaran :
 1. Tersedianya informasi dan komunikasi public Pemerintah daerah
 2. Terselenggaranya komunikasi public Pemerintah Daerah
 3. Meningkatnya pengelolaan sengketa Informasi dan Komunikasi public di Daerah.
- Meningkatkan pembinaan SDM untuk realisasi kegiatan Informasi dan Komunikasi Daerah
 1. Meningkatnya kapasitas Sumber daya pengelolaan Informasi public
 2. Tingkat kemitraan antara lembaga komunikasi informasi dan komunikasi public
- Meningkatkan pengelolaan dan penyedia informasi dan komunikasi public melalui pemanfaatan teknologi informasi
 1. Tersedianya layanan e-government yang terintegrasi

Program adalah bentuk Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD atau Masyarakat , yang akan dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satu Program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan Teknologi, dana , atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis

sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang /jasa.

Faktor – Faktor yang menjadi bahan rumusan pada rencana kerja tahun 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Kabupaten Bone berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Bone tahun 2019. Direncanakan terdiri dari 12 Program dan 43 Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
2. Program Pengembangan Data Informasi Statistik Daerah
 - a. Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah Pengelohan Updating dan Analisis Data Statistik Daerah
 - b. Verifikasi dan Validasi Sistem Data base Desa
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan bangunan Kantor
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang Undangan
 - f. Rapat – Rapat kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah
 - g. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Mobil Jabatan
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
 - c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - d. Pengadaan Peralatan gedung Kantor
 - e. Pengadaan Meubeler
 - f. Pemeliharaan rutin berkala Gedung Kantor
 - g. Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas Operasional
 - h. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Bimbingan Tehnis Implemntasi Peraturan perundang Undangan
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan Capaian Kinerja dan iktisiar realisasi Kinerja SKPD
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- 7. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
 - b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
 - c. Penkajian dan Pengembangan Sistem Informasi. Pengadaan Impra Struktur Jaringan Komunikasi dan Informasi
 - d. Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang penyiaran public local
 - e. Pengadaan Aplikasi dan datang elektronik di lingkup kabupaten Bone
- 8. Program Pasilitas Peninngkatan SDM Bidang Komunikasidan Informasi
 - a. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasidan Informasi
- 9. Program Kerjasama Informasi dan Mass Media
 - a. Penyebaran Informasi Pembangunan daerah
 - b. Penyebaran Luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - c. Penyebaran Luasan Informasi dan Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat
 - d. Pengenalan Internet kepada Masyarakat
- 10. Program Pengembangan dan Implementasi *E-Goverment*
 - a. Bimtek Pengelolaan Domain Website, Blok, bagi aparat pemerintah Daerah
 - b. Layanan Pengembangan Pengelohan Aplikasi terintergritas
 - c. Layanan Pemeliharaan Aplikasi Keperintahan dan Publik
- 11. Program Peningkatan Pelayanan Keamanan Informasi dan Persandian
 - a. Pengelohan Sumber Daya Persandian
 - b. Pengelohan Jaringan Komunikasi Persandian
 - c. Pengelohan dan pengamanan Data Berita Informasi
- 12. Program Pengolahan Komunikasi dan Informasi Publik
 - a. Pelayanan Pengaduan Masyarakat
 - b. Pengelohan Radio Pemerintah
 - c. Pengelohan Sarana Komunikasi Publik dan Pelayanan Saundsistem Pemerintah
 - d. Monitoring dan Pendataan Media Radio, TV Kabel, Radio Media Online

Hal ini sejalan dengan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM Informasi dan Komunikasi.
- 2) Menambah sarana dan Prasarana Jaringan Informasi dan Komunikasi

- 3) Meningkatkan Pemanfaatan sistem Aplikasi yang terintegrasi di semua Lembaga Pemerintah (E-Government).
- 4) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi'
- 5) Meningkatkan Kerjasama kemitraan bersama Media Informasi dan Komunikasi Teknologi Informasi.
- 6) Optimalisasi Jaringan Informasi dan Komunikasi yang ada.

Menurut penjelasan Sub Bagian Keuangan, Rafiq, S.E yang membantu dalam proses penganggaran program, bahwa alur pengajuan program diserahkan kepada bidang masing masing untuk melihat kebutuhan bidang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, kemudian diajukan kepada Sub Bagian Program dan Pelaporan untuk menyusun dan menggabungkan secara utuh program-program yang ditetapkan setiap bidang berdasarkan kebutuhan, yang tetap dalam penyusunan program bidang ini tidak boleh keluar dari alur tujuan, visi misi dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian khususnya bidang-bidang yang menangani tugas dan fungsinya.

2. Sosialisasi dan Pengenalan Website kepada Masyarakat

Dalam menjalankan prinsip good governance dan clean governance, pemerintah perlu membangun hubungan dengan masyarakat luas, hal ini dilakukan dalam memenuhi kewajiban pemerintah sebagai wujud transparansi informasi yang kemudian dibuktikan dengan umpan balik dari respon masyarakat disebut dengan partisipasi. Alur Pemerintahan yang semestinya adalah

membangun hubungan ke masyarakat (*HUMAS/Public Relation*) dimana masyarakat sebagai objek sekaligus subjek dari pembangunan yang mana suatu pembangunan dilakukan untuk membawa dampak bagi masyarakat, urgensi pembangunan dilakukan karena lahir kebutuhan yang mendesak menuntut pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam jangka panjang/pendek demi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat itu sendiri.

Membahas Strategi Pemerintah dalam membangun hubungan dengan masyarakat luas, maka jawabannya ialah mengelola Website atas nama Pemerintah Daerah yang didalamnya disajikan segala bentuk gambaran kegiatan pembangunan yang dicanangkan Kabupaten Bone.

Informan kunci sebagai penentu dalam menjawab indicator penelitian adalah Mursalim S.Sos, M.Si yang merupakan Kepala Bidang Teknologi Informasi dimana bidang ini memiliki andil untuk mengelola website secara khusus.

“Awal mula transparansi Pemerintah Kabupaten Bone dimulai sejak 2013 (sebelum diskominfo terbentuk) namun belum dalam bentuk www.bone.go.id seperti sekarang. Pada tahun 2016 diskominfo terbentuk, Pemerintah mulai secara aktif merancang dan membentuk website dalam nama bone.go.id itupun melalui proses panjang untuk mendapat persetujuan dipusat sampai akhirnya di berikan kewenangan kepada Diskominfo sebagai admin dari bone.go.id” kata Kabid Teknologi dan informasi. (24/01/2020)

Selain itu pula dalam penjelasan Mursalim (Kabid Teknologi Informasi) yang ditemui pada Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone mengatakan:

“Dalam peranan Diskominfo untuk mengelola website adalah kami memfasilitasi berbagai instansi untuk berkoordinasi, karena dalam bone.go.id hanyalah sebagian kecil portal yang disediakan untuk informasi-informasi terbaru terkait Kab. Bone, karena sudah tersedia berbagai informasi di setiap dinas dan instansi yang dihubungkan melalui bone.go.id, walaupun belum semuanya tersedia karena kami masih terbilang baru berdiri.”(24/01/2020)

Beliau menambahkan bahwa Strategi Diskominfo dalam pengelolaan website Pemda ini adalah dengan melakukan bimtek (Bimbingan Teknis) dan Bimkhus (Bimbingan Khusus) yang dimulai dengan memanggil SKPD untuk dilatih dalam mengelola website dinas masing masing serta Bimkhus dilaksanakan dengan memanggil perwakilan setiap kecamatan untuk dilatih dalam pemanfaatan teknologi dan informasi. Namun beliau mengakui bahwa Teknologi dan Informasi merupakan sebuah hal yang dapat berubah ubah setiap waktu, olehnya itu jika sosialisasi dilakukan ke setiap desa di Kabupaten Bone dengan jumlah kecamatan kurang lebih 27, akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, Mursalim menekankan dalam hal sosialisasi yang belum merambah ke setiap desa karena pertimbangan seperti anggaran /dana yang dikelola Diskominfo Kab. Bone hanya 0,3 % (Data Renja Diskominfo tahun 2019). Jadi ketika Sosialisasi hingga ke pelosok maka membutuhkan biaya transportasi/akomodasi, selain itu, masih ada beberapa desa di Kab. Bone yang belum dapat mengakses internet karena wilayah pelosok yang belum menyentuh jaringan internet. Olehnya itu, untuk saat ini Bimtek dan Bimkhus yang dilakukan merupakan strategi yang paling baik dalam ruang lingkup pemerintah kabupaten dan kecamatan walaupun masih dianggap kurang efektif.



4.7 Bentuk pengenalan lain dari Website *bone.go.id* dengan menempelkan Spanduk besar pada Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone

Selain itu, Mursalim menuturkan dalam Bimtek dan Bimkhus yang telah dilakukan di beberapa instansi itu dibantu dan bekerja sama dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). PPID merupakan sebuah lembaga yang terbentuk akibat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. E-public Dan kini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat di akses melalui *ppid.bone.go.id* dirancang dengan platform hybrid - offline dan online, yang terintegrasi antara PPID Pembantu dan PPID Utama dalam sebuah entitas Badan Publik.

TUGAS

1. Pengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
5. Melakukan kemutakhiran informasi dan dokumentasi
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

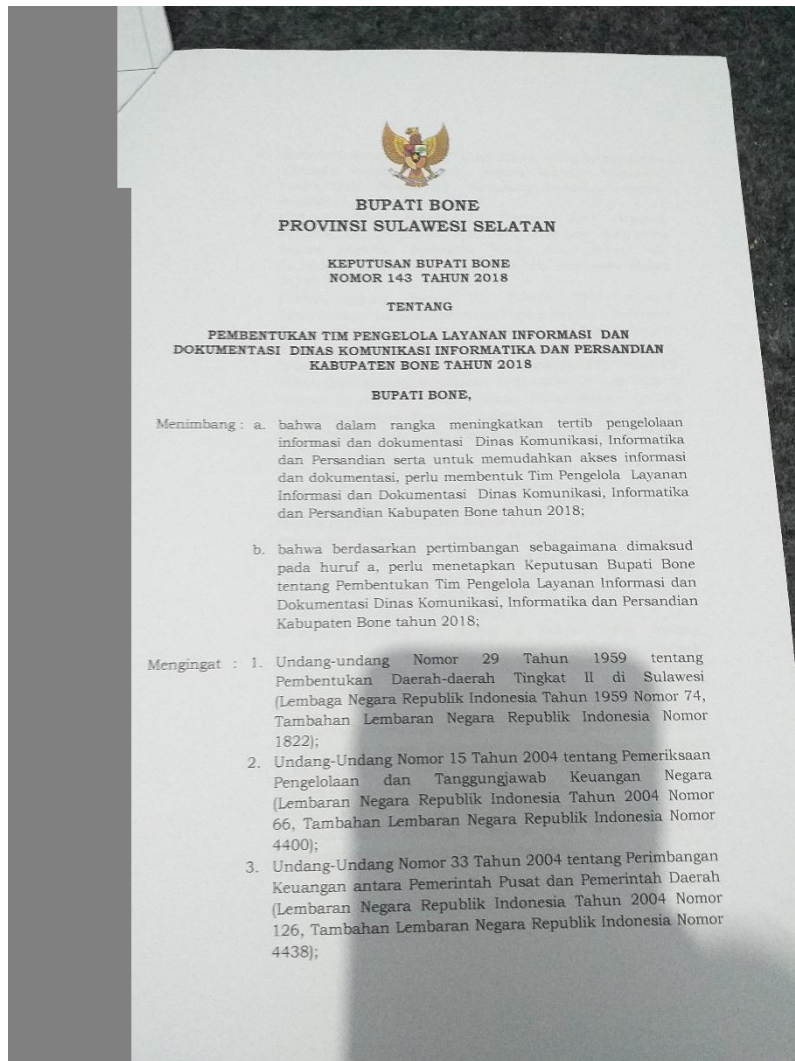
KEWENANGAN

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya
3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik
5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Sedangkan untuk menguatkan rantai koordinasi antara Kominfo dan PPID di tuangkan dalam Struktur Organisasi PPID.



Dalam Struktur terdapat Pembina, Pengarah, PPID (Anggota) dan PPID Pembantu dan atau pejabat Fungsional. Pejabat Fungsional yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID dalam menyajikan informasi, seperti Kominfo yang seharusnya terintegrasi dengan PPID sebagai pengelola website Pemda.



Gambar 4.8, Keputusan Bupati Bone tentang pembentukan PPID

Hal inipun dibenarkan oleh Kabag Humas Barham S.T yang diwawancarai mengatakan:

“Kominfo dalam menjalankan dan mengelola website di bantu oleh PPID dalam penyajian informasi, pengenalan serta sosialisasi. Bahwa di daerah terdapat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Bagian

Humas pun jika setelah ada kegiatan, bisa mengirimkan berita dan pokok isi berita kepada kominfo untuk dimuat pada website Pemda selebihnya dalam penyajian informasi dari segi kata akan diolah oleh Kominfo agar sesuai EYD”. (23/01/2020)

Barham melanjutkan bahwa:

“Koordinasi antara Humas dan Kominfo adalah dalam hal kegiatan yang telah berlangsung, Humas melaporkan hasil dari kegiatan terkait pokok pokok informasi agar dimuat di website Pemda”.(23/01/2020)

Selain itu, Barham menambahkan

“Saat ini keluhan yang masuk paling umum terkait website Pemda adalah data data serta dokumentasi yang dimuat dalam website Pemda masih terbilang foto lama dan belum terlalu up to date, misalnya foto profil dalam portal *bone.go.id* masih menggunakan foto bupati dan wabup yang lama, mungkin itu keluhan yang paling umum saya dengar”.(23/01/2020)

Barham sebagai Kabag Humas yang dilantik beberapa waktu lalu juga menegaskan bahwa

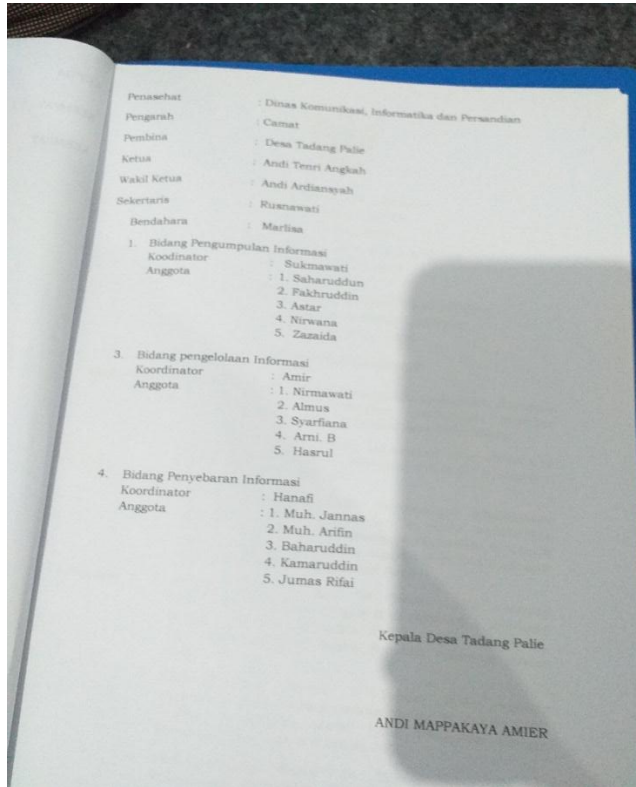
“Website Pemda harus lebih dikenali oleh masyarakat luas, entah itu melalui sosialisasi ataupun mengetahuinya sendiri, karena saya yakin tanpa sosialisasi pun, jika masyarakat memiliki kepentingan untuk mengakses informasi maka pasti akan ada usaha untuk mencari tau sampai akhirnya berujung pada *www.bone.go.id*”(23/01/2020)

Selain itu, dalam waktu yang berbeda, untuk memperjelas kembali bahwa strategi dinas komunikasi informatika dan persandian Kab. Bone dihambat oleh beberapa hal di tuturkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik, Dra. Hj. Arfiah mengatakan :

“terkadang ketika kami mengadakan sosialisasi dengan memanggil PPID yang bersangkutan, selalu datang dengan perwakilan bukan PPID nya secara langsung, jadi ketika ada informasi informasi yang didapatkan pun yang datang dalam sosialisasi tidak menyampaikan dengan PPID yang berkaitan, jadi lain yang hadir sosialisasi, lain juga yang laksanakan dibawah, itupun pelaksanaannya dibawah belum secara maksimal, karena beberapa kali kami menyurat untuk meminta laporan kinerja dan data yang kami butuhkan tidak ada respon dan jarang ditanggapi” terang kepala seksi pelayanan informasi public yang secara khusus seksi ini yang membawahi dan membina PPID. (18/02/2020)

Selain itu, dalam kesempatan yang sama Kepala seksi Pengembangan Sumber Daya Informasi yang membawahi KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) mengatakan:

“saat ini KIM sudah terbentuk kurang lebih 17 tim di 17 kecamatan, dalam usahanya menyebarkan informasi sesuai tugas dan fungsi Kim belum secara maksimal terlaksana. Untuk melihat kinerja bahwa ada hasil yang telah dikerjakan dari penyebaran informasi di kecamatan kecamatan terkait program pembangunan pemerintah yang bersumber dari kabupaten belum kami peroleh hingga sekarang, padahal awal mula dibentuknya KIM sudah 2 tahun lalu”



Gambar 4.9, Pembagian kelompok informasi pada salah satu kelompok yang terbentuk

Sependapat dengan apa yang dikatakan Kabag Humas dan Mursalim (Kabid Teknologi Informasi) menegaskan berulang kali bahwa Sosialisasi untuk menyentuh hingga masyarakat pedesaan mungkin agak susah karena keterbatasan biaya yang dikelola, dan untuk saat ini bimtek dan bimkhus dengan perwakilan setiap instansi/lembaga pemerintah adalah hal yang terbaik dilakukan (itupun realisasi dan tindak lanjut belum maksimal). Selain itu, sebagaimana di ungkap dalam Rencana Kerja Diskominfo telah memprogramkan sebagai berikut:

Program Pengembangan dan Implementasi *E-Government*

1. Bimtek Pengelolaan Domain Website, Blok, bagi aparat pemerintah Daerah
2. Layanan Pengembangan Pengelohan Aplikasi terintergritas
3. Layanan Pemeliharaan Aplikasi Keperintahan dan Publik

Hal ini secara tidak langsung mengungkap bahwa strategi bidang teknologi informasi dalam pengembangan dan implementasi e-government adalah dengan bimtek, layanan pengembangan dan layanan pemeliharaan, terlepas dari isu strategi dan perencanaannya, tetap dikembalikan pada pelaksanaan dan tingkat keberhasilan program yang akan dijalankan.

Dalam wawancara yang dilaksanakan, Kabid Teknologi Informasi menyadari bahwa kurangnya sosialisasi dan pengenalan website kepada masyarakat, namun strategi lainnya adalah dengan Bimtek dan Bimkhus yaitu peningkatan kapasitas kemampuan SDM instansi/dinas terkait dalam mengelola website resmi dinas masing-masing. Karena, menurut beliau kapasitas kemampuan SDM internal ruang lingkup Pemda yang perlu diberdayakan baru kemudian digerakkan hingga lapisan masyarakat. Namun terlepas dari Sosialisasi yang kurang menyentuh setiap lapisan masyarakat, dalam catatan Indikator utama pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone mengupayakan bahwa pada tahun 2017 10 kecamatan dengan jumlah proporsi rumah tangga yang dapat mengakses internet sudah mencapai 229.438 dan pada tahun 2018 akan ditingkatkan menjadi 15 kecamatan, ditahun 2019 menjadi 20 kecamatan serta ditahun 2020 menjadi 27 kecamatan, dengan harapan realisasi 3 tahun mendatang dapat terlihat jumlah rumah tangga

Menurut pernyataan Rafiqa, S.E, dana yang digunakan senilai 1.534.000.000,00 dalam pencapaian target pengunjung website untuk biaya peningkatan kapasitas daya tampung pengunjung pada website setiap tahunnya, karena ternyata website ini dalam pengelolaan jaringan dan pengembangannya agar dapat diakses oleh masyarakat luas di pihak ketigakan artinya ada pihak ketiga yang memiliki kesepakatan khusus dalam membantu website dari segi kelancaran akses jaringan, dan pihak ketiga yang dimaksud adalah indosat yang bekerja sama dengan diskominfo.

Dana yang disediakan untuk pengembangan website cukup banyak untuk digunakan dalam ajang sosialisasi/bertatap muka kepada masyarakat demi pengenalan website yang lebih luas, tidak terpaku hanya pada satu kecamatan saja, tapi diharapkan mampu menyentuh lapisan masyarakat terkecil di seluruh wilayah Kab. Bone.

Renja Kominfo juga Mengungkapkan bahwa

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Bone belum secara langsung terlibat dengan kegiatan masyarakat dan Organisasi lainnya selaku stakeholder eksternal pemerintahan daerah karena Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian merupakan SKPD baru yang terbentuk 2 tahun sejak tahun 2017, dan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Sendiri berperan aktif dalam penyebaran luasan Informasi kepada masyarakat, Alasan-Alasan kenapa Dinas Komunikasi Informatika tidak menerima usulan Musrenbang dari Masyarakat : Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Termasuk SKPD baru dan sebagian Masyarakat belum Mengenal Hubungan Masyarakat terhadap SKPD itu sendiri , Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Mempunyai Program Wajib yang sedang berjalan Menerima Aduan atau Kritikan dan saran secara online melalui Aspirasi Publik yang cepat dan tepat sehingga untuk program dan

kegiatan yang di usulkan tidak harus menunggu kegiatan Musremban. karena adanya layanan Aspirasi Publik membuka website layanan aduan tanpa harus bertatap muka, maka ketika musremban itu terlaksana Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian tidak mendapatkan lirikan atau Program dan Kegiatan yang di usulkan . (www.kominfo.bone.go.id)

Hal ini mengisyaratkan bahwa masyarakat masih ada yang belum mengetahui pasti peran dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bone dikarenakan kurangnya pendekatan kepada masyarakat tentang kehadiran diskominfo sebagai penyedia layanan informasi terpercaya. Di sisi lain, diskominfo menerima layanan aduan atau kritikan dan saran secara online, fakta yang terjadi warga/masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam hal itu tidak mengetahui seluk beluk keberadaan layanan tersebut karena memang pada dasarnya belum pernah ada sosialisasi/pengenalan serius terhadap hal itu.

Pada Lakip (Laporan kinerja instansi pemerintah) diskominfo Kab. Bone bahwa dari total dana yang dikelola pada tahun penganggaran 2018 berkisar 3 M, yang mana anggaran belanjanya baik langsung dan secara tidak langsung banyak menghabiskan pada pengadaan sarana dan prasarana kantor yang kala itu masih dalam tahap pembangunan dan pengadaan alat alat kantor yang terbilang masih baru berdiri.

... dan persandian kab.bone, baik penyerapan anggaran belanja tidak langsung untuk gaji dan tunjangan pegawai, maupun penyerapan anggaran belanja langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 7.381.326.227,00,- atau 100% dari pagu anggaran, yang rinciannya tersaji pada tabel berikut ini :

2. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone Tahun 2018

BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji & Tunjangan Pegawai)	2.607.483.037	2.256.434.814	48,52%
BELANJA LANGSUNG (Program dan Kegiatan)	3.650.000.000	3.624.866.500	99,30%
JUMLAH	6.257.483.037	5.881.301.314	93,99%

Dari tabel diatas, terlihat bahwa realisasi belanja terbesar dari pagu anggaran belanja langsung program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone pada tahun 2018 adalah belanja Barang dan jasa yang nilainya mencapai Rp.3.650.000.000,00 Besarnya realisasi anggaran belanja sebesar 3.624.866.500 Barang dan Jasa dikarenakan banyaknya kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika dan persandian kab.bone

Gambar 4.11, Realisasi Anggaran tahun 2018

Sedangkan dana yang disisihkan untuk Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat hanya dianggarkan dengan Rp. 150.900.000 dengan total realisasi anggaran Rp. 150. 000.000 dalam presentase 99,40 %. Untuk pengenalan Internet kepada masyarakat dianggarkan senilai Rp. 44.984.000 dengan realisasi anggaran Rp. 44. 843.800 dalam presentase 99,69 %.

Komunikasi Publik		Penyerapan Anggaran	Realisasi	%	
Meningkatnya Akses Layanan Informasi Publik	Jumlah Berita dan konten yang di Publikasikan	Program kerjasama Informasi Dengan Media Massa	Penyebaran Luasan Informasi Pembangunan Daerah	106.500.000	99,89%
	Persentase Perminian data dan Informasi yang di Pembi		Penyebaran Luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	773.675.000	98,89%
			Penyebaran Luasan Informasi yang berisipat Penyuluhan bagi Masyarakat	150.900.000	99,40%
			Pengenalan Internet Kepada Masyarakat	44.984.000	99,69%

Gambar 4.12, Realisasi Anggaran peningkatan akses layanan informasi publik.

Hal ini dijelaskan oleh Rafiqa S.E (Sub Bagian Keuangan) yang ditunjukkan dengan Lakip dan mengatakan bahwa :

“sosialisasi yang dilakukan saat itu dengan pelajar, kami memanggil pelajar-pelajar untuk penyuluhan dan pengenalan internet karena saat itu bagi kami pelajar membutuhkan akses data dan informasi seperti anda (peneliti) sekarang ini. Namun, sasaran pelajar nya adalah Cuma yang bagian kabupaten/kota mengingat menyesuaikan dengan jumlah dana yang dianggarkan” (18/02/2020)

Beliau melanjutkan bahwa:

“hal itu dilakukan 2018 lalu, hingga 2019 kami focus untuk membina opd dan skpd dalam pemanfaatan jaringan dan penggunaan website, karena mengingat fokus utama setiap tahun berbeda beda untuk saling mengisi dan menyeimbangkan yang dibutuhkan, karena untuk melengkapi segalanya butuh proses yang panjang” (18/02/2020)

Ketimpangan yang terjadi adalah dalam menjalankan fungsi utama organisasi dari segi perencanaan, implementasi hingga evaluasi (G.R Terry) bahwa perencanaan telah tertuang dalam renja diskominfo, namun dalam tahap perencanaannya luput dalam merancang strategi yang baik dalam hal pengenalan dan sosialisasi kepada masyarakat baik itu dalam pendekatan di masyarakat itu sendiri sehingga dalam pengimplementasiannya dapat bersinergi dengan peningkatan sumber daya masyarakat dalam hal pemanfaatan dan penggunaan akses informasi tersebut.

Saat ini ada banyak akses data dan informasi serta untuk pengaduan kritik dan saran yang disediakan oleh dinas komunikasi informatika dan persandian Kab. Bone, mulai dari Halo Bone yang terbagi atas 3 yaitu instagram, fb, dan twitter (dikelola oleh diskominfo), ppid. Go. Id, Lapor, dll dengan berbagai tugas dan fungsi yang hampir sama.



Gambar 4.13, tampilan akun Halo Bone melalui Instagram yang terintegrasi dengan website bone.go.id

Akun instagram Halo Bone yang dihubungkan dengan www.bone.go.id, yang tetap saja tidak banyak orang mengetahui bahwa akun tersebut dikelola oleh diskominfo. Namun, perbedaannya, gambar yang disajikan pada akun instagram lebih menarik dibandingkan dengan yang disajikan pada website.

Dalam membuktikan terkait kurangnya sosialisasi/pengenalan website kepada masyarakat terkait Diskominfo dalam mengelola website sebagai media informasi terdepan dengan segala tantangan dan hambatan yang dihadapi, maka perlu mengambil pandangan serta pendapat dari stakeholder (Pemangku kepentingan) yang merupakan penerima dampak dari diadakannya website tersebut, serta untuk menguatkan argument stakeholder dibutuhkan pandangan lain yang mengabsahkan argument 1 informan. Maka dari itu, Stakeholder yang

dimaksud adalah Kepala Desa, Mahasiswa, serta perwakilan dari Organisasi Perempuan.

Dalam hal ini Informan terkait hal diatas mengambil 5 sampel mahasiswa, 1 perwakilan organisasi perempuan, dan 2 perwakilan kepala desa yang bermukim 30 km dari wilayah perkotaan, dianggap tidak begitu jauh dari pusat pemerintah kabupaten dan juga tidak terlalu dekat. Pertimbangan peneliti adalah jika mengambil sampel lurah pada wilayah kabupaten pasti sudah sangat mengerti akan penggunaan website itu serta pengelolaannya seperti apa, karena mayoritas dari penduduk yang hidup di pusat perkotaan akan dengan mudah menyerap dan mendapatkan informasi karena proses kehidupan sehari-harinya dekat dengan kehidupan pemerintah kabupaten. Namun, yang ingin dilihat disini adalah seberapa luas jangkauan Website dapat dikenal oleh masyarakat luas serta seberapa tahu pemerintah desa akan pengelolaannya, dan apakah mereka benar-benar mengetahui apa itu Website Pemda, serta apa harapan dan saran demi pengembangan Website Pemda yang lebih baik.

Pada kesempatan yang diberikan kepada peneliti, 2 Kepala Desa bersedia melakukan wawancara/interview pada tanggal 4 Januari 2020 dikediaman masing-masing Kepala Desa serta sebagai bukti pengabsahan data, Kepala Desa bersedia menandatangani Surat Pernyataan bersedia menjadi informan yang kemudian memberikan surat tindak lanjut yang dikeluarkan Pemerintah Desa atas surat izin penelitian yang dimasukkan sebagai bukti telah melakukan wawancara/interview pada Kepala Desa terkait.

Indikator Wawancara kepada informan dalam memberikan argument untuk merumuskan kesiapan pengelolaan Website, sebagai berikut.

2. Keberadaan Website
3. Pendapat Keberadaan Website
4. Pengembangan Website Pemda
5. Hubungan Masyarakat dan Pemerintah
6. Kesiapan Pemerintah dalam mengelola website Pemda untuk menjadi penghubung antara masyarakat dan Pemerintah.

Yasri (Kepala Desa Pattimpa) mengatakan:

“Saya mengetahui keberadaan website Pemda, namun sejauh ini kami belum pernah dihimbau pihak kabupaten melakukan sosialisasi terkait hal itu. Untuk masyarakat sendiri, saat ini sulit dipungkiri bahwa ada tipe yang masa bodo dan ada pula yang mencari informasi karena kepentingan. Tentunya semua hal itu menjadi factor penentu eksistensi website” (5/01/2020)

Beliau juga mengakui bahwa :

“Website Pemda kini telah berjalan beberapa tahun belakangan, tapi tetap saja ada masyarakat yang malas membuka dan juga sebagian yang belum tahu. Karena yang saya lihat masyarakat lebih cepat tanggap terhadap media sosial seperti facebook, instagram dll, padahal kita sebagai masyarakat harus mengkritik dan memberi saran supaya memberi efek transparansi informasi. Tetapi kembali lagi bahwa ada factor kemalasan dari masyarakat karena merasa tidak berkepentingan, dan ketika timbul masalah barulah membuka dan mempertanyakan ada apa sebenarnya. Dan

satu hal, saat ini masyarakat di Kec. Ponre mayoritas sudah dapat mengakses internet, tetapi sebagian masyarakat belum paham tentang hal itu (Website Pemda)”(5/01/2020)

Yasri Menyimpulkan:

“Kurangnya informasi kepada Masyarakat, Sosialisasi dan pengenalan Website Pemerintah bahwa semua kegiatan Pemda dapat diakses melalui website, tetapi semua itu pun harus dibarengi dengan keinginan untuk mengakses (merasa berkepentingan). Sejauh ini dalam upaya Transparansi Pemerintah Desa yaitu dengan pemasangan spanduk yang memperlihatkan Dana Desa dan realisasi Anggarannya serta papan Informasi kegiatan” (5/01/2020)

Selain itu, Informan perwakilan dari Organisasi Perempuan, Suryati Husain yang kini aktif dalam PKK dalam mendampingi ketua tim penggerak PKK Kabupaten untuk turun ke kecamatan-kecamatan serta dalam sehari-harinya sebagai dosen hukum pada STIH Kab. Bone mengatakan

“Saya mengetahui keberadaan website Pemda tapi perlu diakui bahwa belum tersalurkan secara merata di masyarakat umum, hal ini ada beberapa factor yakni penggunaan IT belum merata, dan tentunya belum mengenal website itu apa. Dan yang lumrah dipakai biasanya sosmed untuk mengakses informasi”. (4/01/2020)

Ia juga mengatakan :

“seharusnya website kini disajikan dengan konten yang lebih menarik minat, praktis dan mudah. Sarannya yaa harus ada metode tertentu supaya Website dapat menyentuh masyarakat pelosok agar dapat lebih akurat. Dan masyarakat lebih tahu tentang keadaan pemerintah Kab. Bone” (4/01/2020)

Suryati Husain menambahkan:

“Sebaiknya melakukan Sosialisasi pengenalan Website, untuk menentukan masyarakat dapat menggunakan atau belum, jika belum adakan pelatihan di desa-desa, jadi ada terobosan baru dari Pemda. Serta juga bisa melakukan pendampingan dan pengawasan, yang tentunya bisa

dikondisikan, demi terwujudnya masyarakat yang “Mabessa” sesuai visi misi Kab. Bone”(4/01/2020)

Berbeda dengan penuturan 2 informan yang sudah mengetahui adanya website, Perwakilan Kepala Desa Bolli AM mengatakan

“Kami di Desa tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait pengenalan Website Pemda, Padahal jika kami mengetahui Website tersebut ada, akan sangat memudahkan dalam hal penyusunan Renja di Musrenbang Kabupaten karena ada pedoman yang bisa menjadi acuan”

Dimana penjelasan Andi Muliana secara terang terangan mengatakan tidak pernah menerima sosialisasi keberadaan Website Pemda yang pada saat Musrenbang di Kabupaten merasa kesulitan dalam hal penyusunan Renja yang tidak jelas acuan serta panduannya. Pada saat di Kabupaten berlangsung Musrenbang baru mengetahui ternyata ada yang seperti itu Renjanya.

Beliau berasumsi :

“Seandainya bisa kami diperkenalkan dengan website itu dan dituntun bahwa semua contoh-contoh penyusunan Renja dapat dilihat di Website Pemda, paasti akan sangat memudahkan”

Ketiga Informan yang merupakan perwakilan masyarakat yang juga mewakili suara masyarakat disekitarnya menarik benang merahnya bahwa sebaiknya diadakan Sosialisasi hingga tingkatan masyarakat desa agar dapat lebih efektif dalam mengetahui informasi-informasi terkini yang ada pada Pemerintah Kabupaten serta 2 Kepala Desa (Informan) bersedia membantu semaksimal mungkin jikalau ada tim yang datang untuk mensosialisasikan Website Pemda.

Tidak hanya berpaku pada pendapat 3 informan yang sebenarnya jika dilihat, dengan waktu dan tempat berbeda, tetapi dengan 1 pemikiran bahwa

dalam pengelolaan website Pemerintah Daerah yang seharusnya memberikan efek transparansi informasi serta untuk memacu partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya (pencapaian sebagai sarana public relation) dianggap belum terwujud seutuhnya. Tujuan pemerintah memang untuk memberikan transparansi informasi dengan penyediaan website ini, namun apakah arti sebuah transparansi jika pengenalan terhadap akses web tersebut belum disosialisasikan secara serius. Maka dari itu, terlepas dari argument pemerintah desa terkait hal tersebut, 5 informan yang merupakan mahasiswa asli bone yang bermukim di wilayah kabupaten kota bersedia memberikan pernyataannya terkait pengelolaan website pemerintah daerah. Selain itu, dari 5 Sample Informan yang mengambil pernyataan Mahasiswa, hanya 1 yang mengetahui pasti tentang keberadaan Website Pemda. 4 lainnya mengakses informasi melalui Instagram “Bone Terkini” dan juga Facebook. Menyimpulkan apa yang dikatakan 4 informan yang kurang lebih sama pendapatnya bahwa sama sekali tidak mengetahui adanya Website Pemda, dan dalam kegiatan penelitian yang memerlukan data mereka akui kesulitan memperolehnya (padahal sebenarnya dapat diakses pada website jika tersedia data yang diinginkan). 4 Informan tersebut yaitu Irfan (Mahasiswa IAIN Bone), Andi Ichsan (Taruna PIP Makassar asli Bone), Waliansyah Maulana (Mahasiswa UMI) dan Andi Juanda (Mahasiswa UNM). 4 Informan tersebut tidak dapat ditanyai lebih lanjut karena benar-benar tidak mengetahui keberadaan website Pemda. Namun harapannya Website Pemda dapat lebih diperkenalkan lagi entah itu dengan Sosialisasi di kampus-kampus seperti IAIN Bone, dan sebagainya.

1 Informan yang merupakan Mahasiswa UNM berdarah asli Bone, Andi

Mahdi Sahdani mengatakan:

“saya sudah mengetahui terkait Website Pemda dimana secara tidak sengaja saya ingin mengakses informasi terkini tentang Kabupaten Bone, dan menulis pada Keyword Google dan muncul portal yang mengarahkan kepada *bone.go.id*, secara kebetulan saya mencari informasi tentang Kab. Bone sekaligus mencari website instansi/dinas Kab. Bone dan ternyata sudah tercover semuanya pada website Pemda” (6/01/2020)

ia menambahkan :

“website Pemda seharusnya dapat lebih uptodate, system website yang digunakan masih menggunakan fitur lama sedangkan sudah banyak yang menggunakan lebih modern, yang lebih mudah diakses dan gampang. Saya juga lihat dari Website Instansi-Instansi kurang lengkap dan sulit dihubungi kontak yang disediakan pada portal web (Kurang responsive) karena saya pernah mencoba. Jadi bisa dikatakan website untuk menyediakan informasi, tetapi hanya mengandalkan informasi 1 arah, jadi ketika ingin dihubungi untuk hal lebih lanjut, tidak ada respon” (6/01/2020)

Andi Mahdi mengakui bahwa adanya Website yang dihadirkan belum dapat menjadi jawaban atas kebutuhan informasi masyarakat dan belum terjalin seutuhnya hubungan antara masyarakat dan pemerintah melalui website ini. Namun ia pun menuturkan sudah ada beberapa Instansi/Dinas yang merespon itupun melalui Sosial Medial bukan dari Website.

Yasri menawarkan :

“Harus mensosialisasikan, semua elemen/SKPD bisa membantu memperkenalkan jika turun Musrenbang di Kecamatan, dan kami siap membantu Sosialisasi yang dimulai dari kegiatan Posyandu Masyarakat karena dominan masyarakat hadir ketika kegiatan Posyandu”

Beliau berharap Informasi yang disajikan Website Pemda harus lebih lengkap, Akuntabel, dan terupdate.

2) Efektivitas pengelolaan Website Pemerintah Daerah dalam menjalin hubungan masyarakat

1. Sumber Daya Manusia Pengelola website pemda / kinerja pegawai internal Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Dalam ruang lingkup pemerintahan, seorang pegawai dituntut untuk memiliki SDM berkualitas agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, olehnya itu, saat ini dalam menjadi seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) harus melewati rangkaian tes sesuai dengan standar yang ditetapkan Nasional.

Dalam Penuturan Kabid Teknologi Informasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone mengatakan :

“Hambatan saat ini adalah SDM yang kami miliki, bahwa di era sekarang dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat serta pengelolaan website yang tidak semudah dipikirkan, maka untuk saat ini merupakan pencapaian yang paling baik ditengah SDM yang kami akui masih kurang” (24/01/2020)

Selain itu, Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone menjawab segala yang menjadi indikator SDM ini tertuang dalam sub

bab permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone berkaitan dengan isu-isu penting permasalahan yang memerlukan perubahan dan penyempurnaan dimasa yang akan datang sebagai berikut:

a. Bidang Komunikasi

Belum optimalnya pemanfaatan jaringan dan komunikasi
Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM bidang teknologi yang dimiliki.

Kurangnya pengetahuan dalam bidang informasi dan perkembangan teknologi informasi

b. Bidang Teknologi Informasi

Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM terhadap penggunaan Teknologi Informasi

Belum optimalnya sarana dan teknologi Informasi

c. Bidang Informasi Publik

Belum Optimalnya kerja sama dan koordinasi lintas organisasi Pemerintah serta non Pemerintah

Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM bidang Informasi Publik terkait layanan dan penyediaan akses informasi bagi media

d. Bidang statistik

Perlunya pengembangan sumber data statistik daerah yang lebih efektif dan akurat serta tepat waktu, dan perlunya peningkatan SDM pengelola Statistik Sektoral Daerah.

e. Bidang Persandian

Terbatasnya SDM Aparatur dalam daerah

Kurangnya Sarana dan Prasarana yang mendukung persandian
Sarana gedung yang belum memadai.



Gambar 4.14, Kondisi dan tampak dalam kantor dinas komunikasi informatika dan persandian Kab. Bone



Gambar 4.15, papan struktur organisasi diskominfo

Selain itu, dalam review terhadap Rancangan Awal RKPD juga tertuang dalam Renja Kominfo 2019 dimana menjelaskan bahwa target kinerja tahun 2018 100 % namun pencapaian kinerja hanya 22,7 %. Adapun penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan per indicator adalah:

3. Penetapan target kinerja rendah disebabkan penetapan program dan kegiatan belum sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai sasaran strategis.
4. Anggaran yang tersedia belum mencukupi, sementara kepedulian dari masing masing SKPD untuk membuat/menyediakan sub domain masih rendah.
5. Adanya kegiatan/program yang berjalan tahun 2018 yang tidak dianggarkan pada tahun 2018.

Kabid Teknologi dan Informasi menambahkan

“jika ingin memilih antara SDM dan sarana serta Prasarana, lebih baik SDM yang ditingkatkan dahulu kemudian di tunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai karena buat apa peralatan yang canggih kalau SDM nya tidak mampu mengelola dengan baik”.(24/01/2020)

Sejalan dengan yang dijelaskan Kepala Bidang Teknologi Informasi, bahwa dalam kesempatan kunjungan kedua pada diskominfo 18 Februari 2020, dengan mewawancarai kepala seksi bidang informasi publik, bidang statistik dan juga sub bagian keuangan bahwa hal yang paling banyak dikeluhkan adalah keterbatasan kemampuan sdm dalam mengelola, mengembangkan serta mengoperasikan teknologi jaringan serta statistik (data). Mereka sepakat bahwa keterbatasan tersebut sangat menghambat dan menjadi tantangan diskominfo dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pencapaian sasaran dan target.

Sebagaimana yang dijelaskan Dra. Hj. Arfiah, Kepala seksi pelayanan informasi publik bahwa :

“walaupun dengan jumlah PPID yang sudah tersebut di beberapa kecamatan tetap saja dalam kebutuhan data yang diinginkan dari hasil kerja ppid masih belum terpenuhi. Berulang kali kami kirimkan himbauan untuk segera menyelesaikan data yang kami minta seperti Lakip, profil desa/kec yang tentunya akan di publish pada sub domain website bone.go.id tetap hingga sekarang belum ada. Bahkan pernah kami melakukan kunjungan seperti apa hasil kerja data yang dilakukan tetap saja bilanganya belum selesai dikerjakan. Nah kalau hal seperti itu kami juga tidak bisa memaksakan karena pasti ada kendala yang ditemukan kenapa tidak diselesaikan”(18/02/2020)

Selain itu, Kepala seksi pengembangan sumber daya informasi, Fadli S.E juga mengatakan:

“begitu pula dengan KIM, KIM (kelompok informasi masyarakat) yang dibentuk sejak 2017 lalu, saat ini untuk hasil kinerja yang kami minta belum terlihat hingga sekarang, pembentukan KIM saat ini sudah ditargetkan hingga 17 kecamatan, namun baru dibentuk, tahun ini kami programkan 6 kecamatan untuk pembentukan dan pembinaan, namun untuk hasil kerja KIM tahun lalu belum sepenuhnya dapat dikatakan aktif dalam menjalankan tugas nya di masyarakat”(18/02/2020)

Informan dari Bidang Informasi Publik ini menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab KIM dengan PPID berbeda, walaupun sama sama mengelola informasi, namun perbedaannya terletak pada KIM (kelompok informasi masyarakat) menyampaikan informasi-informasi terkait program pembangunan pemerintah di kecamatan yang masih sulit mengakses internet, mengklarifikasi isu isu politik yang terjadi pada pemerintah, serta mengumpulkan informasi yang dihimpun dari masyarakat. Sedangkan PPID fokus pada pengelolaan data data desa dalam pemenuhan dan penyediaan data pada website. Namun diakui, kedua lembaga ini masih belum dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sesungguhnya. Wawancara kepada bidang informasi public dengan dua kepala seksi dalam

ruangan bersama peneliti berlangsung dengan sesi diskusi menemukan akar permasalahan dari yang saling mendukung satu sama lain.

Selain hal tersebut, pada bidang statistik yang kemampuan SDM didalamnya diharapkan mampu mengelola data dalam hal statistik, Kepala Seksi Seksi data dan SDM mengatakan bahwa :

“kami disini juga terbatas, bisa dilihat dari latar belakang pendidikan dan titel kami di statistic sini, sangat tidak sesuai dengan bidang yang kami kelola. Hanya satu orang yang mampu mengerjakan dan mengolah data karena berdasarkan pengalaman, selebihnya tidak ada pengalam di statistik. Ya tentu saja terjadi di bidang lain juga, saya sendiri berlatar belakang ilmu sosial, kepala bidang berlatar belakang hukum, dan tidak memiliki relasi dari kerja kami yang setiap hari harus mengerjakan data dan mengolahnya. Semua hal ini mau tidak mau kami terima karena ini penempatan dari atas (pusat), suka tidak suka ya ini aturannya, mengikuti dimana kami ditempatkan”(18/02/2020)

Tabel 1. Jumlah SDM Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018 .

No.	Pendidikan	Jumlah	No.	Gol.	Jumlah	No.	Jabatan	Jumlah
1.	SD	-	1.	I	-	1.	Struktural	31
2.	SMP	-	2.	II	4		- Eselon II = 1 orang	
3.	SMA	6	3.	III	22		- Eselon III = 5 orang	
4.	Diploma 1	-	4.	IV	5		- Eselon IV = 18 orang	
5.	Diploma 3	-				2.	Fungsional	

6.	Sarmuda/D3	-						
7.	Strata 1	19						
8.	Strata 2	7						
						3.	Staf	6
	Jumlah	31		Jumlah	31		Jumlah	31

Gambar 4.16, Jumlah SDM (ASN) Diskominfo

Beliau juga menjelaskan, bahwa sudah beberapa kali mengajukan untuk penerimaan pegawai jika ada pembukaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tidak pernah terealisasi sepenuhnya jumlah yang diinginkan. Bahkan bisa dikatakan bahwa jumlah tenaga honorer sebanding dengan PNS (pegawai negeri sipil) diskominfo, dan disetiap bidang paling tidak cuma 1 yang berstatus pns selebihnya honorer. Mereka mengakui bahwa dengan tenaga honorer yang direkrut jauh membantu dan meringankan kerja yang mayoritas kerjanya adalah jaringan, komunikasi, persandian dan statistik dikuasai oleh tenaga honorer. Namun untuk SOP (standar operasional prosedur) sendiri tidak memperbolehkan tenaga honorer untuk menjadi operator, jadi terpaksa 1 pegawai memiliki tanggung jawab yang yang tumpang tindih dalam mengerjakan tugasnya.

NO	NAMA	JABATAN
1	ANDI NIRWANA,SE	OPERATOR SIAKUDA
2	AKMAL,SH	OPERATOR SIMBD
3	DIAN EKA PUTRY,SE	OPERATOR JKS
4	EDY WIJAYA ANNUR,A.Md	TENAGA ADM.UMUM
5	ANDI.MUH.YUSUF MATTUPPUANG,SE	OPERATOR SIAKUDA
6	ARFIANI SOPHIAN,S.Sos	TENAGA ADM.UMUM
7	NURHAENI,S.Sos	OPERATOR JKS

8	A.LIQA ANANSYAH,Amd.Keb	OPERATOR SIPBMD
9	ST.AISYAH,S.Pd	OPERATOR PENGELOLAAN PPID
10	RIZKI KIKI OKTAVIA	OPERATOR SIMBMD
11	RISNA,S.Pd	OPERATOR SIPBMD
12	NIRWANA,S.Sos	OPERATOR SIPPD
13	ERWIN	OPERATOR SIAKUDA
14	AKBAR	PELAYANAN SOUND SYSTEM
15	MUH.SYAWAL BURHAN	PELAYANAN SOUND SYSTEM
16	PARNO	PELAYANAN SOUND SYSTEM

NO	NAMA	JABATAN
17	ANDI JEMMA ANDIKA JUNAILA	PELAYANAN SOUND SYSTEM
18	GUNAWAN,S.Pd	SOPIR
19	ASRI ARENI	TENAGA ADM.UMUM
20	A.SADDANG RAHMAT HIDAYATULLAH	OPERATOR TECHNICAL ENGINEERING
21	ANDI SULISTIANA AMIR,S.Pd	TENAGA ADM.UMUM
22	MUHAMMAD NASBAR	OPERATOR PRODUKSI MULTIMEDIA
23	WAHYUDI,S.KOM	OPERATOR KEPEGAWAIAN
24	AWAL RACHMAT AMAL	OPERATOR ADM.UMUM
25	ZAINAL,S.Sos	OPERATOR KEPALA STUDIO SBB
26	IRBAR JAYA	TEKNISI

27	MUHAMMAD IDRIS,Bsc	REPORTER
28	R.MERY SYAM,S.Pd.i,M.Si	OPERATOR SIARAN RADIO
29	NAIMAH,S.Sos	OPERATOR SIARAN RADIO
30	MUSLIADLING,S.Pd.i	OPERATOR KOMPUTER
31	HERMAN,S.Sos	REPORTER
32	ILHAM	REPORTER
33	ANDI RAFIDAH	OPERATOR SIARAN RADIO
34	EKI SEPTIANTO	OPERATOR SIARAN RADIO
35	MAYAN SYAM,A.Md.Kep	OPERATOR SIARAN RADIO

Table 4.1 jumlah honorer pada diskominfo Kab. Bone

Dapat dilihat bahwa jumlah honorer lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai (ASN). Hal inipun sejalan dengan pernyataan informan bahwa SDM dari segi kuantitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sangat memprihatinkan, dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya mereka akui akan kewalahan dalam pencapaian target, namun dengan usaha kerja sama tim dengan kemampuan honorer yang bahkan diakui lebih baik dibandingkan pegawai berstatus ASN ini, dapat terealisasi walaupun belum maksimal.

Indicator lain penyebab tidak terealisasi nya akses informasi website secara utuh adalah kalangan OPD, bahwa SKPD masih ada yang gagap akan teknologi, hingga kini presentase yang di tuangkan dalam Lakip diskominfo hanya mencapai 30 % SKPD (Satuan kerja perangkat daerah) yang menggunakan website sebagai akses informasi utama pada telepon genggamnya. Oleh karena itu, seperti yang beliau jelaskan sebelumnya, yaitu sebagai bentuk pemberdayaan

SDM internal ruang lingkup SKPD maka diskominfo melakukan bimtek dan bimkhus yang diharapkan mampu meningkatkan kecakapan SKPD dalam memanfaatkan teknologi informasi sehingga dalam pengaplikasian sehari-hari tidak lagi terjadi kesenjangan informasi atau tidak mengerti mengoperasikan, serta diberi lebih banyak ruang dalam berinovasi untuk pengembangan website pemda yang lebih baik.

Dalam kunjungan ke Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone, peneliti juga melihat bahwa peralatan kantor masih sangat kurang, seperti meja customer service, ruangan yang belum dilengkapi AC, dan keadaan kantor seperti bangunan yang tidak selengkap yang menggambarkan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang seharusnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Walaupun dalam renja tercantum pengadaan terdapat dana khusus, masih sangat kurang untuk melengkapi peralatan-peralatan ruangan penunjang peningkatan kinerja pegawai. Karena factor penentu kinerja pegawai juga dapat diukur dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang bisa menjadi penunjang motivasi kerja pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



Gambar 4.17, Kondisi kantor diskominfo yang belum memiliki tata letak sarana prasarana memadai

Sumber daya manusia dalam masyarakat yang perlu ditingkatkan yaitu pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi informasi dalam hal pembentukan KIM (kelompok informasi masyarakat) yang pada tahun 2019 masih berjumlah 8 kelompok di 8 kecamatan dengan anggaran 95.000.000, Pelatihan SDM Bidang komunikasi dan informasi dengan sasaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berjumlah 66 PPID pembantu di targetkan diseluruh wilayah Kab. Bone dengan anggaran 35.000.000 serta melaksanakan Bimbingan teknis untuk SKPD berjumlah 60 orang dengan anggaran 20.000.000.(menurut Lakip diskominfo 2018).

2. Target

Adapun indicator capaian pada tahun 2017 hingga 2019 yaitu:

- a). Realisasi Program /Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
 - I. Pencapaian target kinerja hingga saat ini masih terbatas kompetensi dan kapasitas aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian kab.Bone dari segi kuantitas dan Kualitas dibandingkan dengan beban kerja berdasarkan luas wilayah, khususnya dalam hal penyebaran luasan Informasi.
 - II. Terbatasnya sarana dan Prasarana aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian khususnya ruangan gedung kantor berserta perlengkapan meubelernya (Meja kursi kerja)
 - III. Terbatasnya Anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab.Bone yang dinilainya sekitar 0,3% dari total Anggaran belanja (APBD) pemerintah kab.Bone.
- b). Faktor – Faktor Penyebab Terpenuhinya Target Kinerja
 - I. Dukungan dan komitmen penuh dari unsur pimpinan Daerah (Bupati, Wakil bupati dan sekda) selaku Pengambilan kebijakan tertinggi

dalam pelaksanaan pengelolaan Informasi dan Komunikasi atas penyelenggara urusan pemerintahan daerah di kab.Bone.

II. Motivasi kerja yang tinggi dari seluruh aparatur pada Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian Kab.Bone.

III. Dukungan Kerjasama dan Sinergitas dengan Aparat Eksternal dan Internal Lainnya, baik dengan tingkat propinsi maupun pusat.

c). Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra

Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah terkait dengan Perbandingan Pagu Anggaran Tahun 2017 lebih Besar dibandingkan dengan Pagu Anggaran Tahun 2018 maka Komponen itu mempengaruhi Program dan Kegiatan yang keterbatasan Anggaran sehingga Kegiatan tidak berjalan secara maksimal, jika Penyerapan Anggaran sesuai dengan Perencanaan terkait dengan Program dan kegiatan yang terdapat dalam Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab.Bone.

d). Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu di ambil

Kebijakan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dengan Program Renstra Perangkat Daerah terkait dengan Penentuan isu-isu Strategis Organisasi, diharapkan dapat dikelola dengan baik untuk menjawab tantangan yang ada sehingga Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab.Bone pada lima tahun mendatang dapat menjadi Dinas yang Kinerja Pelayanan dapat dibanggakan serta dapat mendukung terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik dalam melayani masyarakat kabupaten Bone.

Indikator Utama Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab.Bone sebagai berikut :

1. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan terlaksana di tahun 2018 target 6 Kecamatan (6 km) dan realisasi 6 km. 2019 ditargetkan menjadi 8 km, dan tahun 2020 di proyeksi menjadi 10 km.
2. Cakupan Layanan Telekomunikasi berbasis BTS (Base Transceiver Station) sebuah instruktur Telekomunikasi yang memfasilitasi Komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator sudah terjangkau ke 189 wilayah Kab. Bone capaian, target tahun yang akan datang tahun 2019 dan tahun 2020 cakupan layanan telekomunikasi bisa terjangkau disemua wilayah kabupaten Bone.
3. Dalam upaya perencanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan data terkait jumlah penduduk menggunakan HP/telkepon, melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dengan indikator utama target pencapaian ditahun 2017 berhasil mengumpulkan data dari 10 kecamatan dan tahun 2018 ditingkatkan menjadi 15 Kecamatan dan ditahun 2019 meningkat menjadi 20 Kecamatan dan ditahun2020 meningkat hingga 27 kecamatan di Kabupaten Bone.
4. Dari hasil data 10 Kecamatan ditahun 2017 jumlah propersi Rumah Tangga di Kabupaten Bone yang dapat mengakses internet sudah mencapai 229. 438 rumah tangga dan tahun 2018 akan ditingkatkan menjadi 15 Kecamatan dan ditahun 2018 menjadi 20 Kecamatan serta

ditahun 2020 menjadi 27 Kecamatan realisasi 3 tahun mendatang proyeksi Rumah Tangga di Kab. Bone dapat dilihat berapa rumah tangga yang dapat mengakses internet dan berapa rumah tangga yang belum bisa mengakses internet.(Sumber : Renja Kominfo Bone)

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance*, salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi komunikasi dan informasi atau yang populer disebut *e-Government*. Pelaksanaan *e-Government* yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta. Oleh karena itu dalam penetapan tujuan serta target harus diiringi dengan pertimbangan kualitas, kuantitas dan biaya, dimana menurut Onong bahwa harus bersifat Efektif, efisien dan sistematis. Efektif berarti menimbulkan hasil yang sesuai dengan harapan, dan efisien mengandung makna tujuan dicapai secara optimal dengan biaya, waktu dan personel yang minimal serta sistematis berarti penyusunan yang runtut secara saksama.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam semua sub domain dibawah domain induk bone.go.id walaupun secara tidak langsung tugas dan fungsinya tidak bersentuhan dengan prinsip Hubungan Masyarakat, namun bagi admin pengelola website masing-masing secara langsung menerapkan prinsip dan fungsi Hubungan Masyarakat yaitu menjadi jembatan

komunikasi antara organisasi dengan publiknya, menyediakan layanan aduan dan pelaporan dalam menerima kritik serta saran public yang terintegrasi dengan website.

Dari hasil penelitian tampilan website pemerintah daerah Kab. Bone disimpulkan bahwa :

1. Terdapat kurang lebih 17 subdomain website dibawah domain induk www.bone.go.id yang dikelola instansi/dinas masing masing, dengan domain induk dikelola oleh dinas komunikasi informatika dan persandian kab. Bone pada bidang teknologi informasi.
2. Dengan banyaknya subdomain tersebut, namun tanpa sosialisasi dan pengenalan serius kepada masyarakat, ada 2 hal yang akan ditimbulkan, masyarakat yang membutuhkan informasi dan data (memiliki kepentingan) akan kebingungan dengan banyaknya subdomain website yang disajikan, upaya pengaduan online akan diarahkan kemana, dan kemana mereka akan mencari informasi dan data tersebut.

1) Strategi

Menurut Anshori (2014: 20-22), jenis jenis strategi terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a). Klasifikasi berdasarkan ruang lingkup, strategi ini merupakan strategi utama (induk). Strategi ini bisa dirumuskan lebih sempit seperti strategi program dan dapat dirancang sebagai sub strategi.

b). Klasifikasi berdasarkan tingkat organisasi, misalnya dalam perusahaan yang terdiri atas sejumlah divisi yang sekurang-kurangnya dua tingkat, yakni strategi kantor pusat dan strategi divisi.

c). Strategi pribadi pimpinan, strategi ini bersifat mendasar, biasanya tidak tertulis dan ini merupakan kerangka untuk mengembangkan strategi instansi.

1). Tujuan dan Program

Setiap organisasi perlu melakukan suatu perencanaan dalam setiap kegiatan organisasinya, baik perencanaan produksi, perencanaan rekrutmen karyawan baru, program penjualan produk baru, maupun perencanaan anggarannya. Perencanaan (planning) merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya 1). Oleh karena itu, perusahaan/lembaga harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses-proses perencanaan. Perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah/dinamis 2). Dalam era globalisasi ini, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis dan bukan hanya pada intuisi dan firasat (dugaan) 3). Salah satu maksud dibuat perencanaan adalah melihat program-program yang akan dijalankan untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan-tujuan organisasi di waktu yang akan datang. Perencanaan organisasi harus aktif, dinamis, berkesinambungan dan kreatif, sehingga manajemen tidak hanya bereaksi terhadap lingkungannya, tapi lebih menjadi peserta aktif dalam dunia usaha 4). Pokok pembahasan dalam paper

ini berfokus pada pengenalan konsep perencanaan, alasan pentingnya perencanaan dalam mencapai tujuan dan bagaimana mengefektifkan perencanaan tersebut.

Berkaitan dengan hal di atas, maka penetapan tujuan dan program sangat penting dilakukan sebagai tahap perencanaan dalam menentukan langkah apa yang akan ditempuh untuk pemenuhan peran dalam suatu instansi/lembaga. Tujuan dan program yang disusun oleh dinas komunikasi informatika dan persandian Kab. Bone merupakan hasil dari telaah renstra dan diturunkan dari visi misi pemerintah Kab. Bone serta dianggap penting untuk dijadikan program sebagai wujud pemenuhan peran dalam fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone.

Tujuan dan Program kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone dituangkan pada naskah Rencana Kerja tahun 2019 dimana mengandung 5 bab terkait dengan tujuan dan program, evaluasi serta pendanaan. Olehnya itu, dalam indikator ini acuan utama perolehan data adalah Renja Diskominfo tahun 2019.

Hal tersebut didasarkan pada Kebijakan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone yaitu kebijakan atas Penyelenggaraan daerah kemudian juga pada peraturan Presiden nomor 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014 yang menyatakan bahwa pemerintah Daerah menjabarkan dan melaksanakan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui

aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk didalamnya pungutan liar dan gratifikasi.

Selain itu, juga terdapat program nasional yaitu dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan peraturan menteri PAN dan RB nomor 1 tahun 2012 tentang pedoman penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi kemudian pada peraturan Menteri PAN dan RB nomor 30 tahun 2012 tentang pedoman pengusulan, penetapan dan pembinaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah serta peraturan Menteri PAN dan RB nomor 31 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penilaian Mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi secara Online.

Namun, hingga saat ini program dan kegiatan yang terkait dengan kebijakan Nasional tersebut belum terlaksana secara optimal. Kedua kebijakan dan program nasional diakui masih menjadi pekerjaan rumah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang perlu dijadikan sebagai salah satu prioritas dalam rencana kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone. Dalam pelaksanaannya, diperlukan komitmen, konsisten, dan konsistensi seluruh jajaran pemerintah Kab. Bone disertai dukungan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya dalam penerapan pengendalian internal dalam penyelenggaraan setiap urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bone.

Saat ini, untuk penetapan program-program yang dianggap dibutuhkan pada setiap bidang masih berkisar membutuhkan segalanya, dan untuk mengukur skala prioritasnya, berdasarkan penelitian, Informan-informan lebih

menitikberatkan pada pengadaan barang, peralatan, sarana dan prasarana yang memadai untuk kebutuhan kantor yang dinilai masih pada tahap melengkapi, membangun dan merenovasi bangunan yang lebih layak. karena untuk menjadikan prioritas secara bersamaan antara peningkatan SDM dan Sarana serta Prasarana akan sangat susah menyeimbangkan mengingat dana yang dinilai kurang mencukupi dengan banyaknya tugas serta fungsi yang sehari hari harus dijalankan.

2). Sosialisasi dan Pengenalan Website kepada masyarakat

Pengertian sosialisasi menurut Charles R Wright yang dikutip oleh sutaryo adalah “Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain”. Berdasarkan uraian diatas terdapat persamaan mengenai sosialisasi, terletak pada objek dari sosialisasi yaitu masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Jadi, dalam sosialisasi terdapat interaksi antara manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok dalam masyarakat ialah karena kedua sifat dari manusia yang bertentangan satu sama lain, disitu pihak ingin bekerjasama, di pihak lain cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia untuk dapat berkuasa. Kekuasaan merupakan kajian dan konsep dari politik mengenai hubungan sosialisasi.

Oleh karena itu, pada proses politik Pemerintah Daerah yang harus bersinergi dengan penetapan program yang akan dilakukan, sangat lekat dan

penting untuk mengadakan sosialisasi serta pengenalan kepada masyarakat dimana masyarakat sebagai penerima dampak dan akan menjadi pemeran keberhasilan program tersebut. Website Pemerintah Daerah Kab. Bone telah banyak berkontribusi aktif dalam penyebarluasan informasi untuk mencapai transparansi di tingkat Daerah. Namun, saat ini dengan banyaknya gelar dan prestasi yang diraih sejak 2016 khususnya pada Website Pemda, tetap saja tak dapat dipungkiri bahwa masih banyak yang belum mengetahui adanya website ini. Yang mengetahui jelas keberadaan website ini hanyalah ruang lingkup internal pemerintah Kab. Bone (itupun untuk penggunaan dari SKPD belum maksimal), namun masyarakat sebagai sasaran dalam menjalin hubungan antara masyarakat dan pemerintah belum sepenuhnya terpenuhi. Hal tersebut terbukti dalam penelitian ini, bahwa dari Kepala Desa, Perwakilan Organisasi Perempuan dan Mahasiswa yang notabennya membutuhkan akses data yang lebih lengkap serta informasi yang akurat masih mempertanyakan keberadaan website ini, dan para informan ini memiliki harapan yang sama dalam membentuk eksistensi website ini hingga dikenal lebih luas lagi oleh masyarakat hingga ke 27 Kecamatan perlu dilakukan sosialisasi dan pengenalan secara serius.

Menurut Sutaryo, Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.

Pengertian tersebut, menjadi gambaran bahwa sosialisasi penting dalam berperan membangun interaksi dengan masyarakat, mendapat respon terkait system yang diperkenalkan, sehingga dengan adanya sosialisasi ini dapat terbentuk citra atas system itu pada lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman serta kepribadian yang menjadi pembanding keberhasilan atas system tersebut.

Sosialisasi apabila dikaitkan dengan prosesnya, terdapat jenis-jenis sosialisasi. Menurut Peter L Berger dan Luckman terdapat 2 jenis sosialisasi yaitu:

- a). Sosialisasi primer, sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi ini berlangsung pada saat kanak-kanak.
- b). Sosialisasi sekunder, adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisai primer yang memperkenalkan individu kedalam kelompok tertentu dalam masyarakat.

Kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat kerja. Dalam keduanya institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dan jangka waktu tertentu, bersama-sama menjalani proses kehidupan dan diatur secara formal.

Dalam hasil penelitian terdahulu yang dijadikan bahan rujukan oleh peneliti, seperti pada penelitian “peran humas pemerintah kabupaten Sragen dalam pengelolaan isi informasi website pemda sebagai media communicatios relations dengan masyarakat” oleh Meilyna Diah Anggraini menyimpulkan bahwa untuk lebih menyadarkan masyarakat akan kemudahan penggunaan media online

dibutuhkan partisipasi dari pemerintah untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga hubungan komunikasi yang diterapkan dapat tercipta yaitu hubungan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi pusat permasalahan dalam penelitian ini yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat baik untuk mengenalkan website yang dikelola pemerintah daerah bertujuan untuk apa, pentingnya menjadi masyarakat yang tahu akan program pembangunan yang dilakukan pemerintah, serta dalam kesadaran masyarakat akan kemudahan akses informasi agar terbangun masyarakat yang kritis dan memiliki kepedulian akan pembangunan di kota/kabupaten/desa tempat mereka bermukim. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu saja membutuhkan partisipasi pemerintah, kalangan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang mau tidak mau, suka tidak suka dalam kehidupan pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari perannya untuk setiap harinya dapat bersosialisasi dan berbaur kepada masyarakat.

Hal tersebut juga menggambarkan bahwa sosialisasi dapat dilakukan dari hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat dilakukan oleh segala lapisan masyarakat dalam kadar kepentingannya. Olehnya itu, berdasarkan hasil penelitian bahwa banyak harapan masyarakat yang tersimpan dalam ruang lingkup mereka, yang belum sempat tersampaikan dalam forum resmi ataupun tidak resmi, akan tetapi secara mendalam bahwa mereka membutuhkan pengenalan dan sosialisasi di wilayah mereka. Walaupun telah dilakukan bimbingan teknis dan bimbingan khusus, tetapi kembali lagi sasaran antara bimtek dan bimkhus ini berbeda dengan sosialisasi. Dimana sosialisasi merupakan bentuk pengenalan

awal dari system yang ditawarkan, sedangkan bimtek dan bimkhus dilaksanakan untuk meningkatkan kecakapan dan kemampuan para pengguna dan pengelola untuk lebih mengerti dan tahu akan pemanfaatan website ini. Umumnya, Bimtek dan Bimkhus dilaksanakan setelah adanya sosialisasi dan pengenalan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut sosialisasi memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan masyarakat yaitu:

- 1) Memberikan dasar atau kondisi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat.
- 2) Memungkinkan lestarnya suatu masyarakat karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja hingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa melalui sosialisasi masyarakat dapat berpartisipasi untuk kepentingan hidupnya dan menciptakan generasi untuk kelestarian kehidupan selanjutnya. Selain itu, dapat factor lain yang menunjang proses sosialisasi yaitu faktor lingkungan, dimana didalamnya interaksi sosial. Interaksi sosial inilah yang kemudian akan membangun hubungan antara pemberi informasi dan penerima informasi. Pemberi informasi adalah penyelenggaraan dari system tersebut, sedangkan penerima informasi adalah masyarakat yang akan menerima informasi tersebut. Hal ini lah yang disebut sebagai public relations.

Selain factor lingkungan terdapat factor-faktor lain yang mempengaruhi sosialisasi, diantaranya adalah:

- a) Apa yang disosialisasikan, merupakan bentuk informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai-nilai, norma-norma dan peran.
- b) Bagaimana cara mensosialisasikan, melibatkan proses pembelajaran.
- c) Siapa yang mensosialisasikan, institusi, media massa, individu dan kelompok.

Agen sosialisasi merupakan peran utama dalam keberhasilan proses sosialisasi untuk menyebarkan atau menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang terletak dalam materi sosialisasi. Keberhasilan terdapat ditentukan oleh mekanisme yang terencana dan digambarkan dalam pola proses sosialisasi yang baik. Apabila proses-proses tersebut dapat tersusun maka penyebaran informasi mengenai materi sosialisasi dapat dengan tepat disampaikan kesasaran sosialisasi.

Membahas mengenai agen sosialisasi, dapat dikatakan bahwa pembentukan KIM merupakan langkah awal untuk melahirkan agen sosialisasi dimasyarakat. Kelompok informasi masyarakat dibentuk berdasarkan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika nomor 08 tahun 2010 tentang pemberdayaan, pedoman dan pengembangan informasi, yang menginstruksikan adanya pembentukan KIM disetiap kecamatan demi terjalinnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Pembentukan kim ini diberikan kewenangan kepada pemerintah desa memilih kelompok informasi tersebut yang merupakan masyarakat local asli desa, dengan begitu, sosialisasi dan pengenalan akan website ini sebenarnya bisa dilakukan dari tingkatan kim tanpa harus menunggu tim kabupaten, bahwa sudah menjadi tugas dan fungsinya untuk menyebarkan informasi yang dianggap perlu untuk diketahui masyarakat, selain itu secara

hubungan emosional antara kim dengan masyarakat itu sendiri sudah terjalin sebelumnya karena dalam keseharian bahkan bermukim dalam lingkungan yang sama.

2) Efektivitas

Menurut Sondang dalam Othenk (2008: 4), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdurahmat dalam Othenk (2008: 7), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Dari hasil Penelitian bahwa Website Pemda sebagai sarana Public Relations saat ini belum terbangun sepenuhnya. Dalam proses perjalanan pengembangan Website Pemerintah Daerah *www.bone.go.id* banyak menemui hambatan dan tantangan. Hambatan dan tantangan tersebut dipengaruhi oleh factor eksternal dan internal. Disamping itu, dalam pembentukan struktur Dinas

Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone yang sejak 2016 harus mampu berdiri dan bersaing serta menyamaratakan kedudukan dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten lain yang sudah lebih dahulu mencetak eksistensinya pun menjadi tantangan yang lain. Karena di era sekarang, mau tidak mau, suka tidak suka, tanpa pandang bulu bahwa Pemerintah kini dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman yang dinamis serta berubah-ubah. Hari ini boleh jadi yang terjadi tren informasi A, besok bisa berubah kearah sebaliknya.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone dapat dikatakan harus berlari lebih keras untuk menyamaratakan kedudukan dan langkahnya dengan mengelola Website Pemda sebagai media informasi terpercaya dan terdepan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam segi informasi dan data. Dalam prosesnya, hambatan internal dan eksternal tidak dapat dihindari, dimana Internal mencakup SDM yang ada didalamnya, dana yang digelontorkan serta factor kesiapan dari segi sarana serta prasarana kantor dalam menunjang pengelolaan tersebut. Hambatan eksternalnya tentu saja adalah Masyarakat itu sendiri, dimana Masyarakat terbagi atas dua tipe yaitu Masyarakat yang tidak ingin tahu apapun dan Masyarakat yang ingin tahu serta merasa memiliki kepentingan. Tetapi, Masyarakat yang tidak ingin tahu apapun ini tidak dapat sepenuhnya dijustifikasi bahwa apatis, bisa karena factor tidak mengetahui dengan pasti (malas mencari tahu), benar benar tidak mengetahui keberadaanya, ataupun tidak mengetahui cara memanfaatkan teknologi (masyarakat awam). Sehingga kedua factor inilah yang bagaikan bom waktu, yang sewaktu-waktu dapat saling

bertabrakan dan menciptakan kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat. Kesalahpahaman ini terjadi akibat kurang terjalinnya hubungan antara masyarakat dan pemerintah yang sering saling menjustifikasi satu sama lain.

1). Target (kualitas, kuantitas, waktu)

Evaluasi terhadap capaian rencana kerja tahunan untuk memperoleh gambaran mengenai pencapaian target kinerja sasaran strategi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone pada tahun sebelumnya, untuk selanjutnya dinilai hasil capaian kerjanya dan dipelajari hambatan serta kendala yang ada guna perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya. Proses evaluasi ini dilakukan terhadap capaian kinerja antara dinas komunikasi informatika dan persandian Kab. Bone dengan Bupati Bone selaku pemberi amanah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kab. Bone.

Dalam Evaluasinya yang terangkum pada hasil penelitian, bahwa tidak dapat dihindari tantangan dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program ini. Walaupun yang dibahas dalam hal ini terkait dengan pengelolaan website pemerintah daerah, tetapi ketika terjadi kendala pada satu program dimana program ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain, bahwa jelas sampai pada pengaruh pengelolaan website pemerintah daerah ini. Dimana dalam rencana diskominfo 2019, capaian program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja terdapat 3 poin umum yakni terbatasnya kompetensi dan kapasitas Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dari segi kualitas dan

kuantitas dengan mengingat beban kerja berdasarkan luas wilayah, khususnya dalam hal penyebaran informasi, terbatasnya sarana dan prasarana aparatur Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian serta terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diskominfo yang dinilainya sekitar 0,3 % dari total anggaran belanja (APBD).

Selain itu, dari segi pencapaian realisasi anggaran sepenuhnya tercapai hamper 100 % namun anggaran banyak digunakan pada sarana dan prasarana kantor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target disimpulkan sebagai Kekuatan dan kelemahan organisasi berdasarkan aspek strategis yang berpengaruh dalam pelaksanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone :

a) Faktor Internal, Kekuatan organisasi secara internal,yaitu :

3. Dukungan dan Komitmen penuh dari unsur Pimpinan daerah (Bupati, wakil Bupati dan sekda) pengambil Kebijakan tertinggi dalam pelaksanaan pengelolaan Informasi dan Komunikasi atas penyelenggaraan Urusan pemerintahan Daerah di Kabupaten Bone.
4. Motivasi Kerja yang Tinggi dari seluruh aparatur pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian kabupaten bone
5. Dukungan Kerjasama dan Sinegritas dengan aparat Eksternal dan Internal lainnya, baik di Tingkat Provinsi maupun Pusat;

Kelemahan organisasi secara internal, yaitu :

6. Masih terbatasnya kompetensi aparatur pemerintah dari segi kuantitas dan kualitas dibandingkan dengan beban kerja berdasarkan kemampuan SDM yang ada, khususnya dalam hal: Pelaksanaan terhadap administrasi perkantoran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Pelaksanaan konsultasi dalam penyusunan dokumen perencanaan beserta laporan capaian kinerja dan keuangan, dan juga pengelolaan keuangan dan asset daerah;
7. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian khususnya ruangan Gedung Kantor beserta Perlengkapannya Meubeleurnya (Meja dan kursi kerja).
8. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang nilainya sekitar 0,3% total anggaran belanja (APBD) Pemerintah Kabupaten.

b) Faktor Eksternal, Kekuatan organisasi secara eksternal, yaitu : Dukungan dan komitmen secara penuh dari Bupati Bone selaku pengambil kebijakan tertinggi dalam pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian kabupaten Bone atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Bone; Dukungan kerjasama dan sinergitas dengan Aparat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dan Eksternal lainnya, baik dengan BPK-RI, BPKP, Muspida dan Dinas Komunikasi dan Persandian, dan Motivasi Kerja yang tinggi dari seluruh aparatur pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone.

Kelemahan organisasi secara eksternal, yaitu :

- a). keberhasilan program tidak didukung dengan pengetahuan masyarakat terkait dengan pencapaian target dan program diskominfo
- b). Komitmen dan Konsisten jajaran pimpinan pada SKPD Lingkup Kabupaten Bone yang masih rendah untuk melaksanakan penyelenggaraan Urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuandari segi kuantitas dan kualitas dibandingkan dengan beban kerja berdasarkan luas wilayah, khususnya dalam hal penyebaran Informasi.
- c). Tujuan dan Program diskominfo banyak terkait dengan pemanfaatan jaringan dan akses internet, dan untuk saat ini dengan luas administrasi kabupaten bone dengan 27 kecamatan masih ada daerah yang belum terjangkau jaringan / akses internet.

2). Sumber Daya Manusia/Pemberdayaan

Manusia merupakan komponen penting dalam organisasi yang akan bergerak dan melakukan aktifitas untuk mencapai tujuan. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. SDM akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka. Biasanya, pengembangan SDM berbasis kompetensi akan mempertinggi produktivitas karyawan sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi pula dan berujung pada puasnya pelanggan dan organisasi akan diuntungkan. Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut.

Menurut Veithzal Rivai, SDM adalah seorang yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Selain itu sumber daya manusia merupakan salah satu unsur masukan (input) yang bersama unsur lainnya seperti modal, bahan, mesin dan metode/teknologi diubah menjadi proses manajemen menjadi keluaran (output) berupa barang atau jasa dalam usaha mencapai tujuan perusahaan.

Kapabilitas sumber daya manusia yang berorientasi pada pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) yang akan menentukan berhasilnya seseorang menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya secara optimal. Masalah sumber daya manusia masih menjadi sorotan dan tumpuhan bagi perusahaan untuk tetap dapat bertahan di era globalisasi. Sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan perusahaan. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber dana yang berlembaban, tetapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang andal kegiatan perusahaan tidak akan terselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa keterbatasan mendalam Diskominfo dalam menjalankan dan merealisasikan tujuan dan programnya termasuk memaksimalkan kerja Website sebagai sarana online Public Relations serta dikenal masyarakat luas hingga lapisan terkecil masyarakat adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia. Ini bukan hal yang baru dijumpai dalam proses kerja organisasi/instansi/lembaga. Sejak sebelum teknologi berkembang pesat seperti sekarang, hal fundamental yang sering menjadi tantangan dalam perwujudan

tujuan dan program organisasi adalah SDM. Hal inipun memberikan fakta bahwa Sumber Daya Manusia menjadi factor penentu keberhasilan kerja suatu organisasi/lembaga.

Dalam penelitian “Website Pemerintah Daerah sebagai sarana online public relations” oleh Liliek Budiastuti Wiratmo menyimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan website menjadi masalah yang dihadapi beberapa pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena sebagian pemerintah daerah menempatlan pengelolaan website di bagian humas Sekda sehingga kesulitan untuk mendapatkan tenaga yang berlatar belakang pendidikan IT. Merujuk dari hal tersebut, bahwa dalam penelitian terdahulu tersebut dimana website pemda dikelola oleh humas sekda yang secara langsung humas inilah yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat masih kesulitan dalam hal kemampuan SDM nya yang tidak berlatar belakang IT pada instansi tersebut, begitupula pada dinas komunikasi informatika dan persandian yang menjadi admin pengelola website induk pemerintah daerah tidak menjamin bahwa pada dinas ini memiliki kecakapan dan kemampuan SDM khususnya dalam IT, karena fakta di lapangan bahwa banyak penempatan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa kuantitas SDM ASN (Aparatur Sipil Negara) sebanding dengan jumlah honorer diskominfo. Dan yang lebih jauh dari aturan, bahwa “the right man on the right place” tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kabid Teknologi Informasi, Bidang Statistik, dan Bidang Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menjelaskan bahwa teknologi adalah hal yang sangat gampang berubah tren, tidak dapat dibaca dengan pasti seperti apa teknologi kedepannya, tetapi yang pasti, ditengah teknologi yang kian pesat tersebut, SDM tidak serta merta gampang menyesuaikan dengan keadaan, olehnya itu sangat dibutuhkan SDM yang memiliki kualitas, berinovasi tinggi, dan mampu menyesuaikan dengan cepat.

Olehnya itu, sebagai solusi dalam meningkatkan kapasitas kemampuan SDM khususnya dalam internal diskominfo, adalah dengan melakukan bimbingan teknis dan bimbingan khusus seperti apa yang dijelaskan kabid teknologi dan informasi pada hasil penelitian. Hal ini dilakukan agar SKPD dalam mengelola website instansi masing-masing sudah mampu mengoperasikan, mengelola dan memantau penyajian informasi didalamnya. Bahwa beliau juga menjelaskan, dibandingkan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, akan lebih baik jika kualitas SDM yang diperbaiki terlebih dahulu. Hal ini tentu saja memberikan kesimpulan bahwa SDM sangat penting bagi roda kerja organisasi/instansi/lembaga. Bimbingan teknis dan bimbingan khusus ini bukan hal yang baru diterapkan dalam diskominfo, sejak 2018 lalu sudah menganggarkan dengan mengirim skpd diskominfo untuk pelatihan dan kunjungan pada instansi/dinas yang lebih baik dari segi SDM serta sarana dan prasarananya. Namun, di akui oleh sub bagian keuangan bahwa bimtek dan bimhusus yang dilakukan 2018 lalu masih sulit untuk ditemukan tindak lanjut programnya,

karena untuk bimtek dan bimkhus kepada kim serta ppid pun harus memanggil ahli dari luar sebagai pemateri.

Olehnya itu, diharapkan bahwa program yang di diprogramkan dalam renja seharusnya bisa ada tindak lanjut sebagai hasil/dampak dijalankan program tersebut, karena ketika program hanya sekedar dijalankan untuk menghabiskan anggaran namun tidak serius pada upaya umpan balik kepada masyarakat, maka bisa dikatakan bahwa mulai penyusunan rencana kerja hingga pencapaian sasaran hanya formalitas belaka.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Website yang telah dibangun dengan tujuan memberikan layanan standar kepada publik juga dapat menyampaikan berbagai hal yang menjadi kebutuhan masyarakat yang kian meningkat. Dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan meningkatnya rasa hak untuk tahu (*right to know*), publik berharap pemerintah sebagai pihak yang mendapat kepercayaan rakyat untuk mengelola negara lebih terbuka dalam memberikan informasi.

Peran pengelola website menjadi kunci untuk membangun online *Public Relations*. Beberapa pemerintah daerah berhasil membangun website dengan tampilan yang sangat menarik namun menjadi tidak berarti karena pengelolaan konten yang kurang baik. Dari pengamatan lapangan salah satu ketimpangan yang akhirnya berwujud pada tumpang tindihnya tugas dan fungsi dalam mengelola website pemerintah daerah karena menyerahkan tugas pengelolaan pada bagian atau bidang yaitu di bidang pengelolaan teknologi dan informasi. Pengelola dapat berada di Dinas Komunikasi Informasi, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang harus diakui bahwa kurangnya koordinasi lebih erat dengan bagian hubungan masyarakat sekretariat daerah. Olehnya itu Dari

Hasil Penelitian disimpulkan bahwa :

- 1). Dalam hal Strategi, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone :

a. Dari segi penetapan tujuan dan program terdapat kekeliruan dalam menetapkan skala prioritas yang tentunya harus sesuai dengan skala kebutuhan dan tingkat urgensi pemenuhan kebutuhan tersebut. Anggaran banyak menghabiskan pada pengadaan sarana dan prasarana khususnya dalam kantor.

b. Terlihat pada indicator sosialisasi/pengenalan website kepada masyarakat tidak dilaksanakan dengan serius walaupun pada tahun 2018 di program dengan dana yang minim dan target yang dianggap tidak tepat sasaran tetap berimbas pada masih banyak masyarakat yang luput akan informasi website pemerintah daerah. Tidak dapat dilupakan bahwa Pemerintah dalam penentuan kebijakan dan program harus melibatkan masyarakat, bahwa dalam proses kehidupan pemerintah harus mempertimbangkan keberadaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Sehingga dengan ketimpangan ini, ruang dan wacana yang tersedia masih didominasi oleh pemerintah daerah. Walaupun telah disediakan layanan pengaduan online dalam menerima kritik dan saran namun kategori informasi dan data serta komunikasi masih memiliki banyak kekurangan dan banyak masyarakat luput akan hal tersebut sehingga memperkecil kemungkinan masyarakat untuk berpartisipasi.

2). Dalam menilai efektivitasnya bahwa :

a. Dari segi pemenuhan indicator target berdasarkan kualitas, kuantitas, dan waktu serta biaya bahwa dalam Lakip (laporan kinerja instansi pemerintah) dari total anggaran pada 2018 sesuai renja terealisasi hamper 100 % pada

setiap pemenuhan program. Namun dari segi kualitas, banyak yang terlihat bahwa pencapaian program ini hanyalah sebagai formalitas belaka tanpa ada dampak secara langsung dan tindak lanjut dari program tersebut. Contoh, dalam pembentukan kim dan ppid yang ditargetkan terealisasi dan terbentuk ppid serta kim pada wilayah yang diprogramkan, tapi hanya sampai pada pembentukan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kim dan ppid ini dapat dikatakan tidak membantu sama sekali dari segi pemenuhan data dan informasi yang dibutuhkan.

b. Hambatan yang paling lumrah terjadi dengan banyaknya ketimpangan yang terjadi adalah keterbatasan kompetensi dan kemampuan SKPD dalam hal pengelolaan dan pengembangan website, hal ini juga mendukung spekulasi dan pendapat masyarakat dalam mengukur kesiapan diskominfo dalam mengelola website ini perlu upaya yang lebih keras untuk tetap berjalan sesuai rencana kerja, serta merancang apa yang benar-benar menjadi kebutuhan informasi dan data masyarakat. Dalam beberapa pendapat stakeholder bahwa upaya menjalin hubungan dengan masyarakat luas melalui Website Pemerintah Daerah ini masih belum optimal serta belum terjalin sepenuhnya komunikasi dua arah antara pemerintah. Dalam hal pembentukan kim dan ppid pun masih dipertanyakan kinerja dan hasilnya, masih ada sikap apatis dari ppid dan kim dalam merespon permintaan dan kebutuhan data diskominfo untuk ditindak lanjuti pada website, sehingga saat ini website pemerintah daerah masih menyediakan data-data lama karena terhambat pengiriman dan penyediaan data dari ppid,

begitupula dengan kim yang setelah pengukuhan kim dilanjutkan dengan bimtek serta bimkhus (dengan perwakilan kim) tidak disalurkan sepenuhnya, karena kim yang berada di kecamatan seringkali mengutus perwakilan yang bukan dari kim itu sendiri, sehingga setelah bimtek dan bimkhus ini tidak ada lagi program tindak lanjut dimasyarakat. Hal ini disebabkan karena yang menghadiri sosialisasi, bimtek, dan bimkhus berbeda dengan orang yang akan bertugas di kecamatan. Masih ada pemikiran-pemikiran apatis dari kim dan ppid untuk mengindahkan tugas dan tanggung jawab sehingga terkesan masih berkedudukan formalitas belaka. Selain itu, kendala terkait SDM yang lain adalah tidak berjalannya “the right man on the right place”, didapatkan bahwa penempatan kemampuan SDM dengan tugas dan fungsinya yang tidak sesuai akibatnya terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi pegawai, berimbas pada tidak maksimalnya hasil kinerja dinas/instansi ini.

Secara umum, dari permasalahan di atas, maka :

- Masih rendahnya sosialisasi Manfaat website ke setiap SKPD dan masyarakat.
- Masih banyak Kecamatan dan Desa desa yang belum terjangkau Jaringan Internet terutama Wilayah Pedalaman
- Mindset Masyarakat tentang akses Internet Masih Rendah

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat, antara lain:

1). Penetapan strategi terlihat dari:

a. penetapan program dan tujuan yang harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan tingkat urgensi, olehnya itu, penetapan program dan tujuan harus benar-benar dipikirkan secara matang yang berorientasi pada kepentingan publik, internal dinas/instansi. Dalam melengkapi sarana dan prasarana kantor bisa dilakukan dengan meminimalisir penggunaan anggaran namun dianggarkan sarana dan prasarana kantor yang berbeda, pemeliharaan jaringan dan pengadaannya bisa dilakukan maksimal, dan dana dapat difokuskan lebih dalam untuk pengembangan website serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait website ini.

b. Sosialisasi pengenalan website perlu lebih ditekankan kembali dalam penyusunan renja selanjutnya, sehingga sistematika implementasi perencanaan dapat tersalurkan dengan baik mulai dari pengenalan/sosialisasi, pelatihan dasar, memberdayakan sumber daya yang mampu bekerja sama dengan diskominfo dengan penyebaran personil KIM (kelompok informasi masyarakat) yang lebih berkualitas di tiap kecamatan Kab. Bone hingga berada pada evaluasi masyarakat terkait kepuasan dalam penyebaran informasi dan data pada website Pemerintah Daerah. Jenis sosialisasi yang ditawarkan adalah dengan lebih membangun koordinasi dengan aparat desa, ppid dan kim yang lebih dipertegas tugas dan tanggung jawabnya (system perekrutan yang ketat). Sebagaimana saran kepala desa dalam hasil penelitian, sosialisasi bisa dilaksanakan dalam tingkatan terkecil, yang dimulai dari posyandu masyarakat (dapat bertatap

muka), pendidik/guru didesa dengan menenkankan pembelajaran teknologi tentang manfaat akses informasi pada website, kelompok kelompok PKK di desa yang padat akan program dan kunjungan untuk pencapaian program kerja juga dapat turut mensosialisasikan manfaat akses informasi pada website khususnya ibu-ibu yang bisa lebih berinovasi dalam mengajukan permintaan publish bahan kerajinan hasil kerja PKK pada website milik Pemerintah Daerah/sosial media lainnya milik pemerintah daerah. Karena mengingat, ada subdomain website yang juga dikelola oleh PKK Kab. Bone dan hal ini juga perlu pengenalan lebih dalam kepada anggota PKK bahwa semua aktivitas PKK dapat dipantau melalui website. Selain itu, mengingat dalam hal kepentingan pembangunan, tidak dapat terlepas dari peran akademisi untuk berpartisipasi dalam program pembangunan, olehnya itu, sosialisasi bisa dibentuk dari perguruan tinggi yang ada di Kab. Bone, membentuk kelompok-kelompok yang dapat membantu proses sosialisasi hingga ke pelosok yang tentunya memiliki kepedulian akan hal tersebut.

2). Menilai tingkat efektivitasnya:

a. pencapaian target sebaiknya lebih memperhatikan tingkat kualitas, kuantitas dan waktunya sehingga dana yang tersedia dapat digunakan dengan lebih bijak serta eifisien, selain itu dampak yang diperoleh masyarakat pun bisa bernilai positif, dengan harapan hubungan antara masyarakat dan pemerintah dapat terjalin lebih baik lagi, masyarakat tidak berprasangka negative terhadap citra pemerintah yang banyak memberi

kesan kaku dan tegang. Dengan begitu, masyarakat pun tidak akan sungkan dalam memberikan saran, ide serta aspirasinya dalam hal pembangunan. Selain itu, Menurut masyarakat bahwa masih ada data yang ingin diakses dalam website namun belum tersedia, kurang responsive dalam menerima pengajuan informasi serta data data lama yang perlu di update kembali.

b. Peningkatan SDM baik dari internal dinas/instansi OPD tentang akses informasi melalui internet, dan dari masyarakat yang perlu diberdayakan untuk melahirkan pelaku pembangunan yang aspiratif, berwawasan dan penuh kreatifitas. Hal ini bisa dilakukan dengan pembentukan kelompok peduli informasi dari kalangan akademisi, merekrut mahasiswa dari perguruan tinggi di Kab. Bone dengan perekrutan yang ketat. Selain itu, jika memang dianggap perlu diadakan studi banding/kunjungan ke instansi yang dianggap memiliki pengelolaan website yang unggul dan handal, peneliti menyarankan untuk berkunjung ke luwu timur sebagai pemenang website terbaik tingkat provinsi Sul-Sel, dengan begitu biaya yang digunakan dapat diminimalisir karena berada pada wilayah Sul-Sel (dekat dengan wilayah Kab. Bone). karena menurut pengamatan peneliti, pernah dilakukan studi banding ke Bali yang tidak jelas arah dan pencapaian tujuannya, ringkasnya, untuk apa jauh jauh belajar jika ada wilayah yang lebih mudah dijangkau dan dekat serta biaya yang digunakan pun terbilang sedikit dibandingkan keluar pulau Sulawesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, 2002. Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah. Jakarta: Media Sarana Press.
- Ahmadi, Abu, Uhbiati Nur. 2001. Psikologi Sosial. Jakarta : Rineka Cipta.
- Anshori, Sutaryo. 2004. Dasar-Dasar Sosialisasi. Jakarta : Rajawali Pres.
- Bungin, Burhan. 2007. Ilmu Komunikasi. Surabaya : Dakwah Digital Press
- Cutlip, M, Scott, Center. H. adlent, Broom. M. Glen. Efektifitas Publik Relation. Kencana: Prenada Media Group. 2006
- David, Fred R. 2011. Strategic Management Computers in Human Behavior. Grunning JE : New York
- Dozier. 2005. The Organization of Public Relations. New York : Grunning JE.
- Downey, Robert Jr. 2010. Politics and Superheroes. New York : Grunning JE
- Dwiyanto. 2011. Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Effendi, Onong Uchjana, Hubungan Masyarakat, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1981
- Hidayat. 2004. Teori Efektivitas dalam kinerja Karyawan. Yogyakarta : Gajah
- Krina. 2003. Indikator Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta : UNDP
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. 2006. Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks: SAGE Publications Inc. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Marrus. 2002. Desain Penelitian Manajemen Strategik. Jakarta : Gramedia
- McLuhan, Marshal. 2007. Understanding Media. New York : MIT Press
- Merdiasmo. 2012. Otonomi dan Manajemen. Andi : Jakarta
- Robinson, Pearce II. 2008. Manajemen Strategis. Jakarta : Salemba Empat
- Rangkuti. 2013. Analisis Swot. Jakarta : Bumi Aksara
- Sudarsono. 2004. Pengantar Sosialisasi. Jakarta : Gramedia
- Syamsi, Ibnu. 2000. Pengambilan Keputusan Sistem Informasi. Jakarta: Bumi Aksara
- Sutopo, 2002. Penelitian Kualitatif. Jakarya : Bumi Aksara
- Syafiie. 2003. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : Gramedia
- Soekamto, Soerjono. 2003. Sosiologi Hukum dalam masyarakat. Jakarta : Rajawali
- Siagian. 2008. Manajemen suatu Pengantar. Jakarta : Ghala Indonesia
- Sedarmayanti. 2006. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung : Mandar.
- Veithzal Rivai. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Peraturan:**
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Republik Indonesia,
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang- Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Pers

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 Tentang Kebebasan Berpendapat
Peraturan Bupati Surat Keputusan nomor 76 tahun 2016
Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang
Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 30 tahun 2012 tentang pedoman pengusulan, penetapan dan pembinaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah
Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 31 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penilaian Mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi secara Online.

Jurnal :

- Anderson, T. B. "E-government as an anti-corruption strategy." *Information Economics and Policy*, 2009: 201–210.
- Asydhah, Arifin. *Lengkap dan Akurat di Website Pemerintah*. 2013. <http://www.setkab.go.id/artikel-6652-lengkap-dan-akurat-di-websitepemerintah.htm> (accessed April 23, 2014).
- Ishak, Aswad. (2012). *Peran Public Relations dalam Komunikasi Organisasi. Jurnal Komunikasi (ASPIKOM)*, Volume 1, Nomor 4, Januari 2012.
- Mossberger, Karen, and Benedict Jimenez. "Can E-Government Promote Civic Engagement? A Study of local government websites in Illinois and the US." *University of Illinois at Chicago*. 2009. <http://www.uic.edu/cuppa/ipce/interior/egovexecsummary2009.pdf> (accessed April 23, 2014).
- Mefalopulos. *Participatory Communication*. Washington D.C: The World Bank, 2009. Wahyuni, S. 2006. *Proses Komunikasi dan Partisipasi dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Kasus Program Raksa Desa di Kecamatan Ciampea*
- Olphert, Wendy, and Leela Damodaran. "Citizen Participation and engagement in the Design of e-Government Services: The Missing Link in Effective ICT Design and Delivery." *Journal of the Association for Information Systems* 8, no. 9 (2007): 491-507.
- Shim, D. C., and T. H. Eom. "E-government and anti-corruption: Empirical analysis of international data." *International Journal of Public Administration*, 2008: 298–316.
- Satriani, I. 2011. *Komunikasi Partisipatif pada Program Pos Pemberdayaan Keluarga (Studi Kasus di RW 05 Kelurahan Situgede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor)*. [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Susanty, E. 2013. *Komunikasi Partisipatif dalam Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Kasus di Desa Dayah Tanoh Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)*. [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

- Susanty, P. 2013. Komunikasi Partisipatif pada Pelaksanaan Program Pendidikan Lingkungan Hidup Green School di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.[tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Tufte T., Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Wiratmo. Liliek Budiastuti, Irfan. Noor, dan Kuwatono, *WEBSITE PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI SARANA ONLINE PUBLIC RELATIONS*, (Semarang : Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang, 2016)
- Suryanintyas. 2012. Strategi Komunikasi Partisipatif. *Journal of tropical Soils*. (Yogyakarta : UNY)

Sumber :

WWW. Koinfo. Bone. Go. Id

WWW. Bone. Go. Id

WWW. PPID. Bone. Go. Id

LAMPIRAN 1, INSTRUMEN PENELITIAN

1. Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian

1. Judul Penelitian:

**PERAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN DALAM MENGELOLA WEBSITE SEBAGAI
SARANA PUBLIC RELATIONS PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BONE**

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Pemerintah Kab. Bone dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam Pengembangan Website Pemda ?
2. Bagaimana Efektivitas pengelolaan Website Pemerintah Daerah dalam menjalin hubungan masyarakat

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Strategi Pemerintah Kab. Bone dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam Pengembangan Website Pemda
2. Untuk mengetahui Efektivitas pengelolaan Website Pemerintah Daerah dalam menjalin hubungan masyarakat

4. Fokus Penelitian

1. Strategi Pemerintah Kab. Bone dalam hal ini Dinas Komunikasi dan informasi dalam pengembangan Website Pemda

2. Efektivitas Penggunaan Website Pemerintah Daerah dalam menjalin hubungan Masyarakat

5. Informan penelitian

1. Internal

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
2. Kabag Humas Kantor Bupati Kab. Bone

2. Eksternal

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Kepala Desa | 2 |
| 2. Mahasiswa | 5 |
| Orang | |
| 3. Representasi Organisasi Perempuan | 1 |
| Orang | |

**TABEL MATRIKS UNTUK PENGEMBANGAN INSTRUMEN
PENELITIAN**

No	Rumusan masalah	Fokus Penelitian	Indikator	Prediktor	Sumber Informan	Teknik Pengumpulan Data
1	Bagaimana Strategi Pemerintah Kab. Bone dalam hal ini Dinas Komunikasi dan informasi dalam pengembangan Website Pemda	Strategi Pemerintah Kab. Bone dalam hal ini Dinas Komunikasi dan informasi dalam pengembangan Website Pemda	1. Tujuan dan Program 2. Sosialisasi Pemerintah Daerah dalam pengenalan website pemda	1. Perencanaan 2. Sosialisasi	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Bone 2. Kabag Humas Kantor Bupati Kab. Bone	1. Observasi 2. Interview 3. Dokumen
2	Bagaimana Efektivitas Penggunaan Website Pemerintah Daerah dalam menjalin hubungan Masyarakat	Efektivitas Penggunaan Website Pemerintah Daerah dalam menjalin hubungan Masyarakat	1. Pencapaian Target 2. SDM/Peberdayaan	1. Tepat sasaran/ Memenuhi target 2. Berkompetensi, cakap dan mampu.	1. Representasi Organisasi perempuan. 2. Representasi Stakeholder Masyarakat 3. Mahasiswa	1. Observasi 2. Interview 3. Dokumen

2. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

1. Bagaimana Strategi Pemerintah Kab. Bone dalam hal ini Dinas Komunikasi dan informasi dalam pengembangan Website Pemda?
 1. Tujuan dan Program
 1. Bagaimana penetapan Tujuan dan Program menurut Renja Diskominfo?
 2. Sosialisasi Pemerintah Daerah dalam pengenalan website pemda sebagai sarana public relations
 - 1). Apakah ada program yang dicanangkan khusus untuk sosialisasi pengenalan website pemda sebagai sarana public relations ke desa desa ?
 - 2). Bagaimana prinsip program Sosialisasi yang dijalankan selama ini?
 2. Bagaimana Efektivitas Penggunaan Website Pemerintah Daerah dalam menjalin hubungan masyarakat ?
 - 1). Apakah sudah ada program yang sampai di desa ini untuk sosialisasi dan pengenalan website?
 - 2). Apakah Anda mengetahui bahwa ada Website yang dikelola Pemda untuk memudahkan masyarakat memantau perkembangan pembangunan Kab. Bone?
 - 3). Apa yang menyebabkan kini masyarakat lebih cenderung mengakses lewat sosmed daripada website pemda?

4). Menurut anda, apakah kini website pemda telah tepat sasaran dan mencapai upaya partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya?

5). Apa Hambatan saat ini untuk website pemda untuk dapat bersaing dengan sosmed ?

6). Bagaimana Harapan dan Saran anda untuk pengembangan website Pemda kedepannya?

7). Apakah ada Program pemberdayaan masyarakat yang difokuskan khusus untuk teknologi informasi dan pengenalan website pemda ?

8). Bagaimana koordinasi antara Bagian Humas Pemerintah Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Bone (Selaku pengelola) dalam penyajian data di website?

1. Pencapaian Target

1. Bagaimana Pencapaian Target diskominfo menurut renja ?

2. SDM/Pemberdayaan

1. Apakah ada Program pemberdayaan masyarakat yang difokuskan khusus untuk teknologi informasi dan pengenalan website pemda ?

Bagaimana koordinasi antara Bagian Humas Pemerintah Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Bone (Selaku pengelola) dalam penyajian data di website?

3. Panduan observasi

Permasalahan yang diteliti :

1. Sosialisasi Pemerintah Daerah dalam pengenalan website pemda sebagai sarana public relations.
2. Program pemberdayaan masyarakat yang difokuskan khusus untuk teknologi informasi dan pengenalan website pemda.
3. Koordinasi Dinas Komunikasi dan Informasi dengan bagian Hubungan masyarakat dalam mensosialisasikan dan pengenalan website pemda ke seluruh wilayah kabupaten/kota.
4. Sumber Daya Manusia yang mengelola website sesuai dengan prinsip “The Right Man on the Right Place”
5. Sinergitas antara tujuan dan target yang telah ditentukan sesuai dengan perencanaan awal dibentuknya website pemda.

Kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan website pemda sebaik-baiknya untuk menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dengan menyajikan konten menarik untuk diakses, mudah, cepat, akurat, lengkap dan terpercaya

NO	Uraian Masalah	Indikator
1.	Sosialisasi Pemerintah Daerah dalam pengenalan website pemda sebagai sarana public relations.	Terprogram/tidak terprogram
2.	Program pemberdayaan masyarakat yang difokuskan khusus untuk teknologi informasi dan pengenalan website pemda	Terlaksana/tidak terlaksana/terencana/tidak terencana
3.	Koordinasi Dinas Komunikasi dan Informasi dengan bagian Hubungan masyarakat dalam mensosialisasikan dan pengenalan website pemda ke seluruh wilayah kabupaten/kota.	Terkoordinasi dengan baik/tidak terkoordinasi dengan baik
4.	Sumber Daya Manusia yang mengelola website sesuai dengan prinsip “The Right Man on the Right Place”	Sesuai/tidak sesuai
5.	Sinergitas antara tujuan dan target yang telah ditentukan sesuai dengan perencanaan awal dibentuknya website	Tercapai/tidak tercapai/terhambat

	pemda.	
6.	Kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan website pemda sebaik-baiknya untuk menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dengan menyajikan konten menarik untuk diakses, mudah, cepat, akurat, lengkap dan terpercaya.	Siap/tidak siap

6. Daftar Nama dan Asal Informan

DAFTAR NAMA DAN ASAL INFORMAN

No	Jabatan	Inisial Nama
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Bone	M
2	Kabag Humas Pemerintah Daerah Kab. Bone	AM
3	Kepala Desa Pattimpa Kec. Ponre	Y
4	Kepala Desa Bolli Kec. Ponre	AM
5	Anggota tim penggerak PKK Kab. Bone	SH
6	Mahasiswa	AMJ
7	Mahasiswa	AMS
8	Mahasiswa	AIYA
9	Mahasiswa	WM
10	Mahasiswa	I

LAMPIRAN II, DOKUMENTASI PENELITIAN

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara bersama Kepala Desa. Minggu 5 Januari 2020



Wawancara Kepala Bagian Humas dan protokol Setda Kab. Bone. 23 Januari 2020



Wawancara bersama akademisi (dosen) sekaligus perwakilan organisasi perempuan PKK Kab. Bone. Sabtu 4 Januari 2020



Wawancara bersama SKPD Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone.



Kabid Teknologi Informasi. 24 Januari 2020 Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Informasi

18 Februari 2020



Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik



Operator Halo Bone



Kepala Seksi data ekonomi sarana dan prasarana



Kepala Sub Bagian Keuangan

Wawancara Mahasiswa, Senin 6 Januari 2020



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mulkhaeri Ikram

Nim : 4516021034

Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Administrasi Negara

dengan ini menyatakan bahwa judul Skripsi :

**PERAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
DALAM MENGELOLA WEBSITE SEBAGAI SARANA *PUBLIC*
*RELATIONS***

benar bebas dari plagiarisme sesuai ketentuan yang berlaku, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 20 Mei 2020

Yang membuat pernyataan,




Mulkhaeri Ikram